Memajukan Hak Asasi Manusia & Efektivitas Pembangunan

Buku Petunjuk Pelatihan Aid Observatorio OMS 2020

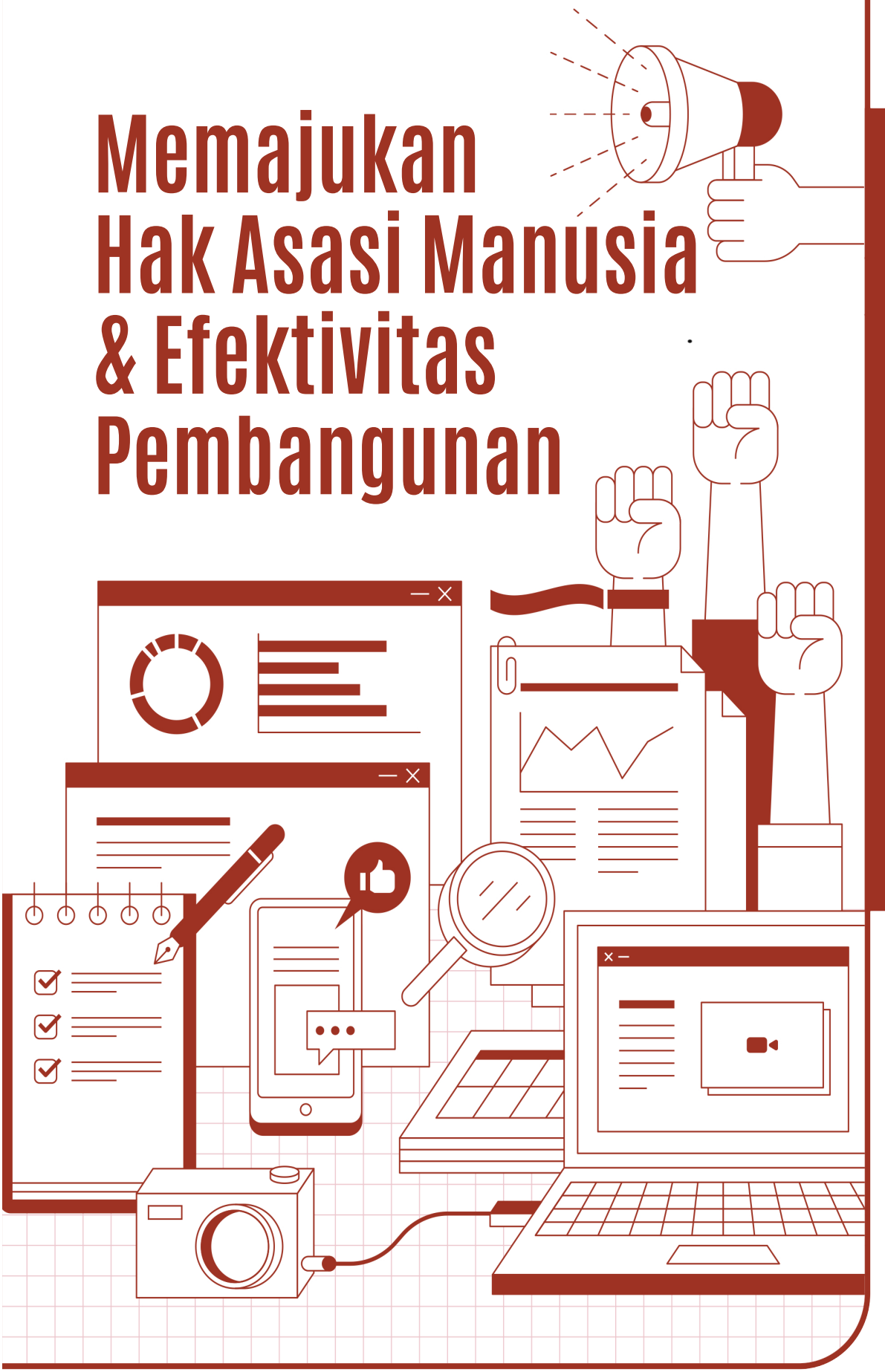

The Reality of Aid Network
A Pre-eminent Southern-led North/South Network on Reforming Aid Policies and Practices

CSOPartnership for Development Effectiveness

TAIWAN FOUNDATION for DEMOCRACY 財團法人 臺灣民主基金會

Sida

European Commission

Diterbitkan oleh

The Reality of Aid Network
A Pre-eminent Southern-led North/South Network on Reforming Aid Policies and Practices

CSOPartnership for Development Effectiveness

Versi Bahasa Indonesia diterbitkan oleh

INDIES
INSTITUTE FOR NATIONAL AND DEMOCRACY STUDIES

Reality of Aid – Asia Pacific Secretariat
CSO Partnership for Development Effectiveness Asia Secretariat
3/F IBON Center
114 Jalan Timog
Kota Quezon 1103
Filipina

Penelitian ini tidak mungkin terlaksana tanpa kontribusi dari anggota Reality of Aid - Asia Pacific dan CSO Partnership for Development Effectiveness Asia. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada IBON International atas dukungan dan bimbingannya yang maksimal.

Redaktur Pelaksana: Sarah Isabelle Torres
Penulis dan Konsultan: Marjorie Pamintuan
Tata Letak dan Desain Sampul: Allen John Guanzon

Reality of Aid – Asia Pacific
CSO Partnership for Development Effectiveness Asia
Telepon: +632 927 7060 to 62 loc 201
Telefax: +632 927 6981
Website: www.realityofaid.org

Oktober 2020

European Commission

Sida

TAIWAN FOUNDATION for DEMOCRACY
財團法人 臺灣民主基金會

Publikasi ini telah diproduksi dengan bantuan keuangan dari European Commission, Swedish International Development Cooperation Agency, dan Taiwan Foundation for Democracy. Isi publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab RoA-AP dan CPDE Asia, dan dalam keadaan apa pun tidak dapat dianggap mencerminkan posisi para donor tersebut di atas.

Buku ini boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian dengan hak pengakuan untuk RoA-AP dan CPDE Asia.

Memajukan Hak Asasi Manusia & Efektivitas Pembangunan

Buku Petunjuk Pelatihan Aid Observatorio OMS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 4

Apa yang baru dalam Buku Petunjuk Pelatihan Aid Observatorio OMS 2020? 5

Modul 01. **Prinsip dan Konsep Bantuan dan Kerja Sama Pembangunan** 6

Sesi 1.1: Sejarah Bantuan dan Efektivitas Pembangunan 8

I. Dari Efektivitas Bantuan ke Kerja Sama Pembangunan 8

II. Tantangan yang Dihadapi OMS dalam Kerja Efektivitas Pembangunan 14

Sesi 1.2: Memahami Arsitektur Bantuan Kerja Sama Pembangunan 17

I. Aspek Prosedural dan Teknis Bantuan dan Kerja Sama Pembangunan 17

A. Pemain Utama dalam Sistem Bantuan 18

B. Penelusuran Aliran Bantuan 23

C. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Kerja Sama Pembangunan Selatan-Selatan 27

D. Menelusuri SSDC 29

Sesi 1.3: Prinsip-Prinsip Efektivitas Pembangunan 35

I. Kerangka Kerja Penilaian terhadap Efektivitas Pembangunan 35

Sesi 1.4: Menuju Kerangka Kerja Demokratis untuk Kerja Pembangunan Berbasis HAM untuk Pembangunan Berkelanjutan 39

I. Operasionalisasi Kerangka Kerja Berbasis Hak Asasi Manusia dan Demokratis dalam Kerja Sama Pembangunan 39

Kegiatan 1.1: Menciptakan Teori Perubahan untuk Kerja Sama Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Pembangunan Berkelanjutan 41

Modul 02. **Penelitian Rakyat dalam Kerja Sama Pembangunan** 43

Sesi 2.1. Melaksanakan Penelitian Rakyat 45
I. Apa itu Penelitian Rakyat? 45
II. Prinsip-Prinsip dalam Melaksanakan Penelitian Rakyat 46
Sesi 2.2. Aid Observatorio OMS 47
I. Apa itu Aid Observatorio OMS? 47
A. Penelitian Rakyat dalam Aid Observatorio 48
Sesi 2.3. Proses Penelitian Rakyat dalam Kerja Sama Pembangunan 49
I. Tujuh Langkah dalam Melaksanakan Penelitian Rakyat dalam Kerja Sama Pembangunan 50

Modul 03. **Sumber dan Pengelolaan Data** 56

Sesi 3.1. Data Terbuka dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Data 58
I. Apa itu Data? 58
II. Apa itu Data Terbuka? 58
A. Apa Manfaat dari Data Terbuka? 59
B. Contoh Database Terbuka 59
C. Apa itu IATI? 60
III. Apa itu Pengelolaan Data? 60
A. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Data 61
Sesi 3.2. Sumber Data 63
I. Apa saja jenis informasi bantuan? 63
II. Sumber Data 64
Kegiatan 2: Merancang sebuah penelitian untuk Aid Observatorio OMS 65

Modul 04. **Diseminasi dan Popularisasi** 66

Sesi 4.1. Kerja Advokasi 67
I. Pentingnya Advokasi untuk Efektivitas Pembangunan 67
II. Lima Tahapan untuk Melaksanakan Kerja Advokasi 68
Kegiatan 3.1: Menyusun rencana advokasi untuk hasil penelitian Aid Observatorio OMS (Bagian A) 73
Sesi 4.2: Metode dalam Melaksanakan Kerja Advokasi 74
Kegiatan 3.2: Menyusun rencana advokasi untuk hasil penelitian Aid Observatorio OMS (Bagian B) 82

KATA PENGANTAR

Advokasi dan kampanye oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) berperan besar dalam menggeser wacana kerja sama pembangunan dari sekadar efektivitas bantuan, yang cenderung berfokus pada aspek teknis penyampaian bantuan, ke efektivitas pembangunan yang lebih holistik dimana kerangka kerja berbasis hak asasi manusia telah mendapatkan pengakuan dan penerimaan.

Dari Akra, ke Paris, hingga ke Busan, OMS secara efektif mendukung advokasi mereka dengan hasil dari penelitian yang mereka lakukan tentang implikasi dari praktik bantuan saat ini dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai pembangunan yang lebih baik melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Pengakuan OMS sebagai aktor pembangunan merupakan pencapaian penting lainnya yang diraih di Busan.

Namun terlepas dari komitmen dokumen Busan Partnership untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi OMS, dokumen tersebut tidak memastikan akuntabilitas untuk semua komitmen yang dibuat oleh semua negara / pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerja sama pembangunan. Tanpa kerangka akuntabilitas, transparansi dan akuntabilitas menjadi masalah dalam memantau bantuan dan mengakses informasi bantuan. Agar OMS dapat berikatan dengan donor, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya secara substansial dalam memajukan bantuan dan reformasi efektivitas pembangunan, diperlukan ketersediaan dan aksesibilitas data bantuan yang berkualitas. Ketersediaan dan aksesibilitas informasi tentang bantuan kepada pemangku kepentingan yang lebih luas memungkinkan pengelolaan bantuan yang lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan dampak pembangunannya.

Pada tahun 2013, The Reality of Aid Network - Asia Pacific (RoA-AP) melaksanakan pelatihan tentang Aid Observatorio OMS (CSO Aid Observatorio) untuk memperkuat kapasitas OMS dalam memantau bantuan dan untuk mempromosikan kemitraan OMS dan keterpaduan kerja pemantauan bantuan menuju keterlibatan dalam kebijakan berbasis bukti tentang bantuan dan efektivitas pembangunan di Asia Pasifik. Modul Pelatihan 2013 mencerminkan konsep dan definisi dari Efektivitas Bantuan hingga Efektivitas Pembangunan seperti yang dipromosikan oleh Kemitraan Busan (Busan Partnership) untuk Kerja Sama Pembangunan yang Efektif.

Tujuh tahun kemudian, RoA-AP dan Kemitraan OMS tentang Efektivitas Pembangunan (CPDE) Asia menghasilkan manual pelatihan terbaru ini untuk:

1. Mencerminkan transformasi dalam kerja sama pembangunan dan arsitektur bantuan serta perubahan sifat dari Aid Observatorio OMS;
2. Mengkondisikan konsep kerja sama pembangunan dan contoh-contohnya dalam konteks terkini;
3. Mendiskusikan tantangan baru dan tren yang muncul
4. Mendorong OMS untuk mempraktikkan cara-cara yang diformulasikan kembali untuk pemantauan dan keterlibatan dalam kebijakan; dan
5. Memanfaatkan kapasitas OMS untuk ikut berperan serta dalam Aid Observatorio RoA.

Buku petunjuk pelatihan terkini tersusun atas:

Modul 1. Konsep dan Prinsip Bantuan dan Kerja Sama Pembangunan

Modul 2. Penelitian Rakyat dalam Kerja Sama Pembangunan

Modul 3. Sumber dan Manajemen Data

Modul 4. Diseminasi dan Popularisasi

Apa yang baru dalam Buku Petunjuk Pelatihan Aid Observatorio OMS 2020?

1. Modul versi 2020 mirip dengan versi 2013 tapi sesi tiap modul telah dimodifikasi agar setiap sesi diperbaharui, lebih praktis, dan komprehensif.

2. Tiga aktifitas dalam versi ini dapat ditinjau sebagai kegiatan yang terhubung dan terintegrasi yang mengarah pada peningkatan kapasitas OMS untuk melakukan penelitian untuk Aid Observatorio OMS dan menyebarluaskan serta mempopulerkan penemuan mereka.

3. Selain memantau bantuan dari donor bilateral dan multilateral tradisional dan lembaga keuangan internasional (International Financial Institution / IFI), pemantauan Kerja Sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation / SSC) juga dianggap sebagai provider bagi Negara-negara Selatan yang sedang bangkit.

4. Sesi di **Modul 4. Diseminasi dan Popularisasi** menyertakan jenis metode yang sesuai dengan era digital saat ini.

5. Lembar kegiatan disertakan dalam buku petunjuk ini.

Buku petunjuk pelatihan Aid Observatorio OMS 2020 tidak hanya untuk OMS berpengalaman, tetapi juga untuk kelompok baru OMS, aktivis, peneliti, dan pemangku kepentingan / stake holder pembangunan lainnya dengan tujuan akhir untuk menyampaikan tujuan dari Aid Observatorio OMS, yakni:

1. Mempromosikan kesadaran dan transparansi manajemen bantuan oleh pemerintah penerima dan penyedia kerja sama pembangunan;

2. Penelitian dan analisis bantuan tentang tren dan dampak proyek pembangunan kemitraan publik-swasta (public-private partnership);

3. Membantu keterlibatan OMS dengan pemerintah penerima dan donor serta penyedia lainnya untuk penggunaan dana publik yang efektif dan efisien dan untuk perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi;

4. Membantu advokasi kampanye komunitas atau organisasi rakyat atau akar rumput untuk tuntutan hak demokratis mereka dan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dan penyedia lainnya; dan

5. Memfasilitasi pembelajaran dan wacana bersama di antara OMS, pembuat kebijakan, akademisi, media, dan aktifis untuk promosi berbasis hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan oleh rakyat, dan melanjutkan solusi atau rekomendasi kritis.

Modul 01

PRINSIP DAN KONSEP BANTUAN DAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN

Tujuan Modul

1. Memperkenalkan bagaimana wacana efektivitas bantuan berevolusi menjadi efektivitas pembangunan.
2. Mengenalkan lebih dalam kepada peserta tentang teknik dan aspek prosedural dari sistem bantuan dan tantangan yang dihadapi oleh OMS.
3. Memfasilitasi pembukaan jalan menuju kerangka demokratis berbasis hak asasi manusia untuk kerja sama pembangunan yang akan berkontribusi terhadap capaian pembangunan yang berkelanjutan.

Durasi Waktu: Minimal 3 Jam

Di tengah kegagalan program bantuan untuk membantu negara-negara miskin dalam memenuhi target, para donor mencoba untuk memperkenalkan reformasi efektivitas bantuan dengan maksud yang layak untuk meningkatkan dampak bantuan terhadap pengurangan kemiskinan dan percepatan upaya untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Milenial (MDG). Namun, reformasi efektivitas bantuan lebih berfokus pada masalah teknis dibandingkan pembuatan kebijakan pembangunan.

Bantuan juga dikenal sebagai Bantuan Pembangunan Resmi atau Official Development Assistance (ODA) dan ditetapkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development - Development Assistance Committee (OECD-DAC) sebagai bantuan pemerintah yang mempromosikan dan menargetkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara berkembang. Pemerintah donor telah berkomitmen untuk menyediakan 0.07% ODA (dari GNI).

Dalam rangkaian Forum Tingkat Tinggi (FTT), fokus masalah secara bertahap bergeser ke masalah pembangunan yang menyeluruh. Dari yang sekadar penyesuaian sistem dan prosedur penyaluran bantuan, agendanya segera menangani efektivitas pembangunan, dan terkini, berkomitmen untuk membangun arsitektur pembangunan baru di tengah berbagai krisis global.

Kerja sama pembangunan baru yang divisikan dalam dokumen Kemitraan Busan menyajikan jaringan kemitraan baru yang kompleks yang menangani berbagai aspek agenda pembangunan. Di bawah Kemitraan Global untuk Kerja Sama Pembangunan yang Efektif (Global Partnership for Effective Development Cooperation / GPEDC), organisasi masyarakat sipil (OMS) menjalankan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa program bantuan dan pembangunan dapat memberikan hasil di tengah interaksi kepentingan yang kompleks.

GPEDC saat ini berupaya untuk berkontribusi pada

implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan 17, maka diperlukan pemantauan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa program pembangunan mematuhi prinsip-prinsip HAM, kesetaraan gender, transparansi dan akuntabilitas, dan pekerjaan yang layak.

Modul ini dibagi menjadi empat sesi dan satu kegiatan:

Sesi 1.1.

Sejarah Bantuan dan Efektivitas Pembangunan	menyediakan gambaran forum tingkat tinggi yang membentuk diskusi tentang bantuan dan efektivitas pembangunan, prinsip-prinsip dan komitmen yang disetujui oleh para aktor pembangunan, peran OMS dalam pemantauan bantuan, dan tantangan yang dihadapi OMS tentang lingkungan yang mendukung (enabling environment).

Sesi 1.2.

Memahami Arsitektur Bantuan dan Kerja Sama Pembangunan	menyediakan latar belakang pada sistem bantuan dan pemantauan bantuan yang efektif oleh OMS

Sesi 1.3.

Prinsip Efektivitas Pembangunan	mendiskusikan prinsip efektivitas pembangunan dan beberapa kerangka kerja yang digunakan dalam memantau implementasi prinsip-prinsip tersebut.

Sesi 1.4.

Menuju Kerangka Kerja Demokratis Berbasis HAM untuk Kerja Sama Pembangunan Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan	menentukan prinsip-prinsip dasar untuk transformasi sistem global tentang kerja sama pembangunan terkini

Kegiatan 1

Menciptakan Teori Perubahan untuk Kerja Sama Pembangunan Berbasis HAM untuk Pembangunan Berkelanjutan	mengarahkan peserta untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dari empat sesi sebelumnya dalam memikirkan jalan menuju kerja sama pembangunan untuk rakyat.

Sesi 1.1.

Sejarah Bantuan dan Efektivitas Pembangunan

Manfaat Pembelajaran	Di akhir sesi ini, peserta diharapkan mampu: 1. Memahami forum tingkat tinggi yang membentuk agenda bantuan dan efektivitas pembangunan. 2. Mengidentifikasi tantangan dan tindakan berdasarkan kerangka kerja bantuan dan efektivitas pembangunan terkini.
Bahan-bahan	• Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts • LCD projector • Spidol
Proses	1. Menjelaskan hasil pembelajaran (outcome). 2. Bertanya pada peserta jika mereka pernah menghadiri forum bantuan dan efektivitas pembangunan. 3. Menanyakan ke peserta tentang apa yang mereka pikirkan mengenai partisipasi OMS dalam forum semacam ini dengan mengucapkan kata pertama yang muncul dalam pikiran mereka. 4. Mendiskusikan gambaran tentang forum tingkat tinggi tentang bantuan dan efektivitas pembangunan. 5. Memperagakan diskusi menggunakan pertanyaan sugestif di akhir sesi.

I. Dari Efektivitas Bantuan ke Kerja Sama Pembangunan

Masalah efektivitas bantuan (aid effectiveness) dan kerja sama pembangunan (development cooperation) memperoleh keunggulan sejak penandatanganan Deklarasi Paris mengenai Efektivitas Bantuan di FTT II (Paris Declaration on Aid Effectiveness at the Paris High Level Forum II) yang dilaksanakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2005. Deklarasi Paris adalah capaian yang belum pernah ada sebelumnya untuk komunitas donor internasional dan pemerintah mitra, yang mengikat mereka pada prinsip-prinsip utama untuk reformasi bantuan. Sejak saat itu, agenda efektivitas bantuan yang awalnya berfokus pada manajemen dan penyaluran bantuan telah berkembang dengan memasukkan pendekatan HAM dalam proses selanjutnya.

Peran OMS dalam transformasi agenda tersebut cukup krusial dalam memajukan reformasi dalam kerja sama pembangunan melampaui Deklarasi Paris, memperdalam agenda untuk mencakup isu-isu seperti persyaratan dan bantuan terikat, dan mengembangkan akuntabilitas yang lebih baik secara nasional dan internasional. Di bawah ini adalah penjelasan tentang uraian proses utama dalam bantuan dan kerja sama pembangunan serta prinsip-prinsip yang disepakai dalam setiap proses.

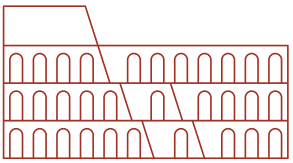

2003

Forum Tingkat Tinggi I tentang Harmonisasi
Roma, Italia

Dokumen yang dihasilkan
Deklarasi Roma tentang Harmonisasi

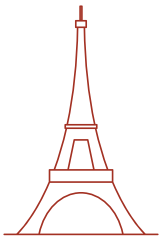

2005

Forum Tingkat Tinggi II
Paris, Perancis

Dokumen yang dihasilkan
Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan

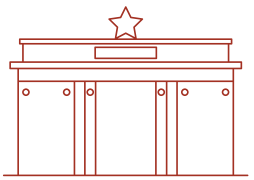

2008

Forum Tingkat Tinggi III
Akra, Ghana

Dokumen yang dihasilkan
The Accra Agenda for Action (AAA)

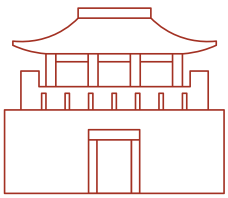

2011

Forum Tingkat Tinggi IV
Busan, Korea Selatan

Dokumen yang dihasilkan
Kemitraan Busan untuk Kerja Sama Pembangunan yang Efektif

2014

Pertemuan Tingkat Tinggi GPEDC I
Kota Meksiko, Meksiko

Dokumen yang dihasilkan
The Communiqué

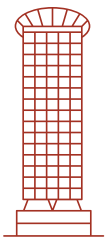

2016

Pertemuan Tingkat GPEDC II
Nairobi, Kenya

Outcome Document
The Nairobi Outcome Document (NOD)

1. Forum Tingkat Tinggi Pertama tentang Harmonisasi: Roma, Italia (2003)

Dokumen Hasil: Deklarasi Roma tentang Harmonisasi membentuk generasi reformasi efektivitas bantuan pertama yang diadopsi oleh komunitas donor. Tindakan prioritas Deklarasi Roma adalah:

- Bantuan pembangunan disalurkan sesuai prioritas dan waktu yang tepat bagi negara yang menerimanya;
- Usaha donor berfokus pada pendelegasian kerja sama dan meningkatkan fleksibilitas staf pada program dan proyek negara; dan
- Praktik yang baik didorong dan dipantau, didukung oleh kerja analitis untuk membantu memperkuat kepemimpinan yang dapat diambil oleh negara penerima dalam menentukan arah pembangunan mereka.

Kritik utama di Forum Tingkat Tinggi (FTT) Roma:

- Deklarasi difokuskan pada aspek bantuan secara teknis dan prosedural, dibandingkan masalah yang lebih kritis yang dihubungkan dengan ODA, seperti kebijakan persyaratan, bantuan terikat, dan kepemilikan.
- Forum gagal untuk memberikan target spesifik dan waktu yang mengikat untuk negara donor dalam memenuhi janji lama mereka untuk memberikan 0.7% Pendapatan Nasional Bruto (GNI) ke ODA.
- Meningkatkan harmonisasi donor sebenarnya memperkuat pengaruh kolektif donor vis-à-vis dengan penerima bantuan dan oleh karena itu memperburuk asimetri kekuasaan antara kedua belah pihak yang telah menjadi akar dari banyak masalah yang terkait dengan ODA.

2. Forum Tingkat Tinggi Kedua: Paris, Prancis (2005)

Dokumen Hasil: Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan menghadirkan generasi kedua dari reformasi efektivitas bantuan. Prinsip utamanya adalah:

- Kepemilikan: Negara-negara mitra harus menjalankan kepemimpinan yang efektif atas strategi dan kebijakan pembangunan, dan mengkoordinasikan tindakan pembangunan.
- Penyelarasan: Donor harus mendasarkan dukungan mereka secara keseluruhan pada strategi, lembaga, dan prosedur pembangunan nasional negara mitra.
- Harmonisasi: Tindakan donor harus lebih harmonis, transparan, dan efekitif secara kolektif.
- Pengelolaan untuk hasil: Pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya harus ditingkatkan menuju pendekatan yang berfokus pada hasil.
- Akuntabilitas bersama: Donor dan mitra harus sama-sama bertanggung jawab atas hasil pembangunan.

Kritik utama dalam Forum Tingkat Tinggi (FTT) Paris:

- Kepemilikan yang nyata diakui, tetapi tidak bisa dibatasi hanya pada

kepemimpinan pemerintah terhadap kebijakan pembangunan.

- Masyarakat dan komunitas harus memiliki kepemilikan atas pembangunan. Ini berarti tidak hanya sekadar "kepemilikan", tapi juga "kepemilikan secara demokratis dan lokal".
- Tidaklah cukup bahwa donor mengaitkan bantuan dengan strategi pembangunan nasional; harus jelas bahwa negara penerima mengembangkan strategi secara independen dalam konteks demokratis dan kepemilikan lokal. Dampak "permainan di balik layar" dari penasihat, konsultan, dan tekanan informal dari donor adalah masalah utama.
- Efek merugikan yang sangat serius dari harmonisasi adalah mengurangi kompetisi bantuan dan membatasi pilihan bagi negara penerima. Hal ini memperkuat posisi lembaga keuangan internasional sebagai wasit utama atas kebijakan bantuan.
- Pengelolaan untuk mencapai hasil hanya bisa efektif ketika hasil yang ditargetkan adalah pengurangan kemiskinan dan promosi HAM dan kesetaraan gender. Hal ini membutuhkan konsultasi dari aktor lokal dalam mengevaluasi hasil dan penggunaan informasi-terpilah gender.
- Prinsip dari akuntabilitas bersama membutuhkan pembangunan mekanisme khusus yang oleh penerima bantuan bisa meminta pertanggungjawaban donor. Sekali lagi, ini tidak boleh terbatas pada pemerintah penerima saja, tapi juga harus mencakup masyarakat yang paling terdampak dari penggunaan bantuan.

3. Forum Tingkat Tinggi Ketiga: Akra, Ghana (2008)

Dokumen Hasil: Accra Agenda for Action (Agenda Akra untuk Aksi) yang berisi elemen berikut:

- Mengikat komitmen donor pada dialog kebijakan tingkat negara tentang pembangunan, memperkuat kapasitas mitra negara berkembang untuk mengelola pembangunan, dan menggunakan sistem negara.
- Mengikat komitmen para donor untuk bekerja lebih dekat dengan penguasa lokal dan parlemen, OMS, lembaga penelitian, dan sektor swasta.
- Merujuk OMS sebagai "aktor pembangunan yang memiliki haknya sendiri".
- Menegaskan kembali janji donor untuk meningkatkan bantuan sekaligus mengurangi fragmentasi bantuan.
- Berjanji untuk memperbaiki akuntabilitas dan transparansi melalui pengelolaan informasi yang lebih baik dan penyelarasan dengan sistem informasi negara.

Kritik utama terhadap Forum Tingkat Tinggi (FTT) Akra:

- Saat OMS secara aktif berpartisipasi dalam masa persiapan FTT, ajuan mereka tentang komitmen waktu yang mengikat diabaikan dalam dokumen utama.
- Para donor masih menolak untuk menghilangkan bantuan terikat secara keseluruhan. Mereka juga menghindari pembahasan masalah beban utang.

4. Forum Tingkat Tinggi Keempat: Busan, Korea Selatan (2011)

Dokumen Hasil: Dalam Kemitraan Busan untuk Kerja Sama Pembangunan yang Efektif (Busan Partnership for Effective Development Cooperation), agenda efektivitas bantuan untuk pertama kalinya diperluas untuk menangani isu efektivitas pembangunan. Istilah "Kerja Sama Pembangunan (Development Cooperation)" dan "Kemitraan untuk Pembangunan (Partnership for Development)" yang digunakan, bukan "bantuan (aid)". "Efektivitas Bantuan (Aid Effectiveness)" memberikan jalan untuk "Kerja sama Pembangunan yang Efektif" dan "Kerja sama untuk Pembangunan yang Efektif" merujuk pada agenda reformasi baru. FTT Busan juga membuka jalan untuk pembentukan Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) yang menggantikan Kerja Pihak OECD-DAC tentang Efektivitas Bantuan. GPEDC memiliki perwakilan dari donor, pemerintah, OMS, dan sektor swasta.

Prinsip yang disetujui di Busan menjadi prinsip-prinsip Kerja sama Pembangunan yang Efektif (Effective Development Cooperation/EDC). Antara lain:

- **Kepemilikan prioritas pembangunan oleh negara berkembang.** Kemitraan untuk pembangunan bisa berhasil jika dipimpin oleh negara berkembang, melaksanakan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi tertentu Negara tersebut. Memperdalam dan menjalankan kepemilikan demokratis atas kebijakan juga diakui.
- **Berfokus pada hasil.** Investasi dan upaya-upaya yang dilakukan harus memberikan dampak jangka panjang terhadap pemberantasan dan pengurangan ketimpangan, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas negara berkembang, selaras dengan kebijakan dan prioritas yang ditentukan oleh negara berkembang itu sendiri.
- **Kemitraan pembangunan yang inklusif.** Keterbukaan, kepercayaan, serta pembelajaran dan saling menghormati ditempatkan pada inti kemitraan yang efektif dalam mendukung tujuan pembangunan, mengakui peran yang berbeda dan saling melengkapi dari semua aktor.
- **Akuntabilitas bersama dan akuntabilitas terhadap penerima manfaat kerja sama** of cooperation, as well as to our respective citizens, organizations, constituents and shareholders, is critical to delivering results. Transparent practices form the basis for enhanced accountability.

Kritik utama terhadap dokumen Kemitraan Busan (Busan Partnership Document / BPd) adalah:

- Meskipun dokumen Kemitraan Busan mengakui bahwa pembahasan Paris dan Akra belum selesai, dokumen Kemitraan Busan gagal mengatasi kealpaan komitmen dan jadwal yang kongkrit.
- Dokumen Kemitraan Busan sepenuhnya bersifat sukarela (voluntary).
- Tidak ada komitmen nyata tentang bagaimana mengatasi kebijakan persayaratan, bantuan yang tidak mengikat, dan ketidakpastian bantuan.
- Mempromosikan pertumbuhan yang dipimpin oleh sektor swasta, yang sesuai dengan kerangka kerja neoliberal dari pembangunan berkelanjutan.
- Beban berat negara kecil atas Dokumen Kemitraan Busan memberikan beban kerja pada Negara.

5. Rapat Tingkat Tinggi Pertama GPEDC: Kota Meksiko, Meksiko (2014)

Dokumen Hasil: Komunike tersebut menghormati komitmen yang dibuat di Busan. Referensi menuju pembangunan inklusif, kepemilikan demokratis negara, meningkatkan perpajakan dan penggunaan sistem negara, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan dukungan untuk OMS sebagai aktor pembangunan independen dibuat dalam pernyataan tersebut. Mengikat komitmen donor untuk dialog kebijakan tingkat negara yang lebih luas mengenai pembangunan, memperkuat kapasitas mitra negara berkembang untuk mengelola pembangunan, dan menggunakan sistem negara.

Kritik utama terhadap Rapat Tingkat Tinggi (RTT) Meksiko dan Komunike:

- Komitmen yang lebih kuat terhadap pendekatan HAM, standar kesetaraan gender dan kerangka kerja lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil terlupakan dalam dokumen hasil RTT ini.
- RTT dan komunike dicirikan dengan fitur ketidakseimbangan peran sektor swasta, khususnya, perusahaan multinasional. Lemah dalam hal norma akuntabilitas pada investasi sektor swasta.
- Prinsip yang melekat pada kerja sama internasional, seperti transparansi dan kepemilikan demokratis tidak ada.
- Ketiadaan roadmap tentang bagaimana penyaluran proses post-2015, kurangnya koherensi kebijakan antara GPEDC dan proses post-2015.
- Meskipun acuan pada standar akuntabilitas dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (SSC) dimasukkan pada menit-menit terakhir dalam Komunike, komitmen masih tetap berdasarkan sukarela dan prinsip-prinsip efektivitas pembangunan yang penting tetap dibatasi.

6. Rapat Tingkat Tinggi Kedua GPEDC: Nairobi, Kenya (2016)

Dokumen Hasil: Dokumen Hasil Nairobi (Nairobi Outcome Document / NOD) mengakui bahwa pelaksanaan komitmen sebelumnya adalah inti untuk bergerak maju dengan agenda kerja sama pembangunan yang efektif. Dokumen ini berkomitmen untuk membalikkan tren menyempit dan menutupnya ruang bagi masyarakat sipil dan membantu mengembangkan potensi penuh OMS untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang efektif. NOD juga memajukan peran GPEDC dalam melaksanakan komitmen

efektivitas yang ada serta memajukan agenda 2030 demi pembangunan yang berkelanjutan. Bahasa dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan peran pemuda dalam pembangunan juga diperkuat.

Kritik utama terhadap NOD adalah:

- Tidak adanya acuan tentang kepemilikan demokratis sebagai tindakan yang disetujui dalam NOD.
- Pembatasan peran masyarakat sipil dalam menagih akuntabilitas pemerintah dan kurangnya penekanan terhadap pentingnya kepemilikan tiap negara atas pembangunan sosial ekonomi mereka sendiri.
- Kurangnya kejelasan tujuan, yaitu pemberantasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan dalam penggunaan keuangan publik internasional untuk pembangunan sektor swasta.

II. Tantangan yang Dihadapi OMS dalam Kerja Efektivitas Pembangunan

Advokasi dan engagement OMS memainkan peran besar dalam perubahan narasi kerja sama pembangunan dari agenda "efektivitas bantuan" menjadi "efektivitas pembangunan" yang mengadopsi pendekatan berbasis HAM. Dari Roma ke Nairobi, dan seterusnya, tanpa kenal lelah OMS bekerja untuk meyakinkan komitmen efektivitas pembangunan, seperti yang disetujui di Busan, ditaati oleh para penyedia kerja sama pembangunan. Selain prinsip EDC, keberhasilan utama lainnya yang diraih oleh OMS dari perikatan (engagement) dan advokasi yang dilakukan adalah adanya jaminan kursi dalam badan pembuatan kebijakan tertinggi GPEDC – Komite Pengarah (Steering Committee).

Peran OMS dalam konteks kerja sama pembangunan pertama kali diakui secara resmi pada FTT Akra 2008 dimana OMS dirujuk sebagai "aktor pembangunan yang memliki hak sendiri". Ini berarti bahwa mereka bisa menyusun rencana, prioritas, dan pendekatan mereka sendiri, dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kerja sama pembangunan. Sebagai aktor independen, mereka dituntut untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas mereka sendiri yang dipandu oleh Prinsip Istanbul (Istanbul Principles) dan kerangka kerja internasional untuk efektivitas pembangunan OMS (Siem Reap Consensus).

OMS saat ini memiliki mandat untuk terlibat dalam program kerja sama pembangunan dari tahap perencanaan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi. Dokumen Kemitraan Busan (BPd) menyediakan ruang bagi OMS untuk bekerja sama dengan donor dan pemerintah dalam mendorong agenda pro-kaum miskin dalam kerja sama pembangunan melalui serangkaian kegiatan dan kemitraan. Menurut BPd[1]:

> "OMS memainkan peran vital dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka, mendorong pendekatan

[1] Busan Partnership for Effective Development Cooperation, paragraph 22. https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf

Konsensus Siem Reap

Hasil dari proses konsultasi Forum Terbuka yang difinalkan dan disahkan pada Juni 2011 di Pertemuan Global Kedua Forum Terbuka di Siem Reap, Kamboja.

- Pernyataan pertama dari masyarakat sipil tentang efektivitas kerja OMS dalam pembangunan;
- Melegitimasi referensi jangka panjang untuk OMS di seluruh dunia sebagai basis untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja pembangunan OMS pada tingkat nasional, regional, dan internasional; dan
- Memasukkan delapan Prinsip Istanbul untuk efektivitas pembangunan OMS dan kriteria minimum untuk pemerintah yang mendukung serta kebijakan dan praktik donor.

Prinsip Istanbul untuk Efektivitas Pembangunan OMS

Hasil dari forum terbuka tentang efektivitas pembangunan OMS di Istanbul pada tanggal 28-30 September yang menjadi petunjuk bagi OMS dalam kerja pembangunan mereka. Prinsip tersebut antara lain:

- Menghormati dan memajukan keadilan sosial dan HAM
- Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memajukan hak perempuan dan remaja perempuan
- Berfokus pada pemberdayaan masyarakat, partisipasi dan kepemilikan demokratis
- Mempromosikan keberlanjutan lingkungan
- Menerapkan akuntabilitas dan transparansi
- Mendorong solidaritas dan kemitraan yang adil
- Menciptakan dan berbagi pengetahuan dan komitmen pembelajaran bersama
- Berkomitmen untuk mewujudkan perubahan berkelanjutan yang positif

Source: **https://csopartnership.org/resource/istanbul-principles-for-cso-development-effectiveness/**

berbasis hak asasi, membentuk kerja sama dan kebijakan pembangunan, dan mengawasi pelaksanannya. Mereka juga menyediakan pelayanan di wilayah yang melengkapi pelayanan yang disediakan oleh negara. Atas pengakuan ini, kita akan:

a. Melaksanakan komitmen kita secara penuh untuk membantu OMS dalam menjalankan peran sebagai aktor pembangunan yang independen, dengan secara khusus berfokus pada lingkungan yang mendukung, konsisten dengan hak-hak internasional yang telah disepakati, yang memaksimalkan kontribusi OMS terhadap pembangunan.

b. Mendorong OMS untuk menerapkan dan memperkuat akuntabilitas dan kontribusi mereka untuk efektivitas pembangunan yang dipandu oleh Prinsip Istanbul dan kerangka kerja internasional untuk efektivitas pembangunan OMS."

Selain kemajuan yang dibuat dalam meningkatkan partisipasi dan keterlibatan OMS dalam agenda efektivitas pembangunan, masih banyak tantangan dalam isu lingkungan yang mendukung (enabling environment) bagi OMS. OMS mengeluhkan munculnya 2 (dua) tren berbahaya dalam kerja sama pembangunan yang efektif: kontrol korporasi atas pembangunan serta penyempitan dan penutupan ruang sipil. Peran yang semakin besar oleh bisnis raksasa – korporasi multinasional dan transnasional dan lembaga keuangan (MNC, TNC, dan IFI) - dalam implementasi dan konseptualisasi inisiatif pembangunan. Yang paling sering terjadi, inisiatif yang dipimpin oleh korporasi mengejar laba atas nama kepentingan masyarakat, serta planet ini.

Berdasarkan laporan CPDE[2] selama pemantauan ketiga (3rd Monitoring Round) terhadap komitmen yang dibuat oleh pemangku kepentingan dalam GPEDC, di banyak negara, konsultasi pemerintah dengan OMS mengenai kebijakan pembangunan masih hanya sesekali, bahkan tidak ada. Pada negara-negara dimana konsultasi pemerintah

[2] Civil society reflections on progress in Achieving development effectiveness: Inclusion, accountability and transparency. https://c419de57-e749-4591-9016-5feb763746da.filesusr.com/ugd/9f29ee_44f4e59a973f47fb920f6ce8d66cba08.pdf

berlangsung, OMS mengeluhkan bahwa kualitasnya tidak cukup dalam hal ketepatan waktu, transparansi, dan regularitas. Dialog multi-pemangku kepentingan juga mengalami masalah yang sama yaitu lemahnya regularitas dan keterlibatan OMS yang terbatas, yang sering kali dibuat hanya untuk mendukung prioritas pemerintah semata.

Sementara itu, serangan terhadap anggota masyarakat sipil baik secara terbuka dan terselubung meningkat, semua ditujukan untuk menciutkan nyali masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya. Tindakan represif mulai dari beban persyaratan transparansi dan akuntabilitas, hingga kasus pelecehan, penangkapan, dan pembunuhan. Lebih dari 900 pembela HAM terbunuh sejak 2016. Kurang lebih 182 pembunuhan ini terjadi dalam rentang tahun 2017 dan 2018.

Kurangnya ruang dan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses-proses yang berkaitan dengan efektivitas pembangunan, konteks politik yang buruk, dan serangan terhadap OMS menghambat kerja OMS dalam efektivitas pembangunan. Faktor lainnya seperti kurangnya transparansi tentang informasi bantuan, kurangnya akuntabilitas dalam negosiasi, rancangan, implementasi dan pemantauan proyek dan program bantuan tidak hanya menghalangi advokasi OMS tentang efektivitas pembangunan, tapi juga semakin mengurangi lingkungan pendukung bagi OMS untuk berfungsi sebagai aktor pembangunan independen.

Selain faktor eksternal, faktor internal seperti kapasitas OMS yang terbatas dalam memahami proses kebijakan secara spesifik, lembaga dan aktor-aktor; kapasitas yang masih lemah dalam melakukan penelitian, dan strategi yang tidak memadai dalam advokasi dan keterikatan dalam kebijakan juga perlu ditangani.

Pertanyaan Diskusi

1. Menurut anda capaian apa yang paling penting yang telah OMS raih pada FTT ini?
2. Apa yang masih perlu untuk diperjuangkan?

Sesi 1.2.

Memahami Arsitektur Bantuan dan Kerja Sama Pembangunan

Manfaat Pembelajaran	Di akhir sesi, partisipan: 1. Familiar dengan aspek prosedural dan teknis bantuan dan kerja sama pembangunan 2. Bisa mengidentifikasi aliran bantuan dan aktor pembangunan utama dalam sistem bantuan.
Bahan	• Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts • Proyektor LCD • Spidol
Proses	1. Menjelaskan tentang hasil pembelajaran dari sesi ini 2. Mendiskusikan aspek teknis dan prosedur bantuan dan kerja sama pembangunan dan Kerja sama Selatan-Selatan.

I. Aspek Prosedural dan Teknis Bantuan dan Kerja Sama Pembangunan

Sistem bantuan atau arsitektur bantuan merujuk pada bagaimana pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah donor, negara penerima, lembaga keuangan multilateral dan internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil) mengatur, memantau, dan menilai ODA.

Meskipun sistem dan arsitektur menyiratkan bahwa struktur yang terorganisir dengan baik sudah sesuai tempatnya untuk mengkoordinasikan tindakan dan kebijakan kerja sama pembangunan, faktanya adalah arsitektur bantuan cukup terfragmentasi ketika donor memutuskan prioritas mereka secara sepihak yang kadang dikendalikan oleh tujuan kebijakan asing atau hubungan historikal mereka, dan tidak sesuai dengan prioritas negara penerima atau dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hal ini mempertahankan asimetri kekuatan yang mendasar yang muncul di antara penyedia bantuan dan negara penerima. Negara-negara donor yang kuat yang sama-sama memimpin lembaga-lembaga multilateral yang terus mendominasi sistem bantuan, seperti OECD.

Fragmentasi dan kompleksitas arsitektur bantuan yang terkini memperkuat ketidaklogisan kebijakan di antara lembaga global yang berbeda, berpegang pada mandat, keanggotaan, dan ruang kebijakannya sendiri. Sebagai contoh, sistem PBB disusun dari berbagai lembaga perjanjian PBB dan agen-agen khusus, termasuk Bank Dunia dan IMF[3]. Hal ini juga melembagakan blok-blok anggota negara bagian, atau organisasi antar pemerintah, seperti Group 77 dan formasi regional; dan blok Negara non–PBB yang terlembaga, seperti G-8, G-20, dan OECD.

Usaha untuk mengatasi fragmentasi bantuan dan masalah dalam kerja sama pembangunan lainnya, telah dilakukan dalam rapat multilateral mengenai efektivitas bantuan (lihat sesi 1.1). Pada konteks post-Busan, arsitektur bantuan secara keseluruhan direpresentasikan oleh GPEDC. Ini adalah perangkat pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memajukan efektivitas usaha pembangunan oleh semua aktor, dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai rapat meminta pendapat, berbagi akuntabilitas, dan berbagi pembelajaran dan pengalaman, GPEDC berjuang untuk mempromosikan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional yang membentuk pondasi kerja sama pembangunan yang efektif: kepemilikan negara, berfokus pada hasil, kemitraan pembangunan yang inklusif, serta transparansi dan akuntabilitas bersama.

A. Pemain Utama dalam Sistem Bantuan

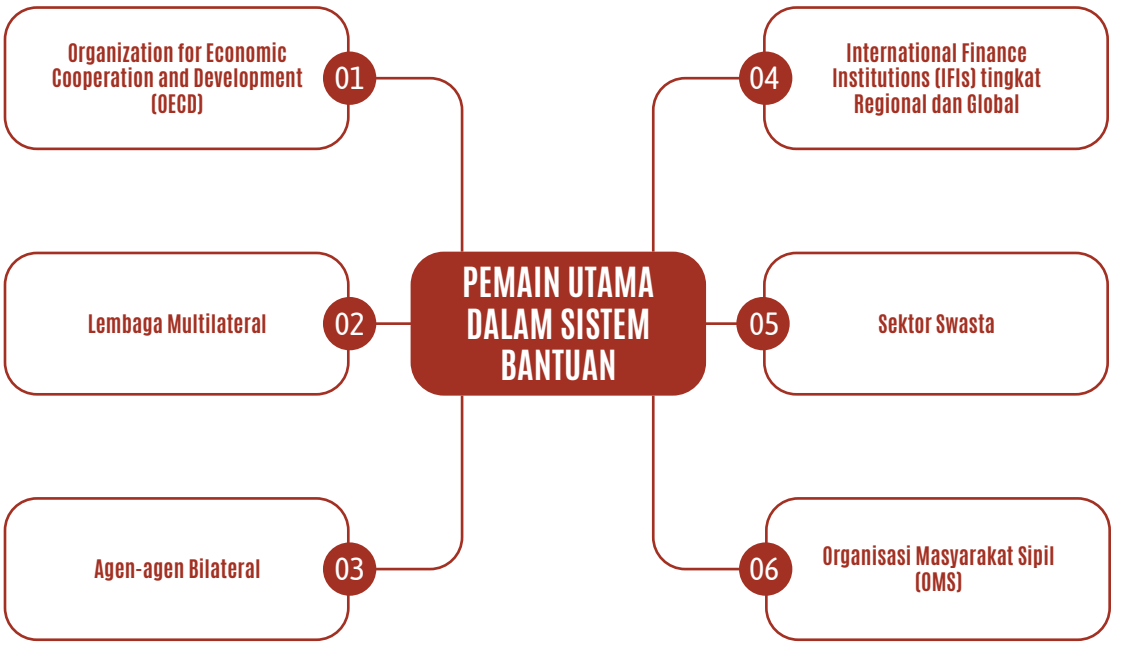

[3] IBON Primer on Aid and Development Effectiveness: At a Crossroads at Busan?. 2011. https://iboninternational.org/download/primer-on-aid-and-development-effectiveness-at-a-crossroads-at-busan/

01

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan – Komite Bantuan Pembangunan *(Organization for Economic Cooperation and Development – Development Assistance Committee / OECD–DAC)* adalah forum bagi negara donor yang mendiskusikan masalah bantuan dan efektivitas pembangunan. Baru-baru ini, DAC menetapkan 29 negara anggota OECD. Sebelumnya dikenal sebagai Development Assistance Group, DAC dibentuk oleh OECD Ministerial Resolution pada tanggal 23 Juli 1960. Ini adalah mandat (pada tahun 2018-2022) untuk mendukung implementasi agenda 2030 secara luas melalui kerja sama pembangunan.

Selain bekerja dengan negara anggota dalam memantau bantuan pembangunan, mengatur standar dalam kerja sama pembangunan, dan melaksanakan tinjauan sejawat, DAC juga melibatkan negara diluar keanggotaan yang menyediakan kerja sama pembangunan, negara berkembang, organisasi internasional, sektor swasta, filantrofi swasta, dan OMS untuk melaksanakan mandatnya.

Terkhusus dengan OMS, DAC mendokumentasikan dan menganalisis cara pemerintah berkerja dengan dan melalui OMS, memfasilitasi pembukaan DAC untuk pemantauan dari masyarakat sipil (terutama melalui DAC-CSO reference group), dan menentukan norma dan standar bagi dukungan donor terhadap OMS. Dialog DAC-CSO diadakan sekali atau dua kali dalam setahun yang menawarkan sebuah ruang bagi OMS untuk terlibat dan mempengaruhi DAC serta bagi DAC sendiri untuk memanfaatkan pengetahuan, kapabilitas, dan peran OMS sebagai advokat untuk melawan kemiskinan dan mempromosikan kesetaraan gender, inklusi dan pembangunan berkelanjutan.

02

Lembaga Multilateral didanai oleh beberapa pemerintah. Ada lebih dari 200 agen bantuan multilateral yang mencakup sistem agensi PBB dan Komisi Eropa.

a. **The United Nations Sustainable Development Group (sebelumnya UN Development Group)** mencakup dana, program, dan badan khusus dimana PBB menangani masalah kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan tertentu. Setiap entitas ini memiliki mandat program kerja, anggaran, serta mekanisme dan proses keterlibatan masyarakat sipil. Berikut di antaranya:

- UN Development Program
- UN Capital Development Fund (affiliated with UNDP)
- UN Children's Fund
- World Food Program
- UN Environment
- UN Women
- UN High Commissioner for Refugees
- UN Program on AIDS
- UN Population Fund
- UN Human Settlements Program
- World Health Organization
- Food and Agriculture Organization
- International Fund for Agricultural Development
- International Labor Organization

b. **Komisi Eropa (European Commission/EC)** menjadi salah satu penyedia bantuan terbesar. Dananya berasal dari 27 negara anggota Uni Eropa. Tujuan dan program bantuan EC sesuai dengan Konsensus Eropa terhadap Pembangunan (European Consensus on Development) yang diperbaharui secara periodik untuk menentukan visi bersama dan kerangka tindakan Uni Eropa untuk kerja sama pembangunan.

03

Agen-agen Bilateral bertanggung jawab kepada satu pemerintah dan kadang menjadi bagian dari kementerian pemerintah, seperti Kementerian Luar Negeri. Bantuan yang disediakan bisa terikat atau pun tidak, dan apa yang didanai biasanya bergantung dari prioritas penyedia bantuan. Jika sifat bantuan terikat, penerima harus menukarnya dengan barang dan pelayanan yang diminta oleh penyedia. Beberapa agen bantuan bilateral:

- Agence Française de Développement (AFD)
- Global Affairs Canada (GAC)
- Danish International Development Agency (Danida)
- Japan International Cooperation Agency (JICA)
- Netherlands Development Cooperation (NDC)
- Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad)
- Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
- Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
- United States Agency for International Development (USAID)
- Millennium Challenge Corporation (MCC)

04

Lembaga Keuangan Internasional (International Finance Institutions / IFIs) tingkat Regional dan Global memberikan bantuan pembangunan kepada negara berkembang. Porsi yang signifikan dari bantuan ini bersumber dari kontribusi, termasuk dari ODA, baik dari anggota maupun bukan anggota DAC.

a. **Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund / IMF) dan Bank Dunia (World Bank / WB)** adalah lembaga yang dibentuk di Bretton Woods, New Hampshire, AS pada Juli 1944 (lebih dikenal dengan "Lembaga Bretton Woods") untuk membangun kerangka kerja global untuk kerja sama ekonomi selama priode pemulihan pasca perang dunia II.

   Kedua lembaga tersebut bekerja saling melengkapi. WB bekerja untuk pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengurangan kemiskinan melalui dukungan teknis dan finansial, sementara IMF pada sektor kerja sama moneter internasional dan memberikan pertimbangan kebijakan dan pembangunan kapasitas.

   Dibandingkan dengan utang WB, IMF menyediakan utang jangka pendek dan menengah dan membantu negara merancang program kebijakan untuk memecahkan masalah mengenai keseimbangan pembayaran. Hal ini terjadi ketika pendanaan yang ada tidak mampu menebus pembayaran internasional.

   Kedua lembaga ini mendapat kritik hebat akibat menenggelamkan negara berkembang dalam utang serta memfasilitasi terjadinya privatisasi pelayanan publik, seperti masalah kesehatan, pendidikan, utilitas, dan transportasi sebagai persyaratan atas pinjaman non-lunak yang mereka berikan.

b. **Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank / ADB)** adalah bank pembangunan regional yang berdiri pada tahun 1966 yang membantu anggotanya melalui pemberian utang, bantuan teknis, hibah, dan investasi ekuitas untuk

mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. ADB memiliki 68 negara anggota termasuk AS dan sejumlah negara Eropa. Seperti halnya IMF-WB, ADB juga dikritik akibat proposal kebijakan mereka yang mendorong privatisasi pelayanan sosial dasar dan dampak negatif dari proyek infrastruktur seperti bendungan dan jalan yang telah merusak hak asasi komunitas yang terdampak dan akses terhadap sumber daya.

c. **Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank / AIIB)** adalah lembaga finansial baru yang berdiri pada tahun 2015 untuk mendukung pembangunan infrastruktur regional. Bank yang dipimpin oleh Cina ini telah memiliki 102 anggota dan seperti ADB, bank ini memiliki anggota non-Asia, tapi tidak mencakup AS dan Jepang. Bank ini salah satu tangan keuangan bagi proyek China, Belt and Road Initiative (BRI) yang bertujuan untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan negara Asia dan Eropa. Meskipun bank ini menjanjikan standar tertinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta investasi dalam proyek yang bersih, bank ini masih mendapat kritik terhadap praktik transparansi dan akuntabilitas begitupun proyeknya untuk bahan bakar fosil dan bendungan mega-hydro.

d. **Bank Pembangunan Baru (New Development Bank / NDB)** adalah bank pembangunan lainnya yang didirikan pada tahun 2014. Awalnya dikenal dengan nama BRICS Development Bank yang didirikan oleh lima kelompok ekonomi nasional yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. NDB bertujuan untuk memperkuat korporasi di antara Negara-negara BRICS dan untuk membantu usaha lembaga keuangan multilateral dan regional untuk pembangunan global melalui sokongan proyek swasta dan publik melalui utang, jaminan, partisipasi ekuitas, dan alat keuangan lainnya.

05

Peran **sektor swasta**, khususnya sektor bisnis, dalam pembangunan, telah dipromosikan. Dalam dokumen Kemitraan Busan dan Dokumen Hasil Nairobi, peran sektor swasta diakui dalam memajukan inovasi, menciptakan kekayaan, pendapatan, dan pekerjaan, serta memobilisasi sumber daya domestik yang berkontribusi dalam menekan kemiskinan melalui model pembangunan berbasis pertumbuhan. Akan tetapi, kontribusi dari bisnis dan korporasi kecil terhadap pembangunan belum diakui.

06

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) aadalah aktor pembangunan yang independen dengan hak mereka sendiri, mengikuti prinsip EDC yang disepakati pada FTT IV di Busan. OMS juga penting dalam 1) lingkup manajemen bantuan dimana OMS bertindak sebagai pengawas penting dan 2) di lingkup penyaluran bantuan dimana OMS memperkuat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan. Secara luas, OMS yang dimaksud adalah semua organisasi non-profit dan non-negara, OMS juga termasuk organisasi petani, organisasi masyarakat dan akar rumput, lembaga penelitian, dan organisasi buruh.

Beberapa Bentuk Bantuan Pembangunan yang Disediakan oleh Agen Bantuan

- **Hibah (Grants)** – transfer tunai, pelayanan dan barang tanpa membutuhkan pembayaran
- **Loans** – transfer yang membutuhkan pelunasan
  - Utang Konsesional (Concessional Loans) – memiliki suku bunga lebih rendah dibandingkan suku bunga yang berlaku dan/atau memiliki masa tenggang yang lama
  - Utang Non-konsesional (Non-concessional Loans) –tersedia dengan tingkat bunga sesuai pasar
- **Pendanaan Campuran (Blended Finance)** – penggunaan dana pembangunan untuk investasi swasta
- **Bantuan Teknis (Technical Assistance)** – bantuan non-finansial dalam bentuk sharing informasi dan keahlian, instruksi, skill training, penyaluran pengetahuan kerja, dan pelayanan konsultasi.

Beberapa Modalitas Perikatan Donor Dengan Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil

Sektor Swasta	Masyarakat Sipil
Lembaga Keuangan Internasional (IFI) bersama dengan ODA, utang, dan jaminan investasi dengan sumber daya swasta dari sektor korporasi dan keuangan. Termasuk International Finance Corporation (IFC) – World Bank (WB) dan Belgium Investment Company for Developing Countries (BIO).	**Hibah** pendanaan untuk a) proyek jangka pendek atau b) pendanaan utama untuk mendukung OMS
Bermitra dan mendukung pengembangan sektor swasta termasuk program langsung dan tidak langsung yang mendukung pengembangan sektor swasta dan Kemitraan Publik-Swasta (KPS). Sebagai contoh, Global Development Alliance oleh USAID, model bisnis berbasis pasar bagi program yang didukung oleh bantuan AS, seperti petani kecil. Belum ada penelitian menyeluruh tentang bagaimana model bisnis untuk pembangunan tersebut membantu para pemangku kepentingan yang miskin. Selain karena motifnya mencari profit, juga memperbesar peran sektor swasta dalam pembangunan telah dikritik sebagai pembuka jalan menuju privatisasi pembangunan itu sendiri.	**Dialog melalui mekanisme perikatan dengan masyarakat sipil** platform dan forum donor kadang memiliki mekanisme untuk melibatkan masyarakat sipil dalam kebijakan berdasarkan prioritas, standar, akuntabilitas pendanaan, dsb. (contoh WB, IMF, ADB, GPEDC, Task Team tentang CSO Development Effectiveness). Tiap platform memiliki modalitas partisipasi yang berbeda, termasuk level keterbukaan, transparansi, dan inklusivitas yang berbeda.

B. Penelusuran Aliran Bantuan

Apa itu Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) atau Bantuan (Aid)?

Official Development Assistance (ODA) atau lebih dikenal dengan "bantuan" ditetapkan oleh OECD-DAC sebagai bantuan pemerintah yang mendorong dan secara khusus menyasar pembangunan ekonomi dan mensejahterakan negara berkembang.

"Aliran" bantuan tersebut (1) disiapkan oleh agen resmi, termasuk negara dan pemerintah lokal, atau oleh agen eksekutif mereka; dan (2) konsesional (seperti hibah dan utang lunak) dan dikelola dengan promosi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara berkembang sebagai tujuan utama[4]. DAC memiliki daftar negara yang berhak mendapat ODA berdasarkan pendapatan per kapita dan diperbarui tiap 3 tahun.

Menurut DAC, bantuan militer dan promosi kepentingan keamanan donor, dan transaksi yang telah menjadi tujuan komersil utama (contoh kredit ekspor) tidak bisa dikategorikan sebagai ODA.

Jenis Aliran ODA

- **Bantuan Bilateral** – bantuan yang diberikan oleh pemerintah donor secara langsung kepada pemerintah negara berkembang yang biasanya disebut sebagai pemerintah / negara mitra atau penerima.
- **Bantuan Multilateral** – bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi multilateral seperti PBB dan lembaga keuangan internasional seperti IMF-WB dan ADB, yang secara bergantian terlibat dalam progam pembangunan pada negara berkembang yang menjadi target.

Catatan untuk Instruktur:

Cek data terbaru tentang level ODA di **https://stats.oecd.org/.**

Di tahun 2018, bantuan bilateral terdiri dari 71% ODA dari semua negara DAC, sementara bantuan multilateral adalah 29%. Diskusi tentang apakah negara-negara donor harus mengalokasikan lebih banyak ODA mereka ke saluran bilateral atau multilateral membandingkan saluran tentang kerentanan mereka terhadap politisasi, penargetan prioritas pembangunan dan koordinasi sumber daya untuk prioritas tersebut, fragmentasi, dan efisiensi. Meskipun terdapat bukti klaim seperti salah satu saluran lebih dipolitisasi dan lebih terfragmentasi daripada yang lain, masalah sebenarnya adalah apakah donor mematuhi kerja sama pembangunan yang efektif dalam memberikan bantuan ke saluran manapun.

Aliran ODA dari sumber bilateral dan multilateral bisa dalam bentuk:

- **Hibah (Grants)** – sumber keuangan diberikan untuk negara berkembang bebas bunga dan tanpa ketentuan pembayaran
- **Utang Lunak (Soft Loans)** – sumber keuangan yang diberikan harus dibayar dengan bunganya, walaupun dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan jika negara berkembang meminjam dari bank komersil; yang juga dikenal dengan istilah utang konsesi

[4] OECD. (2019, April). Official Development Assistance. Retrieved from https://www.oecd.org/dac/stats/What-is-ODA.pdf

Bagaimana cara merekam ODA?

DAC saat ini menggunakan **hibah setara** untuk merekam ODA. Sebelumnya, aliran ODA dilaporkan menggunakan **dasar aliran tunai** dimana hibah dan utang tidak dibedakan. **Net ODA** ditunjukkan ketika pembayaran dilakukan dan dipotong dari jumlah utang secara penuh. Metode ini digunakan oleh DAC hingga tahun 2018.

Hibah Setara, di sisi lain, hanya merekam unsur hibah dari ODA. Cara ini menghilangkan keharusan untuk merekam pembayaran utang dan untuk membedakan antara ODA bruto dan netto.

Catatan untuk Instruktur:

Cek video berikut untuk memahami bagaimana menghitung unsur hibah **https://www.youtube.com/watch?v=TjI8efef3LQ&t=6s**

Untuk utang, unsur hibah minimum diberikan berdasarkan pendapatan kelompok pada negara peminjam[5]:

- 45% untuk kelompok negara berpendapatan rendah (low-income countries) dan negara kurang berkembang (least-development countries)
- 15% untuk negara berpendapatan-menengah bawah (lower middle-income countries)
- 10% untuk negara berpendapatan-menengah atas (upper middle-income countries)

Akan tetapi, pertanyaan tentang aturan mengenai perhitungan unsur hibah dari utang dan instrumen sektor swasta masih ada, dan olehnya itu, masih dilaporkan berbasiskan aliran tunai (cash flow).

Sementara data yang menggunakan cash flow dan metode hibah setara tidak sebanding, DAC menerbitkan data untuk kedua metode tersebut.

TOSSD atau Total Official Support for Sustainable Development adalah ukuran yang dikembangkan (di tahun 2020) untuk mengukur bantuan pembangunan yang diberikan terhadap capaian SDG. Ini diharapkan untuk menyertakan sumber yang diberikan melalui South-South Cooperation (SSC), Triangular Cooperation (TrC), lembaga multilateral, serta donor baru dan tradisional.

[5] Garret, M., &Zühr, R. (2019, July). The OECD's new way of counting ODA loans - what's the impact? Retrieved from https://donortracker.org/sites/default/files/insight_pdfs/June2019_DT_Insights_GrantEquivalent_0.pdf

Bagaimana para donor memompa ODA mereka

Berikut beberapa cara pelaporannya:

- Pengaturan pelaporan OECD memungkinkan donor melaporkan seluruh stok pengurangan utang sebagai bantuan di tahun penghapusannya, sehingga meningkatkan nilai pengurangan utang karena tabungan keuangan yang riil ke negara penerima datang dalam bentuk layanan pengurangan utang. Metode hibah setara dari pelaporan juga memungkinkan resiko penghitungan ganda dan menggelembungkan ODA yang sebenarnya karena resiko awal sudah termasuk tingkat diskon yang digunakan untuk menentukan apa yang dilaporkan sebagai ODA.

- Bantuan Mengikat (Tied Aid) ditawarkan dengan syarat barang dan jasa diperoleh dari negara donor. Berdasarkan Least Developed Countries Report 2019 "modalitas ODA mendukung bantuan mengikat; rerata 15% dari total komitmen bilateral donor DAC antara tahun 2016 dan 2017. Donor tertentu melaporkan lebih dari 40% bantuan mereka bersifat mengikat, dan lebih dari 65% dari kontrak secara umum diberikan kepada perusahaan di negara donor, praktik bantuan yang mengikat 'secara informal' meluas."[6] Sementara itu, pendanaan campuran (blended finance) dan ODA yang didukung oleh sektor swasta memperkuat bunga komersil dari negara donor juga mungkin mengubah bantuan mengikat.

- Sebagai tambahan, donor juga diperbolehkan menghitung dukungan ODA untuk pengungsi untuk tahun pertama mereka di negara donor dan untuk menimbang nilai pendidikan untuk pelajar dari negara berkembang yang belajar di negara donor.

Saluran Bantuan berdasarkan Sektor Tematik

Ada sejumlah sektor tematik dimana para donor mengalokasikan ODA mereka. Ini termasuk kesehatan, keamanan pangan dan pertanian, gender, tata kelola lokal dan partisipasi sipil, perdamaian dan keamanan, perubahan iklim dan perlindungan lingkungan, perkembangan ekonomi, dsb. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jumlah yang dialokasikan oleh donor pada tiap tema ditentukan oleh penetapan prioritas dan tingkat nasional mereka, yang dapat dipengaruhi oleh kesepakatan internasional seperti implementasi Paris Agreement dan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Saat ini, OECD-DAC memiliki delapan sektor utama yang terbagi kedalam beberapa sub-sektor:

01 Infrastruktur Sosial dan Pelayanan

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Kebijakan / Program Populasi dan Kesehatan Reproduksi
d. Suplai Air & Sanitasi
e. Pemerintah & Masyarakat Sipil
f. Pemerintah & Masyarakat Sipil (umum)
g. Konflik, Perdamaian & Keamanan
h. Infrastruktur dan Pelayanan Sosial lainnya

02 Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan

a. Transport & Pergudangan
b. Komunikasi
c. Energi
d. Perbankan & Jasa Finansial
e. Bisnis & Jasa lainnya

03 Sektor Produksi

a. Pertanian, Kehutanan, Perikanan
b. Industri, Tambang, Konstruksi
c. Kebijakan & Regulasi Perdagangan
d. Sektor Pariwisata

04 Multi-Sektor/Saling-Terkait

[6] The Least Developed Countries Report 2019: The present and future of external development finance – old dependence, new challenges. Retrieved from https://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=538

Perlindungan Lingkungan Umum

Multisektor lainnya

05 **Commodity Aid/General Programme Assistance**

a. General Budget Support

b. Development Food Assistance

c. Other Commodity Assistance

06 **Action Relating to Debt (debt forgiveness, rescheduling, refinancing, etc.)**

07 **Humanitarian Aid**

a. Emergency Response

b. Reconstruction Relief & Rehabilitation

c. Disaster Prevention & Preparedness

08 **Unallocated/Unspecified**

Bantuan untuk Perdagangan

Aid for Trade (AfT) atau Bantuan Perdagangan telah menjadi slogan untuk bantuan yang digunakan untuk membina dan mempromosikan perdagangan dan liberalisasi.

Lebih dari 30 milyar USD dalam ODA atau 30% dari total ODA dialokasikan tiap tahun untuk AfT[7]. Dari tahun 2006 ke 2017, pencairan AfT mencapai 410 milyar USD, dimana 154.9 milyar USD dianggarkan ke Asia, sementara 146,2 milyar USD diarahkan ke Afrika. Sementara perdagangan mungkin diperlukan untuk menopang pertumbuhan industri dan dapat menghasilkan keuntungan bagi negara berkembang, liberalisasi perdagangan tidak menghasilkan pembangunan secara otomatis. Pada banyak kasus, program yang didanai dari bantuan pada liberalisasi perdagangan bahkan telah mengakibatkan negara-negara penerima terikat pada persyaratan baru di bawah aturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization / WTO).

ODA PER SEKTOR DI TAHUN 2018

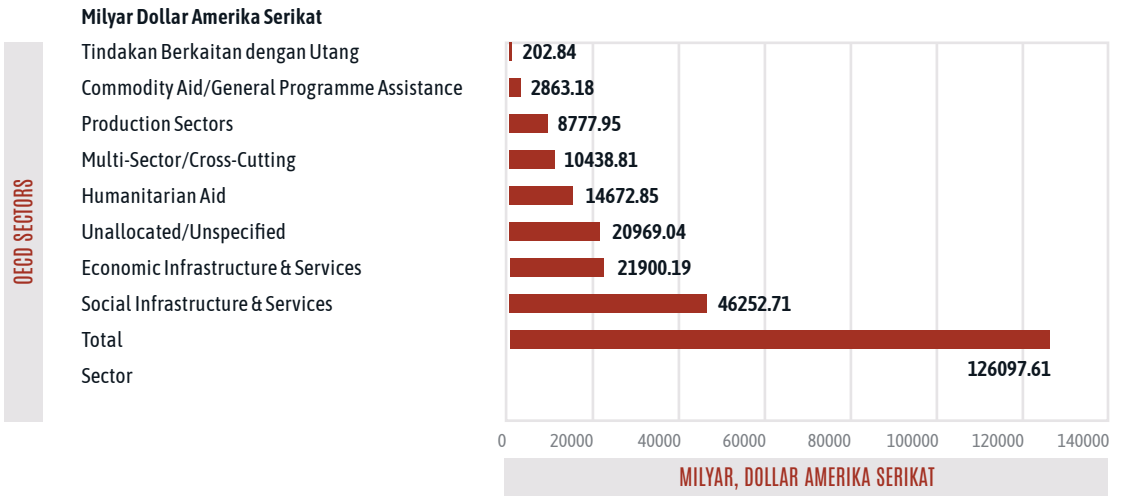

[7] UNIDO. (2019). Aid for Trade Global Review 2019: "Supporting Economic Diversification and Empowerment. https://www.unido.org/events/aid-trade-global-review-2019-supporting-economic-diversification-and-empowerment

[8] OECD & WTO. (2019). Aid for Trade at a Glance 2019 Economic Diversification and Empowerment. https://www.oecd-ilibrary.org/development/aid-for-trade-at-a-glance-2019_18ea27d8-en

C. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Kerja Sama Pembangunan Selatan-Selatan

Kerja Sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation / SSC) ditetapkan oleh PBB sebagai "kerangka kerja luas dari kolaborasi di antara negara-negara Selatan dalam sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan teknis". Ini diprakarsai, diorganisir, dan dipimpin oleh negara berkembang sendiri dimana pemerintah paling banyak memainkan peran utama tetapi juga harus melibatkan aktor pembangunan lain seperti OMS, individu, dan lembaga swasta dan publik.

Akar dari SSC bisa ditelusuri kembali ke perjuangan bersama Negara-negara bekas jajahan untuk kemerdekaan dan pembangunan sejati setelah Perang Dunia II di tahun 1950. Konferensi Bandung tahun 1955 mengumpulkan 29 negara dari Asia dan Afrika untuk mendorong kerja sama ekonomi dan budaya di antara negara dari 2 benua "atas dasar kepentingan bersama dan menghormati kedaulatan nasional". Ini adalah langkah yang penting sebagai perintis konferensi Selatan-Selatan yang membuka jalan untuk kebangkitan Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement / NAM) di tahun 1961 dan Group 77 di tahun 1950.

Sejak itu, Kerja Sama Selatan-Selatan telah dipraktikkan dalam sejumlah cara, dimulai dari integrasi ekonomi, formasi blok negosiasi dalam lembaga multilateral, aliansi militer, sampai pertukaran budaya. Kerja sama ini melibatkan bantuan kemanusiaan dan kerja sama teknis serta provisi keuangan konsesional untuk proyek pembangunan, program, sokongan dana, dan menguatkan keseimbangan pembayaran. Hubungan kerja sama berada pada level pemerintah dan agen-agennya dan antara perusahaan swasta atau OMS. Semua usaha ini menjadi kontribusi penting untuk memperkuat kondisi bagi pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara yang bekerjasama.

SSC memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan bantuan pembangunan Utara-Selatan yang berakar dari celah yang muncul dalam kekuatan ekonomi dan politik di antara negara Utara dan Selatan, yang disebabkan tidak hanya oleh perbedaan dalam proses dan kebijakan pembangunan domestik tetapi juga dikarenakan sejarah kolonialisme dan neo-kolonialisme global. ODA adalah transfer sumber daya untuk melengkapi kebutuhan pembangunan dan untuk mencapai HAM dan tujuan pembangunan. Ini adalah basis fundamental bagi ODA. Dalam konteks ini, SSC tidak bisa disamakan dengan ODA juga bukan merupakan pengganti dari komitmen pembangunan yang memudar dari negara-negara Utara.

Catatan untuk Instruktur:

Menyediakan contoh kerja OMS di area ini, seperti aliansi OMS Selatan pada Kerja Sama Selatan-Selatan dan kelompok kerja CPDE pada Kerja Sama Selatan-Selatan.

Ciri dan Prinsip Kerja Sama Selatan-Selatan

Selain perbedaan asal historis, ada prinsip dan ciri terbangun yang membedakan SSC dari ODA tradisional. Antara lain: solidaritas, horizontalitas, dorongan tuntutan, pembangunan kapasitas, pengetahuan selatan, dan adaptabilitas..

Solidaritas

Awal mula SSC bisa ditelusuri dari prinsip solidaritas di antara negara-negara Selatan. Hal ini muncul dalam konteks sejarah bersama dalam kolonialisme dan penindasan serta kekecewaan yang tumbuh dalam hubungan Utara-Selatan. Ketika ODA tradisional digunakan sebagai alat politik dan ekonomi, SSC berbeda karena didasarkan pada tujuan pembangunan bersama.

Horizontalitas

Kemitraan negara yang terjalin di SSC dicirikan sebagai horizontal dan menyimpang dari hubungan donor-klien tradisional. Ini artinya bahwa negara Selatan yang terlibat tidak berada dalam hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, melainkan melakukan negosiasi yang setara untuk sama-sama terlibat dalam kerja sama pembangunan.

Dorongan-Tuntutan

Pendekatan ini berbeda dari ODA tradisional dalam hal dimana negara penerima mencari bantuan pembangunan. Alih-alih bantuan yang berasal tawaran atau kebijakan luar negeri dan kepentingan donor, bantuan itu berasal dari tuntutan khusus negara Selatan yang ingin menerima bantuan pembangunan. Pendekatan ini memastikan kepemilikan yang diberikan akan diteruskan ke prioritas strategis yang ditetapkan oleh negara penerima.

Pengembangan Kapasitas

Ini adalah bagian signifikan dari SSC yang membedakannya dengan strategi pembangunan kapasitas ODA Utara-Selatan yang dipuja sebagai bentuk penemuan solusi yang baru dan efektif terhadap masalah pembangunan yang dihadapi belahan Selatan. Strategi ini memperkuat kemandirian mereka dengan cara meningkatkan atau mereformasi lembaga mereka dan melatih personal pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan khusus dan masyarakatnya.

Pengetahuan Selatan

Pertukaran dan transfer SSC mencirikan pengetahuan dan pengalaman Negara-negara Selatan global. Hal ini kontras dengan ODA tradisional yang menggunakan pengetahuan yang diambil dari pembangunan yang dilaksanakan dalam konteks Negara-negara Utara global. SSC mempromosikan pembelajaran bersama dan menyediakan pandangan baru yang disesuaikan dengan negara-negara yang belum terindustrialisasi dan masih sangat bergantung pada model produksi ekstraktif atau pertanian.

Adaptabilitas

Dikarenakan persamaan beberapa negara Selatan dalam hal ekonomi, demografi, dan sosial, kemitraan SSC memiliki derajat adaptabilitas yang tinggi. Kerja sama teknis atau berbagi pengetahuan antar negara-negara Selatan sering menghasilkan cara inovatif mengenai penanganan masalah pembangunan dengan sumber daya terbatas yang dapat dipraktikkan di negara lainnya (Mitra dalam Populasi dan Pembangunan).

Source: Primer on South-South Cooperation, IBON International (2015)

Tidak semua SSC mengarah kepada kerja sama pembangunan. South-South Development Cooperation (SSDC) adalah ungkapan solidaritas di antara masyarakat dan negara Selatan, dan negara yang berkontribusi pada kesejahteraan nasional tiap negara, kemandirian, dan kapasitas untuk mencapai tujuan pembangunan; kerja keras masyarakat dan negara Selatan secara umum, menghasilkan pengalaman dan simpati, berdasarkan tujuan bersama.[9] Ada rasa saling menghormati antar negara, dan mereka mengakui keuntungan spesifik dan komparatif dari tiap pemangku kepentingan berdasarkan kemampuannya untuk membuat agenda pembangunan.

Meski SSDC secara jelas dilandasi kebutuhan untuk solidaritas di antara negara Selatan yang berkembang dan kerja sama berdasarkan rasa saling menghormati, tampaknya masih ada keterbatasan dan kendala dalam melaksanakan inisiatif ini. Secara khusus, pemerintah dan peserta SSDC harus mengungkapkan komitmen yang kuat terhadap keadilan sosial, kesetaraan gender, keberlanjutan lingkungan dan hak asasi manusia, serta komitmen untuk terlibat secara aktif dan mengikat semua pemangku kepentingan dalam pembangunan.

D. Menelusuri SSDC

Saat ini, contoh-contoh SSDC mencakup kerja sama politik, ekonomi, dan teknis yang diprakarsai oleh kelompok negara berkembang seperti ASEAN, ALBA, BRICS, dan Kelompok 77 yang didirikan selama priode Konferensi PBB 1964 mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).

Sementara modalitas tradisional masih digunakan, SSC berkontribusi terhadap diversifikasi jenis kerja sama pembangunan yang memfasilitasi cara-cara inovatif dimana negara Selatan bisa bekerjasama untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama melalui keahlian dan pengetahuan mereka sendiri. Hal ini termasuk pengembangan kapasitas melalui transfer pengetahuan dan keterampilan non-moneter.

1. **Kerja Sama Teknis di antara Negara-negara Berkembang *(Technical Cooperation among Developing Countries / TCDC)*** dalam berbagai bidang seperti kesehatan umum dan pendidikan. TCDC mentransfer keterampilan dan pengetahuan bagi Negara-negara dengan sumber finansial yang terbatas. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas, konsultasi, diklat, program pertukaran, dan berbagi ilmu di berbagai sektor dan wilayah kepentingan. Beberapa TCDC yang terkenal yaitu:

   - **Brazilian Cooperation Agency (ABC)** – lembaga selatan yang paling aktif yang memfokuskan sumber daya mereka pada provisi bantuan teknis bagi pembangunan negara Selatan lainnya.
   - **Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC)** – menyediakan beasiswa untuk kursus, pelatihan, bantuan bencana, pelayanan ahli dari India, dan melaksanakan studi kelayakan atau pelayanan konsultasi untuk proyek atau kegiatan yang berhubungan dengan program.
   - **Kerja Sama Teknis Kuba dalam Bidang Kesehatan** – imencakup sejumlah kegiatan kerja sama. Metode yang paling umum adalah mengontrak tenaga medis profesional Kuba untuk bekerja di negara-negara yang menderita karena kurangnya penyaluran bantuan kesehatan.
   - **Grand National Programs (GNPs) Literacy and Post-Literacy and ALBA-Education pada tahun 2008** – bagian dari berbagai program yang ada di lembaga regional, ALBA. Melalui program ini, tiga anggota negara ALBA, yakni Nikaragua, Ekuador, dan Bolivia mendeklarasikan bebas buta huruf. Sementara itu, melalui ALBA-Education, sebuah resolusi telah disahkan untuk mendirikan Universitas Rakyat ALBA (University of the People of ALBA / UNIALBA), yang dibuat untuk mentransformasikan 29 universitas negeri menjadi jaringan universitas teritorial nasional dengan kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

[9] Reality of Aid Network & CSO Partnership for Development Effectiveness. (2019, November). A human rights-based approach to south-south development cooperation: Proposed framework. Retrieved from https://realityofaid.org/wp-content/uploads/2020/01/Towards-Measuring-South-South-Development-Cooperation-Nov2019-final-copy-for-web-upload.pdf

The Buenos Aires Plan of Action (BAPA) untuk Promosi dan Implementasi Kerja Sama Teknikal di antara Negara-Negara Berkembang

Di tahun 1978, perwakilan dari 138 negara mengadopsi Rencana Aksi untuk Promosi dan Implementasi Kerja Sama Teknikal di antara Negara-negara Berkembang (Technical Cooperation among Developing Countries / TCDC) dalam Konferensi PBB mengenai TCDC di Buenos Aires, Argentina. Dikenal sebagai Buenos Aires Plan of Action (BAPA), tindakan ini mengatur tujuan SSC pada TCDC. Antara lain:

- mendorong kemandirian negara berkembang dengan cara meningkatkan kapasitas kreatif mereka untuk menemukan solusi tehadap masalah pembangunan sesuai dengan aspirasi, nilai dan kebutuhan khusus mereka;
- mempromosikan dan menguatkan kemandirian kolektif di antara negara berkembang melalui pertukaran pengalaman; penggabungan, berbagi dan menggunakan sumber daya teknis dan sumber daya lain yang dimiliki; dan pengembangan kapasitas pendukung mereka;
- memperkuat kapasitas negara-negara berkembang untuk mengidentifikasi dan menganalisa secara bersama masalah pembangunan utama mereka dan merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mengatasinya;
- meningkatkan dan memperbaiki kualitas kerja sama pembangunan melalui penggabungan kapasitas untuk meningkatkan efektivitas sumber daya yang ditujukan untuk kerja sama;
- menciptakan dan memperkuat kapasitas teknologi yang ada di negara berkembang untuk meningkatkan efektivitas dengan kapasitas yang digunakan dan untuk meningkatkan kapasitas negara berkembang untuk menyerap dan mengadaptasi teknologi dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan khusus mereka;
- meningkatkan dan memperbaiki komunikasi di antara negara berkembang, menggiring kepada kesadaran yang lebih besar terhadap masalah umum dan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan dan pengalaman yang ada serta kreasi ilmu baru dalam menangani masalah pembangunan;
- mengakui dan merespon masalah dan kebutuhan dari Negara-negara belum berkembang, Negara-negara berkembang yang dikelilingi daratan, Negara-negara berkembang dan negara bagian pulau kecil yang paling terdampak, misalnya, terdampak bencana alam dan krisis lainnya; dan
- membantu Negara-negara berkembang untuk mencapai tingkat partisipasi yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi internasional dan untuk memperluas kerja sama internasional untuk pembangunan.

Sumber: Kantor PBB untuk Kerja Sama Selatan-Selatan

2. **Pembiayaan Pembangunan** melalui bank pembangunan BRICS yang termasuk Bank Exim Cina dan Bank Exim India. Seperti ODA tradisional, pembiayaan pembangunan di SSC juga sangat dipengaruhi oleh prioritas donor, seperti pertumbuhan Cina yang membutuhkan energi dan pasar baru untuk investasi mereka sendiri.
3. **Berbagi Pengetahuan** dipandang sebagai alat pembangunan yang penting bagi negara-negara Selatan. Usaha belajar bersama ini memberikan manfaat potensial bagi pemerintah dan OMS dalam memanfaatkan pengalaman pembangunan mereka sendiri dan menyesuaikannya dengan konteks sosial dan budaya mereka. Hal ini berangkat dari pandangan strategi lama “satu ukuran cocok untuk semua (one size fits all)” tentang

pembangunan yang memaksakan penggunaan strategi pembangunan yang diambil dari pengalaman negara-negara Utara, kadang sangat kontras dengan realitas Negara-negara selatan dimana pembiayaan, infrastruktur, dan teknologi terbatas. Sebagai contoh:

- **Rapat Tingkat Tinggi "Towards Country-Led Knowledge Hubs" tahun 2012 di Bali** –para pembuat kebijakan dari 46 negara mengungkapkan tujuan untuk melanjutkan pembangunan pusat-pusat pengetahuan. Rapat ini mencerminkan ketertarikan internasional yang sedang tumbuh mengenai berbagi pengetahuan (knowledge-sharing) sebagai alat pembangunan yang bisa melengkapi dan bahkan menjadi komponen penting dari permodalan pembangunan lainnya seperti kerja sama finansial dan teknikal dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

- **South Asia Regional Knowledge Platform** – platform Pengetahuan Regional Asia Selatan (South Asia Regional Knowledge Platform) dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mempromosikan sistem pengetahuan dan tindakan kolaboratif di Asia Selatan untuk memastikan akses masyarakat miskin bagi perumahan dan pekerjaan yang berkelanjutan. Wadah ini memfasilitasi dialog di antara aktor penting, mempromosikan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan di antara agen perumahan dan pekerjaan di daerah, dan menyediakan keahlian dan pengetahuan tentang penguatan kelembagaan, pembangunan kapasitas, teknologi dan pembiayaan untuk perumahan dan mata pencaharian yang berkelanjutan.

4. **Kerja sama Triangular (Triangular Cooperation).** Tidak ada definisi khusus yang disepakati tentang kerja sama segitiga (triangular) tetapi secara umum melibatkan dua atau lebih mitra negara berkembang yang berkolaborasi dengan negara maju atau organisasi internasional dalam mentransfer sumber daya dan keahlian. Kantor PBB untuk Kerja sama Selatan-Selatan (UN Office for South-South Cooperation) sebenarnya menetapkannya sebagai "kolaborasi yang mana Negara-negara donor tradisional dan organisasi multilateral memfasilitasi inisiatif Selatan-Selatan melalui dukungan pendanaan, pelatihan, sistem manajemen dan teknologi serta bentuk dukungan lainnya". Contohnya:

- Kemitraan untuk Keselamatan Ibu di Republik Demokratik Rakyat (RDR) Laos dan Butan dengan Thailand dan UN Polutaion Fund

- Memperkuat kerja sama perikanan di Timor Leste dengan Malaysia dan Kementrian Federal Jerman untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

- Pelatihan pertanian untuk negara Greater Mekong Subregion (GMS) dengan Thailand dan Selandia Baru

- Mendanai Future India Triangular Training (FTF ITT), program kolaboratif AS dan India, bertujuan untuk membangun kapasital publik dan fungsionaris swasta dalam bidang pertanian dan aliansi sektoral dari 17 mitra negara Asia dan Afrika

Mengukur SSDC

Pada tulisan ini, tidak ada kerangka kerja dan metode yang disepakati utuk mengukur aliran SSDC. Metode yang digunakan untuk mengukur ODA tidak bisa digunakan pada SSDC karena perbedaannya. Sebagai contoh, monetisasi kontribusi seperti yang dilakukan dengan barang atau melalui kerja sama teknis dapat menghasilkan angka yang lebih rendah (dibandingkan dengan ODA Utara-Selatan) karena biaya barang dan jasa di negara berkembang umumnya jauh lebih rendah. Dalam hal kerja sama teknis, ahli yang dipekerjakan dalam kerja sama teknikal Selatan-Selatan terkadang Pegawai Negeri Sipil yang sulit untuk menyamakan nilai keuangan kerja mereka dengan konsultan swasta khususnya pada tingkat internasional. Lebih jauh, pihak yang menentang monetisasi mengatakan bahwa hal ini bisa menggiring ke sikap meremehkan kontribusi dan tidak mencerminkan spirit solidaritas di antara negara-negara tersebut.[10]

[10] Di Ciommo, M. (2017). Approaches to measuring and monitoring South–South cooperation. Retrieved from http://devinit.org/wp-content/uploads/2017/02/Approaches-to-measuring-and-monitoring-South%E2%80%93South-cooperation.pdf

Tantangan lainya yang dihadapi dalam memantau dan mengukur SSDC adalah kurangnya mekanisme akuntabilitas inklusif dalam memantau proses, dan kurangnya rapat atau lembaga umum yang bermandat untuk memfasilitasi diskusi kebijakan, petunjuk, dan kesepakatan di antara negara-negara SSDC yang sama dengan OECD DAC pada kerja sama Utara-Selatan.

Namun, usaha untuk memantau SSDC dibuat oleh pemerintah Selatan dan lembaga antar pemerintah serta OMS.

Menurut Reality of Aid, kerangka kerja yang dibutuhkan untuk memantau SSDC harus mengikuti pendekatan berbasis HAM (Human Rights Based Approach / HRBA). Artinya bahwa mengukur SSDC harus memperhitungkan bagaimana SSDC "membawa perbaikan pada kehidupan masyarakat serta perubahan dalam kepemilikan, akuntabilitas dan keberlanjutan dalam kerja sama ... (dan) mengatasi masalah akses masyarakat terhadap sumber daya dan pelayanan dasar, seperti pendidikan, keadilan, kesehatan, dan air."

Pendekatan HRBA juga berarti "mereview standar minimum yang digunakan untuk membentuk analisis, mengidentifikasi tujuan dan prioritas pembangunan, mengimplementasikan strategi serta memantau dampaknya. Pada dasarnya, hasil akhir harus memberdayakan dan melindungi hak-hak kaum yang termarginalkan, perempuan, pemuda, kelompok masyarakat adat dan penyandang disabilitas."

Praktik aktual dalam mengukur SSDC dilakukan di tingkat negara oleh penyedia seperti Brazil, Cina, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab yang menerbitkan laporan mengenai kegiatan kerja sama pembangunan mereka. Pemantauan tingkat regional juga dilakukan oleh organisasi Amerika Latin seperti Ibero - American General Secretariat (SEGIB).

Laporan berisi informasi kualitatif dan kuantitatif pada inisiatif kerja sama pembangunan yang diperluas oleh negara-negara, termasuk informasi keuangan yang diperlukan.

Dalam konteks laporan SEGIB di tahun 2017[11] contohnya, yang dilaporkan bukan hanya biaya proyek dan distribusinya berdasarkan tema sektoral, tapi juga informasi lainnya yang bertujuan untuk mencerminkan dampak SSDC serta "solidaritas" antar negara. Ini termasuk distribusi proyek oleh Negara penerima dan Negara penyedia (negara selatan bisa dianggap penerima sekaligus penyedia), kontribusi terhadap SDG, dan juga usaha untuk mengukur persentase dan biaya finansial dari pembagian beban antara penerima dan penyedia.

[11] Report on South-South Cooperation in Ibero-America 2017. Retrieved from https://www.segib.org/wpcontent/uploads/informe_INGLES_2017-web.pdf

Kerangka Kerja untuk Mengukur SSDC

Reality of Aid mengusulkan bahwa tiap upaya untuk mengukur SSDC harus didasarkan pada kerangka kerja yang menegakkan prinsip-prinsip pendekatan HAM. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

Kepemilikan Demokratis

- Sejauh mana ada keselarasan dengan prioritas dan strategi negara yang ditentukan secara demokratis temasuk prioritas SDG.
- Sejauh mana prosedur politik dan administratif mengikuti aturan yang jelas dan dikenal secara umum, keputusan yang dibuat oleh agen pemerintah bisa dimengerti, dan informasi mengenai masalah publik tersedia dan bisa diakses dan diperdebatkan.
- Sejauh mana ada pemahaman yang baik dan ketersediaan kondisi yang diperlukan, lingkungan, dan ruang kepentingan untuk partisipasi yang bermakna dan terbuka luas bagi para pemangku kepentingan dalam proses yang relevan pada level mikro, menengah dan makro dengan rumusan kebijakan, proyek, dan desain program, implementasi, dan evaluasi.
    - Sejauh mana proyek dan program pembangunan menjangkau dan bekerja dengan beragam organisasi mitra lokal, termasuk advokasi OMS, organisasi berbasis komunitas, parlemen lokal atau nasional, serikat buruh, lembaga HAM, Ombudsman, dan media.
- Sejauh mana penyedia mendukung struktur, lembaga, kebijakan, dan kerangka kerja legal yang secara berkelanjutan memperlebar ruang untuk partisipasi yang lebih luas dan bermakna dan keterkaitannya dengan kepemilikan demokratis dalam negara mitra;
- Sejauh mana proyek atau program menyatukan pengembangan skill individu dan kelompok (capacity building) sehingga dapat berkontribusi terhadap proses pembangunan dan peningkatan lebih lanjut dalam pemenuhan haknya.

Aksesibilitas

- Adanya mekanisme pengaduan dan ganti rugi warga yang dapat diakses (misalnya, komite pengawas kesehatan, ombudsman, lembaga HAM nasional), dan memperkenalkan langkah-langkah untuk meningkatkan independensi dan aksesibilitas;
- Ketersediaan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif dan partisipatif, yang memudahkan pemantauan progres secara sistematik yang mengarah pada pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- Sejauh mana proses akuntabilitas inklusif dan partisipatif, dan termasuk pemantauan, evaluasi, mekanisme akuntabilitas serta pemulihan;
- Sejauh mana para pemangku kepentingan lainnya memiliki kapasitas organisasional untuk memobilisasi, mengumpulkan informasi dan melakukan kampanye advokasi, dan juga menerapkan prinsip HRBA dalam prosedur dan manajemen internal;
- Adanya kelompok dengan kemampuan (skill) dan sumber daya untuk memantau pemenuhan dan pelanggaran HAM, termasuk memantau bantuan, utang, proyek, dan program;
- Adanya mitra kerja sama yang memungkinkan individu dan grup untuk mengklaim hak mereka, di pengadilan, media, internet, dengar pendapat publik, audit sosial, dan sebagainya;
- Sejauh mana transparansi data dan ketersediaan informasi untuk semua pemangku kepentingan dan pihak lainnya yang berkepentingan.

Keberlanjutan

- Sejauh mana adanya struktur dukungan, lembaga, kebijakan dan kerangka kerja legal yang memberikan ruang lebar yang berkelanjutan untuk pratisipasi bermakna dan lebih luas dan kepemilikan demokratis dalam sebuah inisiatif;
- Sejauh mana proyek atau insiatif mengembangkan kapasitas teknologi untuk menerjemahkan HAM menjadi kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan alokasi dana yang tepat, dan berdasarkan hak legal yang konkret terhadap pelayanan dasar.

Sementara itu, Marcio Correo dari Brazilian Cooperation Agency mengusulkan kerangka kerja berikut[12] dalam pengukuran teknikal SSDC untuk mengatasi masalah metodologi timbul akibat kurangnya metode yang tersedia untuk mengukur ODA:

- penilaian input kompatibel dengan monetisasi;
- mengukur volume semua jenis sumber daya sejenis yang dimobilisasi oleh negara mitra Selatan-Selatan, terlepas dari posisi mereka sebagai penyedia atau penerima, dan untuk itu monetisasi bukan indikator yang terbaik;
- penilaian koneksi antara input dan output finansial dan non-finansial; dan
- evaluasi hasil yang berasal dari inisiatif tersebut dan untuk para penerima manfaat.

[12] Correa, M. (2017). Quantification of South-South cooperation and its implications to the foreign policy of developing countries. Retrieved from https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/07/PB41_Quantification-of-South-South-cooperation-and-its-implications-to-the-foreign-policy-of-developing-countries_EN.pdf

Sesi 1.3.
Prinsip-Prinsip Efektivitas Pembangunan

Manfaat Pembelajaran	Setelah sesi ini, para peserta diharapkan mampu: 1. Mendiskusikan prinsip-prinsip efektivitas pembangunan dan bagaimana hubungannya dengan pekerjaan mereka. 2. Menggali pemikiran tentang elemen kerangka kerja evaluasi untuk efektivitas pembangunan..
Bahan-bahan	• Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts • Proyektor LCD • Spidol
Proses	1. Menjelaskan tentang hasil pembelajaran sesi ini. 2. Mereview hasil diskusi "apa capaian penting dari OMS" dan menghubungkannya dengan diskusi yang berlangsung. 3. Mendiskusikan prinsip efektivitas pembangunan. 4. Menstimulasi diskusi terbuka menggunakan pertanyaan diskusi yang diajukan.

I. KERANGKA KERJA PENILAIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN

Seperti yang telah disebutkan pada sesi 1, FTT ke-4 mengenai efektivitas bantuan di Busan menghasilkan Busan Partnership document (BPd) yang dirancang oleh lebih dari 160 negara dan lebih dari 50 organisasi. BPd berisi empat prinsip kerja sama pembangunan yang efektif. Antara lain:

- **Kepemilikan prioritas pembangunan oleh negara berkembang.** Kemitraan untuk pembangunan hanya bisa sukses jika dipimpin oleh negara berkembang, mengimplementasikan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi khusus Negara tersebut.

- **Fokus pada hasil.** Investasi dan upaya harus memiliki dampak panjang terhadap pemberantasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kapasitas negara berkembang, selaras dengan prioritas dan kebijakan yang diatur oleh negara berkembang itu sendiri.

- **Kemitraan pembangunan inklusif.** Keterbukaan, kepercayaan, serta respek dan pembelajaran bersama ditempatkan sebagai inti dari efektivitas kemitraan dalam mendukung tujuan pembangunan, mengakui peran berbeda dan saling melengkapi dari semua aktor.
- **Akuntabilitas bersama dan akuntabilitas terhadap penerima manfaat kerja sama,** juga kepada masyarakat, organisasi, konstituen dan pemegang saham, merupakan perihal yang sangat penting dalam mencapai hasil. Praktik yang transparan menjadi dasar untuk meningkatkan akuntabilitas.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut disepakati oleh para pemangku kepentingan selama FTT, OMS yang dilibatkan dalam prosesnya masih menemukan kekurangan dari Kesepakatan Kemitraan Busan ini saat komitmen terhadap prinsip-prinsip ini sepenuhnya bersifat sukarela. Ini bisa menjadi problematik ketika menuntut akuntabilitas yang juga menjadi salah satu prinsip yang disepakati.

Selain itu, OMS menuntut bahwa partisipasi demokratis masyarakat harus menjadi inti dari prinsip-prinsip ini untuk memastikan efektivitas pembangunan yang sejatinya berdasarkan HAM.

GPEDC mengembangkan kerangka kerja pemantauan yang berisi seperangkat indikator untuk melacak komitmen internasional untuk meningkatkan kepemilikan Negara atas upaya pembangunan, berfokus pada hasil, inklusivitas kemitraan pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas (perhatikan tabel di bawah ini). Kerangka kerja pemantauan ini juga menyediakan informasi untuk digunakan dalam menelusuri progres dalam target SDG 17.15, 17.16, dan 5c[13].

[13] SDG 17.15: Respect each country's policy space and leadership to establish and implement policies for poverty eradication and sustainable development; SDG 17.16: Enhance the global partnership for sustainable development, complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technology and financial resources, to support the achievement of the sustainable development goals in all countries, in particular developing countries; and SDG 5c: Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels

PRINSIP		INDIKATOR
Berfokus pada Hasil	1b	**Negara-negara memperkuat kerangka kerja hasil nasional mereka** Mengukur apakah negara-negara membuat kerangka kerja nasional mereka yang menentukan tujuan dan prioritas pembangunan mereka sendiri dan menempatkan mekanisme untuk memastikan bahwa hasilnya dapat dipantau dan dicapai.
	1a	**Mitra pembangunan menggunakan kerangka kerja hasil yang dipimpin oleh negara (SDG 17.15)** Mengukur keselarasan program mitra pembangunan dengan prioritas dan hasil yang ditentukan oleh negara, dan ketergantungan progresif pada statistik sendiri dan sistem pemantauan dan evaluasi untuk melacak hasil. Indikatornya adalah sumber laporan untuk target 17.15 SDG.
Kepemilikan Negara	5a & 5b	**Kerja sama pembangunan bisa diprediksi (jangka tahunan dan menengah)** Mengukur kelayakan mitra pembangunan dalam menyalurkan dana pembangunan dan akurasi perkiraan serta pencairan dana tersebut.
	9a	**Kualitas Negara dalam Sistem Manajemen Keuangan Publik (Public Financial Management / PFM)** Menguji perbaikan dalam aspek utama sistem PFM negara dengan menggunakan dimensi tetentu dari Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA).
	9b	**Mitra Pembangunan Menggunakan Sistem Negara** Mengukur proporsi kerja sama pembangunan untuk sektor publik menggunakan sistem negera sendiri tentang manajemen finansial publik dan pembelian.

	10	**Bantuan tidak mengikat** Mengukur persentase kerja sama pembangunan bilateral yang disediakan oleh anggota OECD-DAC yang tidak mengikat penuh.
Kemitraan Inklusif	2	**OMS beroperasi dalam lingkungan yang memaksimalkan keterlibatan mereka dan berkontribusi untuk pembangunan** Mengukur sejauh mana pemerintah dan mitra pembangunan berkontribusi terhadap lingkungan yang mendukung OMS; serta sejauh mana OMS mengimplementasikan prinsip efektivitas pembangunan dalam kerja mereka sendiri.
	3	**Kualitas Dialog Publik-Swasta** Mengukur kualitas dialog publik-swasta melalui proses multi-pihak yang berorientasi pada konsensus, dengan fokus mengidentifikasi apa saja syarat dasar dari dialog yang dilaksanakan di negara tersebut.
Transparansi dan Akuntabilitas Bersama	4	**Informasi tentang Kerja Sama Pembangunan Tersedia untuk Publik** Menguji sejauh mana mitra pembangunan membuat informasi mengenai kerja sama pembangunan yang dapat diakses dengan mudah, dan sejalan dengan persyaratan transparansi Busan.
	6	**Kerja sama pembangunan masuk dalam anggaran yang mendapat pengawasan parlemen** Mengukur pembagian dana kerja sama pembangunan bagi sektor publik yang termaktub dalam pendanaan tahunan yang disetujui oleh badan legislatif nasional negara mitra.
	7	**Akuntabilitas bersama di antara aktor pembangunan diperkuat melalui tinjauan inklusif** Mengukur apakah review penilaian bersama dari komitmen kerja sama pembangunan dilaksanakan di tingkat Negara. Indikator ini menguji apakah ada: (i) kerangka kerja kebijakan yang menetapkan prioritas negara, (ii) target untuk negara dan mitra pembangunannya; (iii) penilaian bersama secara regular terhadap target tersebut; (iv) pelibatan pemerintah setempat dan stakeholder non-negara dalam penilaian terpadu; (v) ketersediaan informasi hasil untuk publik.
	8	**Negara memiliki sistem yang transparan untuk melacak alokasi publik untuk kesetaaraan gender dan pemberdayaan perempuan (SDG 5c)** Mengukur apakah negara-negara memiliki sistem yang diterapkan untuk melacak alokasi pemerintah untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta membuat informasi mengenai hal tersebut tersedia untuk publik. Indikator ini adalah sumber untuk pelaporan target SDG 5c.

Penyedia bantuan pembangunan yang berbeda juga mengembangkan kerangka kerja penilaian mereka sendiri yang digunakan untuk mengukur efektivitas pembangunan. Sebagai contoh, ADB merilis laporan efektivitas pembangunan sendiri sejak tahun 2008. Untuk 2009, kerangka kerja penilaian efektivitas pembangunan ADB berdasarkan kerangka kerja Hasil Kerja sama 2019-2024, yang berisi 60 indikator yang diatur ke dalam empat tingkat kinerja:

- Level 1: Progres pembangunan di Asia dan Pasifik
- Level 2: Hasil prioritas operasional strategi 2030 dan kualitas operasi tuntas
- Level 3: Manajemen operasional ADB
- Level 4: Efektivitas organisasional ADB

Meskipun salah satu indikator mengukur partisipasi masyarakat sipil dalam inisiatif ADB, indikator ini tidak cukup untuk mengukur apakah partisipasi tersebut sudah demokratis dengan banyaknya OMS dan komunitas yang terus memprotes pelanggaran HAM dari proyek ADB serta kurangnya akuntabilitas lembaga tersebut terhadap kasus pelanggaran tersebut.

[14] Poverty and inequality; gender equality; climate change, disaster resilience and environmental sustainability; livable cities; rural development and food security; governance and institutional capacity; regional cooperation and integration;

Pada tahun 2019, Reality of Aid merilis laporan penilaian terhadap efektivitas pembangunan ADB menggunakan prinsip EDC bahwa Bank berkomitmen terhadap BPd.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa operasional ADB dari Strategi 2030 mendorong kebijakan ekonomi yang berkontribusi terhadap ekslusi masyarakat miskin dari pembangunan dan pengrusakan lingkungan lebih lanjut, mendorong penggunaan sistem negara yang gagal mengatasi utang dan mengambil keuntungan dari pengawasan nasional yang lemah untuk mempercepat proyek dan mengurangi resiko untuk sektor swasta, dan memfasilitasi kepemilikan korporasi di Asia.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa ADB tetap tidak bertanggungjawab karena kurangnya keselarasan dari aturan akuntabilitas dan mekanisme terhadap SDG dan HAM, dan juga karena kekebalan yang diberikan kepara Bank melalui piagamnya, serta melalui konvensi PBB tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Badan Khusus dan Konvensi Wina untuk organisasi internasional.

Sementara itu, Jaringan Evaluasi Pembangunan OECD-DAC menggunakan kriteria berikut untuk efektivitas pembangunan:

1. Pencapaian Tujuan Pembangunan dan Hasil Yang Diharapkan

1.1. Program dan proyek mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan serta memperoleh hasil yang diharapkan.
1.2. Program dan proyek menghasilkan manfaat positif bagi kelompok sasaran.
1.3. Program dan proyek memberikan hal yang berbeda bagi sejumlah penerima manfaat dan berkontribusi pada tujuan pembangunan nasional.
1.4. Program berkontribusi terhadap perubahan yang signifikan dalam kebijakan dan program pembangunan nasional (termasuk kesiapan menghadapi bencana, respon darurat dan rehabilitasi), dampak kebijakan, dan/atau reformasi sistem yang dibutuhkan.

2. Tema yang Saling-Silang (Cross-Cutting) dalam Pembangunan Inklusif yang Berkelanjutan

2.1. Sejauh mana organisasi multilateral mendukung kegiatan yang efektif mengatasi isu yang saling-silang mengenai kesetaraan gender.
2.2. Sejauh mana perubahan tersebut berkelanjutan secara lingkungan.

3. Keberlanjutan Hasil / Manfaat

3.1. Manfaat berlanjut atau dapat berlanjut setelah penyelesaian proyek atau program atau ada ukuran-ukuran untuk menghubungkan operasi bantuan kemanusiaan, untuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan, akhirnya, hasil pembangunan dalam jangka yang lebih panjang.
3.2. Proyek dan program dilaporkan secara berkelanjutan dari segi kelembagaan dan/atau kapasitas komunitas.
3.3. Program berkontribusi untuk menguatkan lingkungan yang mendukung untuk pembangunan.

4. Relevansi Intervensi

4.1. Program dan proyek disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau prioritas kelompok sasaran.
4.2. Proyek dan program selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
4.3. Kemitraan yang efektif dengan pemerintah, pembangunan bilateral dan multilateral dan organisasi kemanusiaan serta NGO untuk perencanaan, koordinasi dan implementasi dukungan terhadap pembangunan dan/atau kesiapan darurat, bantuan kemanusiaan dan upaya rehabilitasi.

5. Efisiensi

5.1. Aktivitas program dievaluasi hemat biaya/ sumber daya.
5.2. Implementasi dan tujuan dicapai dengan tepat waktu (sesuai konteks, dalam hal pemrograman kemanusiaan).
5.3. Sistem dan prosedur untuk proyek / implementasi program dan tindak lanjutnya bersifat efisien (termasuk sistem untuk melibatkan staf, pengadaan input proyek, pencairan pembayaran, pengaturan logistik, dan sebagainya).

6. Melakukan Evaluasi dan Pemantauan untuk Meningkatkan Efektivitas Pembangunan

6.1. Sistem dan proses untuk evaluasi yang efektif
6.2. Sistem dan proses pemantauan dan pelaporan hasil program efektif.
6.3. Sistem manajemen berbasis hasil (RBM) efektif.
6.4. Evaluasi digunakan untuk memperbaiki efektivitas pembangunan

Pertanyaan Diskusi

Menurut pendapat anda elemen apa yang harus menjadi kerangka penilaian untuk memantau proyek kerja sama pembangunan?

Sesi 1.4.

Menuju Kerangka Kerja Demokratis untuk Kerja Sama Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Pembangunan Berkelanjutan

Manfaat Pembelajaran

Pada akhir sesi, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar untuk mentransformasi sistem global dari kerja sama pembangunan.

Bahan-bahan

- Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts
- Proyektor LCD
- Spidol

Proses

1. Menjelaskan hasil pembelajaran sesi ini
2. Mendiskusikan kerangka kerja HRBA untuk kerja sama pembangunan
3. Menstimulasi diskusi menggunakan pertanyaan.

I. Operasionalisasi Kerangka Kerja Demokratis Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Kerja Sama Pembangunan

Hampir satu dekade sejak peluncuran Kesepakatan Kemitraan Busan, masih banyak yang harus dilakukan untuk mentransformasi sistem kerja sama pembangunan global agar menjadi inklusif, demokratis, berbasis HAM, dan adil. Ketika kerja sama pembangunan menjadi krusial dalam capaian pembangunan yang berkelanjutan, kemitraan pembangunan seharusnya tidak lagi memperkuat hubungan dan praktik yang tidak adil. Bahkan, arsitektur kerja sama pembangunan harus didasarkan pada solidaritas dan mutualitas, kedaulatan rakyat, inklusivitas dan demokrasi, serta akuntabilitas dari pengemban tugas.

Masalah bantuan yang mengikat dan persyaratannya harus dipecahkan untuk menyeimbangkan hubungan bantuan agar lebih berpihak kepada negara berkembang daripada donor. Sistem global kerja sama pembangunan yang baru harus didasarkan pada strategi pembangunan nasional dan memastikan alokasi berbasis kebutuhan (bukannya didorong oleh donor) serta keselarasan aliran bantuan. Meskipun kepemilikan Negara telah disetujui dalam prinsip BPd, prinsip kepemilikan demokratis harus menjadi intinya. Ini berarti bahwa prioritas negara, seperti yang diungkapkan dalam rencana pembangunan nasional, harus dibentuk oleh

ARSITEKTUR KERJA SAMA PEMBANGUNAN BARU

Solidaritas dan Mutualitas

Mencakup pekerjaan untuk tujuan dan kepentingan bersama sebagai tandingan terhadap kerja sama yang dipimpin oleh donor. Solidaritas juga diasosiasikan dengan komitmen untuk menanggung biaya dalam proses membantu mitra yang membutuhkan.

Kedaulatan Rakyat

Masyarakat dalam tiap bangsa adalah sumber kedaulatan, sebagai sumber bagi pemerintah nasional memperoleh dan mengesahkan otoritas mereka terus menerus. Pemerintah berhak atas hak berdaulat sebagai perwakilan sah masyarakat hanya ketika mereka memenuhi kewajiban terhadap rakyat, termasuk kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat, baik hak individu maupun kolektif, dan yang lainnya.

Inklusivitas dan Demokratisasi Pembuatan Kebijakan

Kesetaraan antar bangsa dan masyarakat diakui oleh mitra pembangunan. Partisipasi demokratis masyarakat dalam proses pembangunan di semua tingkat ditegakkan dan dilindungi.

Tanggung Jawab Pengemban Tugas

Mekanisme untuk akuntabilitas yang tepat dari pengemban tugas harus sesuai tempatnya untuk menjamin kewajiban pengemban tugas dan memberikan kesempatan bagi pemegang hak untuk berbicara dan mendapatkan ganti rugi.

proses demokratis dan inklusif dimana keanggotaan dan partisipasi organisasi rakyat dan OMS setara, bersama dengan semua pemerintah di berbagai tingkatan.

Partisipasi demokratis dari semua aktor pembangunan harus dipastikan tidak hanya di tingkat negara, tapi juga di arsitektur global baru yang harus menjadi multi pihak dan multilateral, yang akan memberikan kesempatan negara berkembang untuk menjalankan pengaruh mayoritas mereka. Ini akan menghentikan sistem yang terkini dimana lembaga mulitilateral seperti Bank Dunia atau bank pembangunan regional yang didominasi oleh donor disebabkan oleh prinsip one dollar-one vote. Sistem baru ini, selain mencakup lingkup global, juga perlu untuk melibatkan tingkat lokal dan regional. Inisiatif bilateral dan regional dapat memainkan peran penting, dalam mengejar fokus bersama, untuk manfaat bersama dan untuk melengkapi serta memperkuat tujuan dan upaya multilateral global.

Mekanisme akuntabilitas yang mengikat (binding) harus diperkuat untuk memastikan bahwa donor dapat bertanggungjawab terhadap negara mitra mereka dan pemerintah penerima bertanggungjawab ke masyarakat terkait kebijakan dan program pembangunan yang mereka laksanakan. Tata kelola global baru dari arsitektur bantuan juga harus menjamin kewajiban mitra eksternal, termasuk lembaga multilateral, dan harus memiliki mekanisme yang memungkinkan komunitas mendapatkan ganti rugi dari kegiatan dimana program atau proyek yang mendapat pendanaan eksternal yang merugikan mereka.

Akhirnya, demokratisasi arsitektur bantuan internasional harus bergandengan tangan dengan demokratisasi tata kelola global dari sektor keuangan, utang, perdagangan, dan korporasi transnasional. Harus ada koherensi politik dalam tata kelola global dari lembaga ini yang harus mendukung tujuan pembangunan yang diatur pada tingkat internasional, dengan tetap menghormati hak demokratis untuk menentukan nasib sendiri oleh rakyat, komunitas, dan bangsa.

Pertanyaan Diskusi

Berdasarkan pengalaman bekerja pada tingkat nasional atau global, apakah hubungan bantuan yang terbaru mencerminkan prinsip-prinsip seperti yang disebutkan di atas? Apa yang perlu diubah?

Kegiatan 1.1.

Menciptakan Teori Perubahan untuk Kerja Sama Pembangunan Berbasis HAM untuk Pembangunan Berkelanjutan

Manfaat Pembelajaran	Menerapkan prinsip dan pelajaran dari sesi sebelumnya dalam menciptakan teori perubahan untuk kerja sama pembangunan berbasis HAM.
Hasil yang diharapkan	Sebuah konsep teori perubahan untuk kerja sama pembangunan berbasis hak asasi manusia yang akan berkontribusi menuju tercapainya pembangunan berkelanjutan oleh rakyat.
Bahan-bahan	• Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts • Proyektor LCD • Spidol

Sebuah teori perubahan adalah peta jalan yang memperjelas langkah-langkah yang anda rencanakan untuk dicapai dan membantu menyampaikan dan menghubungkan pekerjaan anda dengan tujuan yang lebih besar. Di bawah ini komponen-komponen dari teori perubahan[15]:

- **Asumsi** – Fakta, situasi dan kondisi yang diasumsikan dan akan menjadi pertimbangan penting dalam menggapai kesuksesan.
- **Input** – Masyarakat, waktu, materi dan sumber daya yang anda dan lainnya butuhkan untuk diinvestasikan dalam mencapai tujuan anda.
- **Kegiatan** – Program, pelayanan dan tindakan yang akan dilaksanakan oleh anda atau organisasi non-profit.
- **Output** – Jumlah, jenis tingkatan pelayanan / program yang disiapkan bagi para penerima manfaatnya.
- **Hasil** – Perubahan spesifik terhadap sikap, pengetahuan, skill, status, dan kapasitas partisipan.
- **Dampak** – Perubahan sistem, organisasi, komunitas, dan sosial yang dihasilkan dari program (disengaja ataupun tidak).
- **Kondisi Eksternal** – Lingkungan yang anda inginkan untuk mendapatkan dampaknya. Ini termasuk faktor diluar kontrol program (ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya) yang akan mempengaruhi hasil.

[15] https://static1.squarespace.com/static/57a0dd1dbebafbfbfe80f9a7/t/5818db1e3e00be2eafd93a52/1478023968926/12b+-+Theory+of+Change+-+SP.pdf

Instruksi

Lihat Lembar Kegiatan 1

1. Tetapkan kelompok yang tepat untuk para peserta.
2. Lihat diagram 3 di bawah untuk instruksi nomor 3 dan seterusnya.
3. Mulailah menuliskan masalah yang berhubungan dengan efektivitas pembangunan (a) dan perubahan/dampak yang ingin anda capai yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan kerja sama pembangunan berbasis HAM yang lebih luas demi pembangunan berkelanjutan.
4. Gambarkan lingkungan eksternal yang akan mempengaruhi output dan outcome (h).
5. Tuliskan kelompok utama masyarakat yang akan dipengaruhi untuk menciptakan dampak. Hal ini bisa termasuk masyarakat yang terdampak oleh kebijakan bantuan dan/atau pembuat keputusan (b).
6. Tuliskan bagaimana anda akan terhubung dengan audiens utama (c) dan kegiatan yang akan anda lakukan terhadap audiens (d).
7. Identifikasi hasil langsung dari kegiatan (e) serta outcome atau manfaatnya yang lebih luas (f).

TEORI PERUBAHAN

[16] https://diytoolkit.org/tools/theory-of-change/

Modul 02

PENELITIAN RAKYAT DALAM KERJA SAMA PEMBANGUNAN

Tujuan Modul

1. Memperkuat kapasitas peserta untuk melaksanakan dan memfasilitasi penelitian rakyat sebagai bagian dari kerja Pemantauan Bantuan (Aid Observatorio).
2. Membiasakan peserta dengan konsep dasar, tujuan, dan metode penelitian rakyat.
3. Mengembangkan keterampilan peserta dalam melaksanakan dan memfasilitasi penelitian rakyat dalam Aid Observatorio OMS.

Estimasi Waktu: Minimal 5 Jam

Penelitian mengenai kebijakan dan dampaknya pada negara penerima telah dilakukan secara umum di negara donor atau lembaga multilateral yang memfasilitasi provisi bantuan. Tren ini menghasilkan analisis yang tidak kritis dari kebijakan bantuan yang ada yang mengabaikan indikator pembangunan seperti di antaranya hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan.

Salah satu capaian signifikan di Busan adalah pergeseran wacana dari sekadar efektivitas bantuan menjadi efektivitas pembangunan. Yang akhirnya mensyaratkan prinsip-prinsip kepemilikan demokratis, HAM, hak perempuan dan kesetaraan gender, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial harus ditegakkan dalam kesepakatan kerja sama pembangunan. Yang lebih penting, capaian tersebut mengakui peran masyarakat sipil, sebagai aktor pembangunan dengan hak mereka sendiri, dalam mempertahankan prinsip-prinsip efektivitas pembangunan tersebut.

Untuk tetap teguh pada komitmennya, OMS akan melanjutkan advokasi efektivitas pembangunan dalam kebijakan dan praktik kerja sama pembangunan, khususnya yang berhubungan dengan akuntabilitas pemerintah dan badan donor terhadap agenda efektivitas pembangunan yang lebih luas. Dalam hal ini, pentingnya kerja OMS dalam memantau dan meneliti kebijakan bantuan, proyek, dan dampaknya tidak bisa terlalu ditekan.

Penelitian ditujukan untuk seseorang dan untuk beberapa tujuan. Penelitian pembangunan secara tradisional dianggap sebagai upaya yang sangat teknis, rumit dan ilmiah, paling sering diserahkan ke tangan para ahli ilmu sosial dan akademisi. Penelitian pembangunan tradisional dilaksanakan oleh kelompok elit yang cenderung mengabaikan realitas sehari-hari dalam komunitas dan untuk rakyat di lapangan. Itulah sebabnya alternatif

penelitian rakyat yang dikerjakan dan didesain sendiri oleh rakyat menjadi penting, jika penelitian tersebut sejatinya bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan kondisi pembangunan bagi mayoritas rakyat miskin.

Penelitian rakyat dalam konteks bantuan dan efektivitas pembangunan akan menegaskan bagaiman bantuan dan kebijakan serta proyek kerja sama pembangunan dipahami oleh dan mempengaruhi komunitas lokal dan akar rumput. Penelitian rakyat menjadi berharga jika meletakkan kepentingan masyarakat sebagai intinya. Hal ini penting untuk memahami situasi di lapangan, situasi masyarakat itu sendiri yang harus mendapatkan manfaat dari semua upaya kerja sama pembangunan.

Modul ini dibagi ke dalam tiga sesi:

Sesi 2.1.

Melaksanakan Penelitian Rakyat	menerapkan prinsip-prinsip penelitian rakyat dan perbedaannya dari penelitian tradisional.

Sesi 2.2.

Aid Observatorio OMS	memperkenalkan apa itu Aid Observatorio, peran dan pentingnya dalam memantau kebijakan dan proyek bantuan, dan bagaimana penelitian rakyat dimanfaatkan dalam observatorio.

Sesi 2.3.

Proses Penelitian Rakyat dalam Kerja Sama Pembangunan	mendiskusikan langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian rakyat dalam konteks kontribusi terhadap Aid Observatorio OMS.

Sesi 2.1.
Melaksanakan Penelitian Rakyat

Manfaat Pembelajaran	Pada akhir sesi, peserta familiar dengan konsep dan prinsip-prinsip penelitian rakyat.
Bahan-bahan	• Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts • Proyektor LCD • Spidol
Proses	1. Menjelaskan manfaat pembelajaran sesi 2. Menanyakan siapa saja yang pernah terlibat dalam proyek penelitian. 3. Mendiskusikan penelitian rakyat dan prinsipnya.

I. Apa itu Penelitian Rakyat?

Penelitian rakyat secara luas didefinisikan sebagai penelitian yang melayani kebutuhan dan kepentingan rakyat. "Untuk kepentingan siapa kita melakukan penelitian?" adalah pertanyaan dasar yang harus dijawab. "Apakah untuk rakyat atau kaum elit?" Berbagai metode dan pendekatan bisa digunakan dalam melaksanakan penelitian rakyat, tetapi yang paling penting adalah penelitian tersebut oleh dan untuk rakyat.

Penelitian rakyat adalah penelitian yang diabdikan untuk kebutuhan dan kepentingan rakyat, secara khusus, bagi kaum yang terpinggirkan dan tak berdaya. Meskipun penelitian menuntut objektivitas, penelitian ini tidak bebas nilai. Tujuan mendasar dilakukannya penelitian, serta apa tujuan penggunaan hasilnya, tidak netral. Baik kaum elit maupun rakyat bisa menggunakan penelitian sebagai alat untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Perbedaannya adalah penelitian kaum elit untuk mempertahankan status quo mereka sementara penelitian rakyat berusaha berkontribusi pada perubahan sosial.

Penelitian rakyat bertujuan untuk menemukan basis materi dan

perkembangan historikal dari kondisi sosial terkini, menemukan dan memahami hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara berbagai kelompok sosial, dibuat sebagai petunjuk dalam mengatur tindakan yang tepat dan sebagai alat untuk menangani masalah klas-klas tertindas dan sektor masyarakat, dan berkontribusi untuk mengedukasi, mengorganisir, dan memobilisasi masyarakat menuju perubahan sosial. Penelitian rakyat membangun analisis yang menjadi alternatif dari sumber arus utama dan interpretasi yang digunakan untuk melemahkan hak-hak rakyat. Penelitian rakyat menginformasikan tindakan yang memanfaatkan pengetahuan dan tantangan baru dan pada gilirannya, memperbaiki praktik kerja masyarakat bagi perubahan sosial.

II. Prinsip-Prinsip dalam Melaksanakan Penelitian Rakyat

Berikut adalah beberapa prinsip yang digunakan ketika melakukan penelitian rakyat:

- Praktik sosial masyarakat – praktik produksi dan perjuangan sosial – adalah sumber utama pengetahuan
- Melawan kerangka kerja akademis atau statistik semata yang buta terhadap dinamika kelompok sosial dalam masyarakat dengan kondisi dan kepentingan yang berbeda
- Melawan penelitian yang hanya mengandalkan teori, pengetahuan buku, asumsi subjektif, dan informasi yang usang
- Mengakui keterkaitan isu lokal terhadap isu nasional dan global
- Mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk mengkonkretkan indikator utama dalam ekonomi dan politik yang bisa berubah dari periode ke periode, sehingga menunjukkan bagaimana beragam kelompok bersikap dan berinteraksi dalam kehidupan nyata
- Para peneliti berakar pada atau mempertahankan hubungan yang dekat dengan gerakan rakyat dan perjuangannya karena hubungan yang kuat dengan pergerakan memastikan bahwa penelitian dapat mengatasi masalah dan kepentingan masyarakat
- Informasi dan analisis dibagikan dan diproses secara konstan melalui saluran yang berbeda lainnya (workshop, buku, pertukaran email, dan sebagainya) yang meningkatkan validitas dan fungsi hasil penelitian serta akuntabilitas peneliti terhadap kelompok yang terdampak oleh penelitian tersebut

Sesi 2.2.
Aid Observatorio OMS

Manfaat Pembelajaran	Pada akhir sesi, peserta: 1. Familiar dengan Aid Observatorio OMS. 2. Mampu memahami pentingnya penggunaan penelitian rakyat dalam kerja Aid Observatorio.
Bahan-bahan	• Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts • Proyektor LCD • Spidol • Akses internet / screenshot wahana Aid Observatorio OMS
Proses	1. Menjelaskan manfaat pembelajaran sesi. 2. Mendiskusikan Aid Observatorio OMS. 3. Selama diskusi berlangsung, foto situs Aid Observatorio OMS ROA-AP (atau screenshot).

I. Apa itu Aid Observatorio OMS?

Observatorio Aid OMS adalah platform pemantauan bantuan dan kerja sama pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk kampanye dan kerja kebijakan. Sejak 2013, Reality of Aid Network telah melaksanakan pelatihan di Asia-Pasifik untuk menjalankan observatori tersebut.

Tujuan Aid Observatorio OMS oleh Reality of Aid adalah sebagai berikut:

- **Mempromosikan kesadaran dan transparansi** dalam manajemen bantuan oleh negara penerima dan penyedia lainnya (contoh, IFI) dalam suatu wilayah;
- **Penelitian bantuan (Aid) dan analisis terhadap tren dan dampak** proyek pembangunan serta kemitraan publik-swasta di suatu wilayah;
- **Membantu keterlibatan OMS** dengan pemerintah donor dan

penerima dan penyedia lainnya untuk penggunaan dana publik yang efektif dan efisien bagi perlindungan HAM dan demokrasi;

- **Membantu kampanye advokasi komunitas atau akar rumput dan organisasi rakyat** untuk tuntutan hak demokratis mereka dan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dan penyedia lainnya; dan
- **Memfasilitasi pembelajaran bersama di antara OMS, pembuat kebijakan, akademisi, media dan aktivis** untuk promosi pembangunan berkelanjutan oleh rakyat dengan berdasarkan pada HAM dan merumuskan solusi atau rekomendasi kritis.

Di tahun 2018, Reality of Aid Network-Asia Pacific (RoA-AP) sepakat untuk menangani isu pemantauan lembaga keuangan internasional (IFI) sebagai masalah prioritas dalam suatu wilayah. IFI, seperti IMF-Bank Dunia, ADB, AIIB, mendapatkan kritikan dan protes dari masyarakat sipil dan komunitas akar rumput karena persyaratan bantuan yang memaksakan kebijakan neoliberal yang berorientasi ekspor yang didorong oleh pasar terhadap negara berkembang. Persyaratan dan proyek yang didanai oleh IFI ini terus berdampak negatif terhadap capaian pembangunan berkelanjutan yang mengancam HAM dan proses demokratis domestik, dan telah menghasilkan outcome sosial yang negatif mencakup (tapi tidak terbatas pada) keterbelakangan dan kemiskinan yang berkepanjangan, pelanggaran hak individu dan kolektif dan pengrusakan lingkungan.

Di tahun yang sama, RoA-AP meluncurkan Aid Observatorio yang diprakarsai oleh OMS dan mengembangkan database proyek pembangunan yang didanai melalui ODA bilateral, atau IFI. Dampak dari proyek dipantau dan dievaluasi dalam kaitannya dengan dampaknya pada 1) HAM, 2) Demokrasi, 3) Perdamaian dan keamanan, dan 4) Lingkungan atau iklim; dan juga kaitannya dengan bagaimana prinsip-prinsip efektivitas pembangunan ditegakkan atau tidak. Relevansi dan keterkaitan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) agenda 2030 juga dinilai.

Individu atau organisasi bisa memantau dan mengevaluasi ODA atau IFI yang mendanai proyek pembangunan (dari 2015 seterusnya) dalam komunitas atau wilayah tanggungjawabnya dengan hanya mengisi *formulir Aid Observatorio.*

A. Penelitian Rakyat dalam Aid Observatorio

Penelitian rakyat memastikan bahwa tujuan, program, dan kegiatan organisasi akar rumput dan OMS didasarkan pada lingkungan kehidupan sosial aktual mereka dan olehnya itu akan lebih kecil kemungkinannya untuk dikooptasi oleh kaum elit, korporasi atau kepentingan donor. Ini juga akan memastikan bahwa penelitian berusaha untuk berkontribusi terhadap tujuan perbaikan kondisi massa.

Dalam melakukan penelitian kerja sama pembangunan, OMS harus selalu menyadari bagaimana kebijakan mempengaruhi kehidupan kaum terpinggirkan. Penelitian rakyat sangat penting dalam memahami situasi di lapangan, situasi masyarakat itu sendiri yang harus mendapatkan manfaat dari kerja sama pembangunan. Lebih jauh, penelitian ini mengkonsolidasikan dan memperdalam kelompok dan jaringan OMS yang menghasilkan pertukaran informasi dan analisis yang konstan terhadap kerja sama pembangunan, di antara kebijakan-kebijakan lainnya.

Akademisi dan para ahli dalam penelitian sosial juga bisa melakukan penelitian rakyat dalam Aid Observatorio jika tujuan penelitian ini dibimbing menggunakan pertanyaan sentral tentang bagaimana bantuan dan bentuk kerja sama pembangunan lainnya secara efektif berkontribusi dalam mengangkat kondisi kaum terpinggirkan dan kelompok rentan. Para sarjana mampu melaksanakan penelitian rakyat karena, seperti yang disebutkan di bagian sebelumnya, apa yang penting adalah penelitian masyarakat harus melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan harus menangani perubahan sosial dan transformasi sosial.

Sesi 2.3.

Proses Penelitian Rakyat dalam Kerja Sama Pembangunan

Manfaat Pembelajaran	Pada akhir sesi, peserta: 1. Mampu mengidentifikasi langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian rakyat dalam konteks Aid Obervatorio OMS – dari konseptualisasi ke analisis data. 2. Familiar dengan metode yang umum digunakan dalam penelitian dan kelebihan serta keterbatasannya dalam pengumpulan informasi. 3. Mampu merumuskan masalah penelitian yang relevan terhadap kerja Aid Obervatorio OMS dan bagaimana mengatur dan menganalisis data.
Bahan-bahan	• Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts • Proyektor LCD • Spidol
Proses	1. Menjelaskan manfaat sesi pembelajaran ini. 2. Mendiskusikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian rakyat dalam kerja sama pembangunan.

Tujuh Langkah dalam Melakukan Penelitian Rakyat dalam Kerja Sama Pembangunan

01 **Merumuskan masalah penelitian.**

02 **Mengidentifikasi sumber data dan prosedur pengumpulan data.**

03 **Menentukan tujuan penelitian.**

04 **Mengidentifikasi strategi dan pendekatan penelitian.**

05 **Proses dan data analisis.**

06 **Menuliskan laporan penelitian.**

07 **Mengevaluasi proses penelitian.**

I. Tujuh Langkah dalam Melaksanakan Penelitian Rakyat dalam Kerja Sama Pembangunan

LANGKAH 1

Merumuskan Masalah Penelitian.

Dalam melakukan penelitian untuk kerja sama pembangunan, penting bahwa kita dapat mengidentifikasi masalah penelitian yang berfokus pada masyarakat itu sendiri. Masalah tersebut termasuk kebijakan dan proyek serta implikasinya terhadap HAM, kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan. Yang harus dilakukan pertama kali adalah konseptualisasi dan penggambaran lingkup penelitian sebelum seorang peneliti bisa mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. Merumuskan masalah membutuhkan empat tahapan sebagai berikut:

1. **Konseptualisasi.** Konseptualisasi membutuhkan penyempurnaan ide dan topik yang sesuai untuk penelitian. Secara tradisional, peneliti mengidentifikasi topik yang sesuai berdasarkan perspektif mereka sendiri. Dalam penelitian rakyat mengenai kerja sama pembangunan, topik yang dipilih harus mencerminkan fokus masyarakat terhadap efektivitas pembangunan. Pertanyaan berikut mungkin bisa membantu dalam mengkonsep masalah penelitian:
    - Apa kebijakan bantuan terkini yang sedang didorong oleh pemerintah/IFI/sektor swasta?
    - Bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada orang-orang (komunitas, sektor atau kelompok yang terpinggirkan) dan masyarakat?
2. **Menggambarkan lingkup penelitian.** Topik yang diidentifikasi mengenai bantuan dan pembangunan mungkin terlalu luas untuk penelitian, olehnya itu penggambaran lingkup penelitian harus merumuskan masalah penelitian. Seorang peneliti bisa menggambarkan cakupan penelitian dengan cara:
    - Identifikasi tingkat penelitian (internasional, nasional, atau lokal)
    - Identifikasi lingkup geografi dan/atau cakupan tahun/bulan
    - Menentukan sub topik atau tema dari topik utama yang diidentifikasi
    - Membuat tinjauan studi dan penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi celah penelitian agar bisa menjawab pertanyaan penelitian yang mungkin muncul.
    - Identifikasi jenis kerja sama pembangunan
    - Uji kelayakan penelitian berdasarkan waktu, sumber, dan kapasitas penelitian.

Berbagai topik bisa muncul di benak dalam tema kepemilikan demokratis, kedaulatan, HAM, kesehatan, buruh, atau perempuan. Hal ini juga penting untuk menggambarkan jenis bantuan di bawah pengawasan karena bantuan bisa datang tidak hanya dalam bentuk ODA saja.

3. **Merumuskan masalah penelitian.** Masalah penelitian adalah sebuah pertanyaan yang mencerminkan topik, materi, atau aspek yang akan diteliti. Pertanyaan berikut dapat digunakan sebagai petunjuk dalam merumuskan masalah penelitian:
    - Apakah masalah tersebut relevan dan responsif terhadap perkembangan masyarakat?
    - Apa jelas (masalah yang utama dan masalah-masalah sekunder)?
    - Apakah bisa diselidiki? Apakah tersedia data dan literatur yang cukup yang mendukung penelitian?
    - Masalah apa yang muncul?
    - Apa relevansi penelitian terhadap masalah?

Contoh Masalah Penelitian/Topik dalam Kerja Sama Pembangunan

1. Bagaimana militerisasi bantuan mempengaruhi capaian pembangunan berkelanjutan?
2. Apa dampak proyek energi yang didanai IFI bagi hak masyarakat adat?
3. Bagaimana cara kerja sama teknis menggiring ke privatisasi pelayanan publik?

LANGKAH 2

Menentukan Tujuan Penelitian.

Setelah masalah penelitian diidentifikasi dan dirumuskan, tujuan penelitian harus ditetapkan. Tujuan penelitian menjelaskan ruang lingkup dan batasan penelitian. Ini juga memberikan kejelasan tentang pentingnya atau tujuan penelitian dan mencerminkan informasi apa yang akan keluar dari penelitian dan dari mana asalnya. Tujuan penelitian secara luas menjawab pertanyaan, "Apa yang ingin dicapai oleh penelitian?" Untuk lebih menyempurnakan tujuan penelitian dan menggambarkan ruang lingkup penelitian, tujuan umum dapat dibagi menjadi tujuan penelitian khusus.

Dalam melaksanakan penelitian rakyat untuk Aid Observatorio OMS, tujuan penelitian harus berkontribusi terhadap tujuan pemahaman dan merumuskan ulang kebijakan menggunakan pendekatan berbasis HAM mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, sebagai contoh.

Contoh Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian: Menilai dampak militerisasi bantuan di Asia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan

Tujuan Khusus Penelitian:

1. Untuk menentukan sumber dan jumlah bantuan militer yang mengalir ke wilayah,
2. Untuk mengidentifikasi metode lain dimana bantuan dimiliterisasi; dan
3. Untuk menggambarkan bagaimana militerisasi bantuan mempengaruhi pencapaian SDG dalam hal kompetisi dalam alokasi bantuan dan bagaimana militerisasi memfasilitasi atau menghalangi pelaksanaan SDG, khususnya SDG 5 dan 16.

LANGKAH 3

Mengidentifikasi Pendekatan dan Strategi Penelitian yang Tepat.

Begitu masalah dan tujuan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pendekatan strategi penelitian. Perhatikan bagaimana studi terdahulu mengenai masalah penelitian tersebut mungkin membantu dalam menentukan pendekatan penelitian.

Strategi dan pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian harus menggambarkan tujuan penelitian. Peneliti mungkin menggunakan strategi dan pendekatan yang berbeda atau campuran dalam melaksanakan penelitian Aid Observatorio OMS..

Strategi dan Pendekatan

1. **Penelitian Kuantitatif** adalah strategi dimana data numerik digabungkan dan dianalisis menggunakan prosedur statistik untuk menggambarkan kesimpulan. Dalam penelitian bantuan dan kerja sama pembangunan, strategi ini bisa melibatkan data gabungan seperti jumlah bantuan yang diberikan oleh donor tertentu pada periode waktu tertentu, jumlah penerima manfaat dari proyek kerja sama pembangunan tertentu, atau jumlah pengungsi karena proyek infrastruktur dukungan ODA.

   Database statistik sangat berguna dalam pendekatan penelitian kuantitatif. Cara lain untuk mengumpulkan data adalah melalui penggunaan survei dengan pertanyaan terstruktur yang dibuat dalam bentuk formulir angket yang dilaksanakan melalui wawancara atau dijawab oleh responden. Survei menggunakan sampel acak atau sampel representatif dari responden yang akan "mewakili" masyarakat yang lebih luas. Meskipun survei kuantitatif jarang, jika pernah, digunakan dalam memahami persepsi publik mengenai kebijakan yang lebih luas (contoh ekonomi, pekerjaan atau hubungan internasional), nilai penelitian kuantitatif dalam hal ini digunakan sebagai indikator pembangunan yang bisa digunakan untuk mengukur tren jangka panjang dan jangka

pendek dalam pertumbuhan ekonomi, HAM, dan kemiskinan.

2. **Penelitian Kualitatif,** kebalikan dengan kuantitatif, adalah strategi dimana alih-alih menggunakan data numerik, peneliti mengumpulkan, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari data tekstual atau narasi. Dalam konteks penelitian bantuan dan kerja sama pembangunan, data ini bisa berupa pengalaman pribadi seseorang tentang proyek pendanaan bantuan dalam bentuk cerita atau hasil dari wawancara. Data bisa berasal dari pernyataan kebijakan yang dibuat oleh individu atau lembaga yang terkait dengan bantuan dan kerja sama pembangunan.

3. **Penelitian Partisipatif** adalah strategi dimana subjek penelitian menjadi peserta penelitian dengan melibatkan mereka langsung dalam beberapa bagian atau keseluruhan penelitian. Ini berarti bahwa peneliti berinteraksi secara konstan dengan peserta, dan mungkin hidup bersama atau mengikuti kegiatan sehari-hari mereka. Pendekatan ini sering digunakan oleh para pembela yang ingin membantu kelompok rentan secara langsung menyuarakan masukan dan rekomendasi mereka dalam penelitian.

Meskipun satu atau gabungan strategi penelitian bisa digunakan, peneliti untuk Aid Observatorio OMS mengadopsi pendekatan kritikal dimana analisis dikerjakan dalam beberapa aspek atau komponen kebijakan dan proyek bantuan. Pendekatan ini melibatkan deskripsi, analisis, dan penilaian berikut:

- Masalah apa yang akan ditangani dalam kebijakan/proyek yang diteliti?
- Apa tujuan dan sasaran kebijakan/proyek tersebut?
- Asumsi dan nilai apa yang mendasari prosedur yang dikembangkan untuk menangani masalah?
- Bagaimana kebijakan/proyek diimplementasikan?
- Siapa penerima manfaat dari implementasi kebijakan/proyek tersebut?
- Seberapa efektif implementasi dalam menangani dari tujuan kebijakan/proyek?
- Apakah ada kesenjangan antara tujuan kebijakan/proyek dan implementasi?
- Seberapa realistis atau efektifkah keseluruhan kebijakan/proyek?

Analisis kebijakan dan proyek yang kritis mengevaluasi apakah suatu proyek/kebijakan tertentu masuk akal atau tidak dengan konteks tertentu. Hal ini juga dapat mengusulkan kebijakan/proyek atau proses implementasi alternatif. Konteks politik, sosial, dan historis di mana sebuah kebijakan/proyek dikembangkan dan diimplementasikan juga diperhitungkan ketika menggunakan pendekatan kritis.

Pendekatan ini sangat berguna dalam penelitian kerja sama pembangunan selama menyertakan pemahaman mendalam mengenai tujuan, isi, asumsi, dampak, dan nuansa dalam pelaksanaan proyek dan kebijakan bantuan. Pendekatan ini biasanya digabungkan dengan evaluasi implementasi kebijakan/proyek dan dampaknya dimana implementasi dan dampak dari program atau kebijakan kerja sama pembangunan tertentu dilaksanakan di tingkat berbeda – di tingkat komunitas, sektoral, nasional, atau bahkan intenasional dinilai. Studi kasus kadang digunakan untuk menggambarkan dampak dari kebijakan dan proyek bantuan.

LANGKAH 4

Mengidentifikasi Sumber Data dan Prosedur Pengumpulan Data.

Data berasal dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Adapun sumber informasi dapat mencakup:

- **Sumber Primer** – survei, diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara
- **Sumber Sekunder** – dokumen dan arah kebijakan, kesepakatan, perjanjian, data dari Aid Observatorio OMS, rekaman OMS atau lembaga lainnya yang melakukan pemantauan kerja sama pembangunan, informasi media, statistik pemerintah.

Secara umum, metode penelitian bisa diklasifikasikan ke dalam metode kuantitatif dan/atau kualitatif. Baik metode kuantitatif maupun kualitatif berguna dalam penelitian rakyat mengenai Aid Observatorio OMS untuk menginformasikan analisis yang lebih baik ke depannya.

- **Metode Kuantitatif.** Metode ini menggunakan statistik dan probabilitas dalam memahami fenomena dan sikap sosial, contohnya adalah survei, sensus, dan pemrosesan data statistik sekunder. Metode kuantitatif ini digunakan secara luas dalam penelitian kebijakan. Dalam Aid Observatorio OMS, metode kuantitatif harus memperhatikan indikator pembangunan, HAM, keadilan sosial, dan kesetaraan gender. Beberapa indikator ekonomi memasukkan pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antara orang kaya dan miskin.

- **Metode Kualitatif.** Metode ini menjawab "mengapa" dan "bagaimana" bukan cuma apa, dimana, dan kapan fenomena sosial terjadi. Contohnya adalah wawancara, etnografi (observasi partisipan), focus group discussion, dan dokumentasi proses. Pelaksanaan penelitian rakyat mengenai bantuan dan efektivitas pembangunan memperhatikan sejarah dan perkembangan kebijakan bantuan dan program pembangunan tertentu dan selanjutnya memprosesnya ke perihal bagaimana penelitian tersebut berdampak pada pembangunan sosial.

LANGKAH 5

Proses dan Analisis Data.

Proses dan analisis data berbeda-beda tergantung dari metodologi yang digunakan dalam penelitian.

- **Data Kuantitatif.** Untuk metode kuantitatif, data diproses dan dianalisis menggunakan software statistik seperti Excel dan SPSS dan membuat beragam ukuran statistik. Contohnya termasuk a) statistik deskripsi sederhana seperti mean (average), median, mode, dan standar deviasi dan b) statistik inferensial (analisis regresi) yang menunjukkan hubungan antar variabel.

  Contoh:

  - Ukuran/jumlah rata-rata alokasi ODA untuk inisiatif berkaitan dengan gender
  - Sektor tematik yang menerima jumlah bantuan tertinggi
  - Analisis regresi dari jumlah ODA ke negara-negara versus pengurangan kemiskinan atau pengangguran. Hipotesisnya adalah jika sebuah negara menerima ODA lebih, perkembangan manusianya mungkin lebih meningkat. Variabelnya adalah aliran ODA (indikatornya adalah jumlah ODA yang diterima suatu negara) dan perkembangan manusia (indikatornya antara lain pengurangan kemiskinan dan pengangguran).

- **Data Kualitatif.** Pengolahan data kualitatif tidak perlu berurusan dengan analisis kuantitatif yang kompleks. Wawancara, FGD, dan metode lain yang digunakan untuk mengumpulkan data harus didokumentasikan, direkam, dan dituliskan dengan tepat. Data dapat dikelompokkan berdasarkan tema dan sub-tema. Tema dan sub-tema bisa berasal dari tujuan penelitian yang dirumuskan. Di bawah ini ada beberapa tips dalam mengolah data kualitatif:

  - **Untuk penelitian deskriptif**
    - Tunjukkan perihal yang umum
    - Tunjukkan data yang timpang
    - Tunjukkan aspek atau karakteristik data lainnya
    - Menyimpulkan atau membuat generalisasi
  - **Untuk penelitian penjelasan (explanatory)**

- Tunjukkan hubungan variabel
- Tunjukkan kecenderungan hubungan
- Menyaring hubungan dan menunjukkan sebab akibat
- Membuat prediksi atau observasi general

Lihat Lampiran A untuk Sampel Data Kuantitatif dan Kualitatif.

Beberapa peringatan dalam menganalisa kebijakan dan data mengenai kerja sama pembangunan:

1. Jangan pernah mengambil apa yang tertulis dalam dokumen kebijakan yang tersedia (seperti koran PBB, posisi pemerintah, dan sebagainya). Catatan petunjuk bisa dianalisis dan dikontraskan dengan tindakan dari aktor pembangunan yang terlibat untuk mengungkapkan maksud sebenarnya.
2. Perhatikan bahasa dan konsep yang digunakan dalam dokumen kebijakan. Apakah dokumen tersebut mempromosikan kepemilikan dan pemerintahan yang demokratis seperti yang mereka klaim?
3. Ingat: hal yang hilang (tidak tertera) sama pentingnya dengan apa yang tersedia.
4. Bandingkan maksud kebijakan yang dinyatakan dengan akibat yang sebenarnya. Apakah maksudnya mencerminkan kepentingan masyarakat? Apakah dampak yang sebenarnya terjadi dalam mencapai kepentingan rakyat?
5. Bandingkan dan kontraskan bagaimana kebijakan yang sama di negara berbeda, sebagai contoh, didokumentasikan dan dilaksanakan dan bagaimana kebijakan internasional yang sama dilaksanakan dalam 2 aturan yang berbeda.
6. Gali lebih dalam. Temukan aspek politik di balik kebijakan. Siapa yang mendorongnya dan mengapa? Untuk siapa?
7. Siapkan sebuah alternatif. Ketika telah menemukan dan menunjukkan kekurangan dalam sebuah kebijakan, maka penting bagi OMS untuk menyusun alternatif atau rekomendasi untuk dapat menyampaikan kepentingan masyarakat.

LANGKAH 6

Menulis Laporan Penelitian.

- **Akurasi.** Menulis kerja pembangunan apapun, termasuk Aid Observatorio, membutuhkan informasi yang benar karena memberikan kredibilitas kepada OMS dalam melakukan penelitian serta studi itu sendiri. Informasi yang salah dan tidak akurat juga bisa salah informasi terhadap rencana, langkah-langkah, usaha, dan rekomendasi yang mungkin di masa depan.
- **Urutan.** Sebuah ikhtisar menunjukkan urutan informasi dan analisis yang logis yang harus dipertimbangkan. Penulis juga harus menghindari mengaburkan laporan dengan menulis dalam cara yang kompleks. Tantangannya adalah membuat laporan yang ringkas tetapi bukan penyederhanaan (simplistis).
- **Imajinasi.** Gunakan imajinasi dalam memberikan ide dan argumen. Terkadang, gaya penulisan mempengaruhi pembaca laporan. Meskipun hampir semua peneliti kerja sama pembangunan berada dalam tema HAM, kerja sama berkelanjutan, dan kesetaraan, di antaranya, penelitian rakyat tidak boleh menghasilkan laporan yang monoton dan membosankan.
- **Bedakan menulis hasil penelitian dengan tulisan untuk popularisasi.** Menulis laporan berarti menjelaskan keseluruhan proses penelitian, penemuan atau hasil, dan implikasinya dalam studi. Tulisan popularisasi lebih singkat – berfokus pada penemuan dan analisis penelitian, dan ditujukan untuk memberikan informasi publik. Dalam hal tulisan penelitian, peneliti bebas menggunakan jargon umum untuk kerja Aid Observatorio karena audiensnya mungkin familiar dengan

bahasa kerja sama pembangunan. Tulisan untuk popularisasi, di satu sisi, harus memastikan bahwa istilah dan konsep dijelaskan dalam bahasa umum agar masyarakat yang tidak terbiasa dengan kerja sama pembangunan akan mudah paham.

LANGKAH 7

Mengevaluasi Proses Penelitian.

Mengevaluasi penelitian dan proses berarti memperhatikan 1) dampak penelitian terhadap tujuan OMS dan kepercayaan dalam mempromosikan kepemilikan dan efektivitas pembangunan yang demokratis, dan 2) bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan oleh peneliti. Melalui cara ini, kelompok bisa menilai kontribusi kerja keras penelitian mereka dalam kerja sama pembangunan, khususnya bagi pengembangan masyarakat, dan bagaimana para peneliti maju dalam produksi pengetahuan.

Dalam mengevaluasi penelitian dan proses, peneliti menanyakan pertanyaan berikut:

- Apakah penelitian mencapai tujuannya? Apakah penelitian memenuhi kepentingan masyarakat?
- Apa kekuatan dan kelemahan yang dialami dalam melakukan penelitian?
- Apa kesulitan yang dihadapi ketika melakukan penelitian? Bagaimana mengatasinya?
- Apakah penelitian berkontribusi terhadap efektivitas pembangunan OMS serta kepemilikan kebijakan baru yang demokratis?

Modul 03

SUMBER DAN PENGELOLAAN DATA

Tujuan Modul

1. Membantu peserta memahami pentingnya Data Terbuka (Open Data).
2. Memudahkan peserta untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip pengelolaan data.
3. Membantu peserta dalam mengeksplorasi jenis data yang berbeda dan dimana jenis data tersebut dapat ditemukan.

Alokasi Waktu: Minimal 3 Jam

Sejak prinsip-prinsip kerja sama pembangunan yang efektif diartikulasikan dalam Kemitraan Busan 2011, OMS telah mengadvokasi para stakeholder agar akuntabel dengan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip tersebut. Bagian dari advokasi untuk akuntabilitas ini menggunakan data dari penelitian yang secara efektif membangun fakta dan merumuskan rekomendasi dan posisi kebijakan ketika berikatan dengan pemerintah dan lembaga yang terkait dalam kerja sama pembangunan.

Di tahun 2019, Reality of Aid – Asia Pacific merilis sebuah penelitian yang menilai komitmen ADB terhadap prinsip efektivitas pembangunan yang implementasinya berkaitan langsung dengan Strategi ADB 2030. Penelitian mengungkapkan pelanggaran serius dari komitmen Bank terhadap prinsip-prinsip: fokus pada hasil, kepemilikan demokratis, kemitraan inklusif, serta transparansi dan akuntabilitas, karena kebijakan ekonomi yang dipromosikannya yang memperburuk kemiskinan, kerusakan lingkungan, utang, dan perampasan sumber daya oleh korporasi, serta kurangnya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM akibat dari kebijakan dan proyeknya. Setelah menggunakan data terpadu untuk membangun non-komitmen ADB terhadap prinsip EDC, laporan dilanjutkan ke rekomendasi untuk merubah tata kelola Bank, susunan kebijakan ekonomi, prosedur implementasi, dan mekanisme akuntabilitasnya agar Bank melaksanakan komitmennya terhadap EDC. Hasil dari laporan ini digunakan selama keterlibatan dengan ADB, khususnya selama Annual Governor Meeting (AGM) ke 52 dan 53.

Skenario yang disebutkan di atas menggambarkan mengapa banyak OMS mengandalkan data untuk menyampaikan strategi, rekomendasi, dan posisi kebijakan. Cara ini sudah benar di era sekarang ini dimana kearifan menggunakan informasi yang relevan adalah penting, mengingat sejumlah besar data yang tersedia. Modul ini akan membahas signifikansi dan tantangan dalam pengelolaan data serta pentingnya menjamin bahwa publik memiliki akses untuk mendapatkan informasi utama yang berkaitan dengan efektivitas pembangunan.

Modul ini terdiri dari dua modul dan satu kegiatan:

Sesi 3.1.

Data Terbuka dan Prinsip Pengelolaan Data	mendiskusikan pentingnya sumber data terbuka; prinsip utama transparansi, aksesibilitas, dan reliabilitas dalam kaitannya dengan pengelolaan data, serta perlindungan data, privasi data, dan tantangan yang terkait

Sesi 3.2.

Jenis dan Sumber Data untuk Aid Observatorios OMS	menentukan jenis data relevan yang bisa digunakan untuk Aid Observatorios OMS dan dimana bisa mengaksesnya

Kegiatan 2.

Mendesain Sebuah Penelitian untuk Aid Observatorio	menempatkan pengetahuan dan skil yang telah dipelajari oleh partisipan dari sesi sebelumnya untuk dikelola dengan cara membuat desain penelitian

Sesi 3.1.

Data Terbuka dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Data

Manfaat Pembelajaran

Pada akhir sesi, peserta:

1. Familiar dengan makna dan konsep data terbuka.
2. Mampu memahami pentingnya mengakses informasi terkait efektivitas pembangunan.
3. Familiar dengan prinsip pengelolaan data yang berbeda.
4. Mampu mengidentifkasi privasi data/tantangan keamanan dalam pekerjaan mereka.

Bahan-bahan

- Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts
- Proyektor LCD
- Spidol

Proses

1. Menjelaskan manfaat sesi pembelajaran.
2. Mendiskusikan data, data terbuka, dan prinsip pengelolaan data.

I. Apa itu Data?

Data, dalam pengertian yang sederhana, adalah bagian kecil dari informasi yang direkam dan digunakan untuk tujuan penelitian dan analisis. Data bisa dalam bentuk file numerik atau teks yang dikelompokkan bersama meggunakan alat visualisasi seperti tabel, grafik, atau bagan.

Data dalam kerja sama pembangunan dan aksesnya sangat penting untuk Aid Observatorio OMS karena merupakan titik pangkal (starting point) dalam melakukan investigasi mengenai dampak efektivitas kerja sama pembangunan.

II. Apa itu Data Terbuka?

Data Terbuka adalah gagasan bahwa data tertentu harus tersedia dengan bebas untuk digunakan oleh siapapun, mengubah dan menerbitkan ulang sesuai keinginan, tanpa larangan copyright, hak paten atau mekanisme kontrol lainnya. Tujuan dari gerakan data terbuka adalah sama seperti "gerakan terbuka" lainnya seperti sumber terbuka, piranti keras (hardware) terbuka, konten terbuka, dan akses terbuka.

Sementara istilah "data terbuka" muncul pertama kali di tahun 1990, filosofi di baliknya terbangun dalam waktu yang panjang dalam penelitian ilmiah. Di tahun 1940 contohnya, Robert Merton memperkenalkan apa yang kemudian dikenal sebagai Norma Merton[17] dari penelitian ilmiah yang melibatkan komunalisme atau gagasan bahwa pengetahuan ilmiah harus bagus karena digunakan di antara komunitas ilmiah. Para pejuang open data mendukung perluasan akses bagi masyarakat umum terhadap pengetahuan ilmiah, serta informasi mengenai kebijakan dan praktik pembangunan yang mempengaruhi kehidupan rakyat.

[17] Robert Merton introduced four norms used in scientific research:

- Communalism - scientific knowledge is a resource to be shared regardless of which individual scientists produced which particular bits of knowledge
- Universalism - the important issue for scientists is the content of claims about the phenomena being studied, not the particulars about the people making those claims
- Disinterestedness - scientific research is done to advance science, not personal interests
- Organized scepticism - scientific claims should be exposed to critical scrutiny before being accepted

Pada tahun 2014, Para Menteri Ilmu Pengetahuan dari semua bangsa di OECD menandatangani sebuah deklarasi yang secara esensi menyatakan bahwa seluruh arsip data yang didanai dari public harus tersedia untuk umum. Berdasarkan permintaan dan diskusi yang intensif dengan lembaga-lembaga yang memproduksi data di Negara anggota, pada tahun 2007 OECD menerbitkan OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding sebagai rekomendasi hukum lunak (soft law).[18]

A. Apa Manfaat dari Data Terbuka?

- Kontrol transparansi dan demokratis
- Partisipasi
- Pemberdayaan diri
- Peningkatan efektivitas dari pelayanan pemerintah
- Pengukuran dampak kebijakan

B. Contoh Database Terbuka

- European Commission's Open Data Portal → **https://data.europa.eu/euodp/en/home**
- World Bank's Open Data Catalog → **https://data.worldbank.org**
- United Nations → **http://data.un.org**
- OECD's States of Fragility → **http://www3.compareyourcountry.org/states-of-fragility/overview/0/**
- IMF's Data → **https://www.imf.org/en/Data**
- International Accountability Project's Early Warning System → **https://ews.rightsindevelopment.org**
- Institute of Environmental Science and Technology's Environmental Justice Atlas → **https://ejatlas.org**
- Publish What You Fund's Aid Transparency Index → **https://www.publishwhatyoufund.org/the-index/2020/**
- Reality of Aid's CSO Aid Observatorio → **https://realityofaid.org/aid-observatorio/**

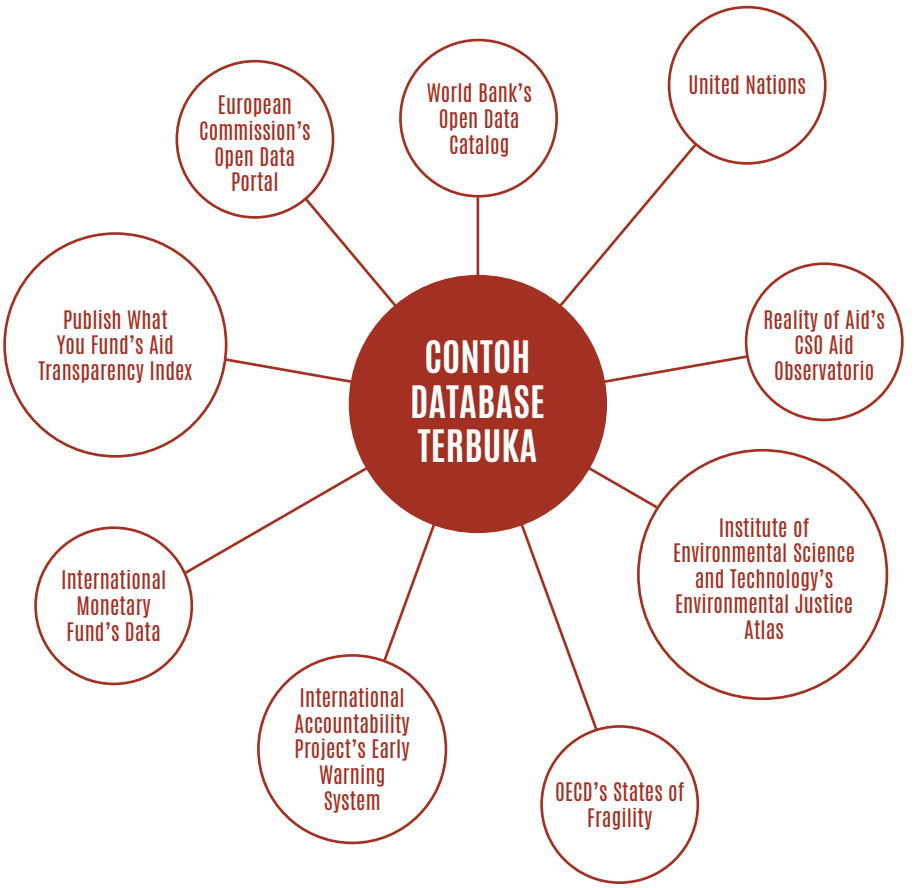

[18] Compared to "hard laws", "soft laws" are principles, declarations, and agreements that are not legally binding/cannot be enforced before a court.

C. Apa itu IATI?

International Aid Transparency Initiative (IATI) adalah inisiatif multi-stakeholder sukarela yang berusaha meningkatkan transparansi bantuan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menangani kemiskinan. IATI menggandeng donor dan negara berkembang serta OMS yang berkomitmen untuk bekerja bersama dalam meningkatkan transparansi bantuan.

IATI diluncurkan pada FTT Ketiga mengenai Efektivitas Bantuan di Akra tahun 2008 dan secara khusus didesain untuk mendukung donor dalam menentukan komitmen terhadap transparansi seperti yang diatur dalam Accra Agenda for Action sebagai berikut:

- Donor akan memberikan informasi tentang volume, alokasi dan, apabila tersedia, hasil belanja pembangunan secara detail dan tepat waktu untuk memungkinkan anggaran, akuntansi, dan audit yang lebih akurat oleh negara berkembang.
- Donor dan negara berkembang akan secara teratur mempublikasikan semua kondisi yang terkait dengan proyek/ program dalam database IATI.
- Donor akan memberikan informasi penuh dan tepat waktu pada komitmen tahunan dan pencairan aktual sehingga negara berkembang berada pada posisi merekam semua aliran bantuan dalam sistem estimasi anggaran dan akuntansi mereka secara akurat.
- Donor akan memberikan informasi pengeluaran bergulir tiga sampai lima tahun ke depan secara teratur dan tepat waktu dan/atau rencana implementasi, dengan setidaknya alokasi sumber indikatif bila memungkinkan sehingga negara berkembang bisa mengintegrasikannya ke dalam rencana jangka menengah dan kerangka kerja ekonomi makro. Donor akan mengatasi berbagai hambatan untuk menyediakan informasi semacamnya.

Menjelang FTT Keempat mengenai Efektivitas Bantuan di Busan, IATI berkontribusi terhadap Building Block mengenai Transparansi. BPd menyertakan referensi khusus untuk IATI, berkomitmen kepada semua yang mendukungnya untuk:

> *Menerapkan standar umum dan terbuka untuk publikasi elektronik dengan tepat waktu, komprehensif dan berwawasan masa depan tentang sumber daya yang tersedia melalui kerja sama pembangunan, mempertimbangkan laporan statistik OECD DAC dan upaya pelengkap dari inisiatif transparansi bantuan internasional dan lainnya. Standar ini harus sesuai dengan kebutuhan negara berkembang dan aktor non-negara, konsisten dengan persyaratan nasional. Kita akan menyetujui standar, dan menerbitkan jadwal respektif kita untuk dilaksanakan pada bulan Desember 2012 dengan tujuan penerapannya secara penuh di bulan Desember 2015.*

III. Apa itu Pengelolaan Data?

Konsep "pengelolaan data" muncul di tahun 1980-an sebagai teknologi yang beralih dari proses berurutan (kartu dulu, lalu merekam) ke proses akses acak (random). Berdasarkan Badan Pengelolaan Data Pengetahuan, "pengelolaan data adalah perkembangan, eksekusi dan supervisi rencana, kebijakan, serta program dan praktik yang mengontrol, melindungi, menyampaikan dan meningkatkan nilai data dan aset informasi."

Pengelolaan data adalah proses administratif dimana data yang diperlukan diperoleh, divalidasi, disimpan, dilindungi, dan diproses, serta aksesibilitas, reliabilitas, dan ketepatan waktunya dipastikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna data. Banyak orang berpikir bahwa pengelolaan data sama dengan database. Istilah database sering dirujuk pada kumpulan data – mungkin berbentuk spreadsheet/kolom, bahkan bisa dalam bentuk kartu indeks. Tujuan umum dari sistem pengelolaan adalah sistem yang didesain untuk memberikan definisi, kreasi, kueri, pembaruan, dan administrasi database. Pengelolaan database kadang bekerja dengan lebih dari satu database dengan satu aplikasi kerja

A. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Data

01 Data adalah aset

Data adalah aset utama OMS. Rasional dibalik prinsip ini adalah sumber organisasional yang tersedia - sumber tersebut memiliki nilai real yang bisa diukur. Lebih sederhana, tujuan data adalah untuk membantu membuat keputusan. Data yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu dan akurat.

02 Data dibagi

Data penting untuk menjalankan kewajiban OMS. Data harus dibagi karena akses terhadap data akurat penting untuk memperbaiki kualitas dan efisiensi pembuatan keputusan organisasional. Lebih mudah menyimpan data yang akurat dan tepat waktu dalam satu aplikasi, dan kemudian membaginya, daripada menyimpan duplikasi data dalam banyak aplikasi.

03 Data mudah diakses

Akses yang luas terhadap data memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini mampu merespon permintaan informasi dan penyaluran jasa. Lebih jauh, akses luas memastikan program pembangunan berkontirbusi terhadap pengurangan kemiskinan

04 Data transparan

Data terbuka memberikan pondasi untuk membangun akuntabilitas lembaga publik dan kolaborasi dengan semua jenis stakeholder.[19] Laporan data publik terkait efektivitas pembangunan mempromosikan pelayanan dengan kualitas yang lebih tinggi dan lebih efisien, partisipasi warga masyarakat, dan akuntabilitas stakeholder.

05 Data bisa diandalkan

Ini berarti bahwa data itu akurat. Akurasi berarti memungkinkan data menggambarkan kebenaran. Alat statistik meningkatkan akurasi dan keandalan data.

06 Kualitas Data cocok untuk semua tujuan

Kualitas data bisa diterima dan memenuhi kebutuhan atau tujuan OMS dalam advokasi terhadap efektivitas pembangunan.

07 Data patuh terhadap hukum dan regulasi

Proses pengelolaan informasi organisasional sesuai dengan semua hukum, kebijakan, dan regulasi yang relevan.

08 Data aman

Data dapat dipercaya dan dilindungi dari akses yang tidak sah, baik berbahaya, curang atau salah. Sharing terbuka informasi harus menyeimbangi kebutuhan untuk membatasi ketersediaan informasi yang rahasia, paten, dan sensitif. Informasi pra-keputusan (sedang dalam proses) harus dilindungi untuk menghindari spekulasi yang tidak beralasan, salah tafsir, dan penggunaan yang tidak tepat.

09 Ada kosakata umum dan definisi data

Data didefinisikan secara konsisten dan definisinya harus dipahami oleh semua stakeholder. Ini harus diperhatikan untuk memungkinkan berbagi data. Kosakata umum akan menjembatani komunikasi dan memungkinkan dialog antar stakeholder.

10 Pengelolaan data adalah urusan setiap orang

Semua agen pemerintah dan OMS bertanggungjawab untuk memelihara, memantau, dan mengelola data mereka dan mencari cara untuk mempertahankannya. Selain itu, OMS harus berpartisipasi dalam keputusan pengelolaan informasi dalam integritas data.

[19] http://www.aaronsw.com/

Melindungi Data dan Privasi

OMS dalam melakukan penelitian untuk Aid Observatorio mungkin menghadapi kebutuhan untuk menerapkan ukuran perlindungan data untuk menjaga privasi data personal untuk mencegah data disalahgunakan. Dalam konteks OMS melaksanakan penelitian rakyat, perlindungan data kadang dibutuhkan dalam hal identitas partisipan penelitian yang harus dijaga privasinya demi keamanan mereka. Data yang dikumpulkan harus diproses dan diatur agar partisipan individual tidak dikenali. Informasi personal harus disimpan di penyimpanan yang aman, atau dihancurkan setelah data yang relevan sudah diproses dan disusun.

Pentingnya privasi dan perlindungan data menjadi penting di luar lingkup penelitian ketika sejumlah data diproses dan dikendalikan oleh pemerintah, bisnis, dan bahkan masyarakat sipil, meningkat secara masif. Hal ini berimplikasi pada hak privasi dan kebebasan dari pengawasan yang digunakan untuk melawan pembela HAM di banyak negara.

Penggunaan media sosial secara luas menambah tantangan untuk privasi dan sekuriti data lebih lanjut. Selain masalah pada siapa yang mengontrol data yang dibagikan ke platform sosial media dan bagaimana data diproses dan digunakan untuk keuntungan korporasi, potensi media sosial digunakan untuk pengawasan dan pelacakan menjadi sorotan para aktivis. Sementara platform media sosial berguna untuk advokasi hak, di banyak negara, media sosial juga digunakan oleh entitas yang didanai dan terorganisir dengan baik untuk menyebarkan disinformasi dengan sengaja dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap persoalan sosial.

Menurut UNCTAD, 132 negara memiliki legislasi untuk menjaga keamanan dan perlindungan data sejak 2019. Sementara itu, Uni Eropa mulai untuk menerapkan General Data Protection Regulation (GDPR) sejak 2018. Jika hukum perlindungan data dianggap melindungi privasi, maka bisa juga digunakan untuk merusak kerja OMS dengan memaksakan persyaratan yang terlalu ketat sebagai syarat yang harus dipenuhi.

Penting untuk mengecek hukum perlindungan data yang bisa diterapkan di wilayah kerja anda. Menurut Privacy International, berikut adalah prinsip utama dalam perlindungan dan privasi data:

- **Adil, Sah, dan Transparan** – Data pribadi harus diproses dengan cara sah dan adil. Prinsip ini adalah kunci untuk mengatasi praktik-praktik seperti penjualan dan/atau transfer data pribadi yang diperoleh dengan cara curang.
- **Pembatasan Tujuan** – Semua data pribadi harus dikumpulkan untuk tujuan yang ditentukan, spesifk, dan sah. Proses selanjutnya pasti tidak sesuai dengan tujuan khusus pada awalnya (contoh: poin pengumpulan). Ini artinya bahwa ini tidak dapat diterima untuk menyatakan bahwa anda membutuhkan data seseorang untuk satu tujuan dan kemudian menggunakannya untuk hal lain tanpa pemberitahuan atau pembenaran.
- **Minimalisasi** – Minimalisasi data adalah konsep utama dalam perlindungan data, baik dari hak individu maupun perspektif keamanan informasi. Hanya data yang penting dan relevan untuk tujuan yang ditetapkan harus diproses. Setiap pengecualian untuk ini harus dibatasi dan ditetapkan dengan jelas.
- **Akurasi** – Data pribadi harus akurat sepanjang proses dan setiap langkah yang masuk akal harus diambil untuk memastikannya. Data pribadi harus mengikuti element berikut: akurat, lengkap, terbarui, dan terbatas (lihat nomor 5).
- **Batas Penyimpanan** – Data pribadi hanya boleh disimpan selama periode waktu yang diperlukan untuk tujuan pengumpulan dan penyimpanan data tersebut. Hal ini akan memperkuat dan memperjelas kewajiban penghapusan data pada akhir pemrosesan, yang seharusnya dimasukkan dalam ketentuan lain.
- **Integritas dan Kerahasiaan** – Data pribadi, pada saat istirahat dan transit, serta infrastruktur yang bisa diandalkan dalam pemrosesan, harus dilindungi dengan pengamanan keamanan untuk menghadapi resiko seperti akses, penggunaan dan penyingkapan yang melanggar hukum atau tidak sah, serta kehilangan,kerusakan, atau kehancuran data. Pengamanan keamanan bisa termasuk: ukuran fisik, contoh: kartu identitas dan pintu terkunci; ukuran organisasional, contoh: control akses; ukuran informasional, contoh: penyandian (mengubah teks kedalam bentuk kode) dan pemantauan ancaman; dan ukuran teknis, contoh: enkripsi, nama samaran, dan anonimisasi.
- **Akuntabilitas** – Sebuah kesatuan yang memproses data pribadi, dalam kapasitasnya sebagai prosesor atau pengontrol data, harus akuntabel dalam mematuhi standar, dan melakukan pengukuran yang mempengaruhi provisi/ ketentuan yang ada dalam hukum perlindungan data. Mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pemrosesan data harus mampu menunjukkan bagaimana mereka mematuhi legislasi perlindungan data, termasuk prinsip-prinsipnya, kewajibannya, dan hak individualnya.

Sesi 3.2.
Sumber Data

Manfaat Pembelajaran	Pada akhir sesi, peserta: 1. Mampu mengidentifikasi jenis informasi yang penting untuk kerja Aid Observatorio OMS 2. Familiar dengan sumber data yang terkait efektivitas dan kerja sama pembangunan
Bahan-bahan	• Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts • Proyektor LCD • Spidol
Proses	1. Menjelaskan hasil pembelajaran sesi 2. Mendiskusikan jenis informasi bantuan dan dimana bisa ditemukan..

I. Apa saja jenis informasi bantuan?

1. **Kerja Umum Bantuan.** Kebijakan umum adalah seperangkat sistem, prinsip panduan, hukum, atau seperangkat regulasi yang ditempatkan sebagai standar pada penggunaan bantuan dan implementasi serta penyampaiannya seperti yang ditentukan dan dirumuskan oleh pemerintah dan/atau perwakilannya. Termasuk rencana pembangunan negara yang sering digunakan sebagai dasar pemrograman untuk mengakses ODA. Negara juga bisa memiliki hukum yang terkait ODA seperti Philippine Official Development Assistance Act of 1996 yang mengecualikan ODA dari batas utang asing untuk memfasilitasi penyerapan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ODA.

2. **Anggaran.** Anggaran adalah dokumen yang merangkum pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan untuk kalender tertentu atau tahun fiskal. Anggaran nasional adalah proyeksi keuangan pemerintah yang resmi yang menyediakan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang termasuk bantuan (untuk negara donor) atau pelayanan utang (untuk negara penerima).

3. **Pengeluaran Umum.** Ini merujuk pada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu harus menggambarkan biaya yang diniatkan untuk memperbaiki kehidupan rakyat miskin dan kelompok marginal.di negara donor, bantuan pembangunan atau bantuan asing tercermin dalam anggarannya.

4. **Utang Asing.** Utang asing adalah jumlah uang yang dipinjam oleh sebuah negara kepada negara pemberi kredit. Negara memiliki kebijakan sendiri terhadap pelayanan utang. Pada beberapa kasus, persentase anggaran nasional tertentu secara otomatis ditujukan untuk pelayanan utang negara.

5. **Aliran Bantuan.** Aliran bantuan memberikan informasi mengenai volume uang yang dikirim dari negara donor kepada negara penerima. Informasi mengenai aliran bantuan yang disebarluaskan biasanya dibuat oleh negara donor. Biasanya berisi informasi seperti jumlah bantuan yang dicairkan berdasarkan prioritas tematik, negara penerima, implementer/kontraktor proyek yang terkait dengan penggunaan dana, dan lain sebagainya.

6. **Dampak Bantuan.** Merespon tekanan untuk mendemonstrasikan efektivitas ODA, IFI, pemerintah, dan OMS meluncurkan laporan tentang bagaimana bantuan telah atau belum berkontribusi terhadap tujuan pembangunan. Laporan mengenai pelanggaran HAM terkait ODA sering dirilis oleh OMS.

II. Sumber Data

Data yang terkait dengan efektivitas dan kerja sama pembangunan bisa diperoleh dari agen pemerintah (baik dari donor maupun negara penerima), akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Sumber yang paling utama dari data kerja sama pembangunan bisa diakses dari agen OECD dan PBB. Data dengan tema spesifik mengenai bantuan (contoh: pertanian, perempuan, kesehatan, dll) kadang tersedia di situs organisasi yang menangani isu semacam ini.

Contoh Sumber Data Mengenai Kerja Sama Dan Efektivitas Pembangunan

1. Situs Bantuan Terbuka (Open Aid)
   - Sweden → **https://openaid.se/about/**
   - Netherlands → **https://openaid.nl/**
   - Belgium → **https://openaid.be/en/about-site**
   - Denmark → **https://openaid.um.dk/en/**
   - Italy → **https://openaid.aics.gov.it/en/**
2. Bantuan/Pemantauan pengawas bantuan internasional dan kebijakan perdagangan Australia → **https://aidwatch.org.au/about/**
3. Laporan Pengawas Bantuan Concord tentang penggunaan dan kebijakan bantuan Uni Eropa → **https://concordeurope.org/tag/aidwatch/**
4. Data Inisiatif Pembangunan mengenai isu kemiskinan, keuangan pembangunan, keuangan swasta, dan bantuan kemanusiaan → **https://devinit.org/data/**
5. Database Donor Tracker mengenai donor dan pendanaan sektor pembangunan → **https://donortracker.org**

Kegiatan 2.

Merancang Sebuah Penelitian untuk Aid Observatorio OMS

Tujuan	Menerapkan kemampuan (skill) yang telah dipelajari dari sesi sebelumnya dalam melaksanakan penelitian rakyat untuk Aid Observatorio OMS.
Hasil yang diharapkan	Desain penelitian untuk Aid Observatorio OMS.
Bahan-bahan	• Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts • Proyektor LCD • Spidol

Lihat Lembar Kerja untuk Kegiatan 2.1 dan 2.2.

Instruksi Kegiatan 2.1.

1. Membuat pengelompokan peserta dengan tepat.
2. Mengidentifikasi topik penelitian terkait kerja sama pembangunan dan merumuskan masalah penelitian.
3. Merumuskan tujuan penelitian primer maupun sekunder.
4. Mengidentifikasi strategi dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian.
5. Mengidentifikasi kebutuhan data penelitian dan sumbernya.

Instruksi Kegiatan 2.2.

1. Membuat pengelompokan peserta dengan tepat.
2. Mengidentifikasi proyek pembangunan yang didanai oleh IFI/DFI yang ingin diteliti oleh kelompok.
3. Merumuskan tujuan penelitian primer dan sekunder yang akan merespon penilaian terhadap efektivitas bantuan pembangunan dari suatu proyek berdasarkan prinsip-prinsip EDC.
4. Mengidentifikasi kebutuhan data/variable yang dibutuhkan untuk mendukung penilaian dan darimana sumber data tersebut.
5. Mengidentifikasi metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data.
6. Mengidentifikasi metode yang akan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan.

Modul 04

DISEMINASI DAN POPULARISASI

Tujuan Modul:

1. Mendiskusikan pentingnya melakukan penyadaran dan advokasi publik dalam pemantauan bantuan.
2. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam melakukan advokasi untuk efektivitas pembangunan.

Alokasi Waktu: Minimal 3 Jam

Kesadaran publik mengenai informasi bantuan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog dan mendorong perubahan yang tepat. Memanfaatkan informasi bantuan dalam advokasi terhadap efektivitas pembangunan adalah hal yang penting dalam kerja Aid Observatorio OMS. Namun, untuk mempengaruhi kebijakan dan proyek, informasi bantuan perlu dipopularisasikan dan dapat diakses berdasarkan jenis audiens atau pemangku kepentingan yang berbeda-beda.

Modul ini menekankan pentingnya peran advokasi OMS terkait Aid Observatorio dan strategi dalam penyebarluasan dan popularisasi informasi bantuan dalam konteks advokasi.

Modul ini memiliki dua sesi dan satu kegiatan yang dibagi ke dalam dua bagian:

Sesi 4.1.	
Kerja Advokasi	mendiskusikan pentingnya advokasi dan merangkum tahapan dalam melakukan advokasi sebagai bagian dari kerja Aid Observatorio OMS.
Sesi 4.2.	
Metode dalam Melakukan Kerja Advokasi	menguraikan berbagai strategi dan alat yang dapat digunakan oleh OMS dalam mempopulerkan dan menyebarkan informasi bantuan sekaligus melakukan advokasi untuk efektivitas pembangunan.
Kegiatan 3.	
Menyusun Rencana Advokasi (Bagian A dan B)	peserta menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari sesi sebelumnya dalam membuat rencana advokasi sebagai bagian dari kerja Aid Observatorio OMS.

Sesi 4.1.
Kerja Advokasi

Manfaat Pembelajaran	Pada akhir sesi, peserta: 1. Memahami pentingnya efektivitas pembangunan dalam advokasi. 2. Memahami berbagai elemen kerja advokasi. 3. Membuat rencana advokasi untuk Aid Observatorio OMS.
Materials	• Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts • Proyektor LCD • Spidol
Proses	1. Menjelaskan manfaat pembelajaran. 2. Mendiskusikan proses kerja advokasi. 3. Menyiapkan aktivitas yang terpadu dalam sesi ini.

I. Pentingnya Advokasi untuk Efektivitas Pembangunan

Menurut David Brancdon[20], advokasi melibatkan orang, baik perseorangan atau kelompok yang rentan ataupun perwakilan yang disepakati, yang secara efektif memberi tekanan pada kasus dengan pihak yang berpengaruh, mengenai situasi yang mempengaruhi mereka secara langsung atau biasanya, mencoba untuk mencegah perubahan yang akan memperburuk situasi. Maksud dan hasil dari advokasi semacam itu harusnya dapat meningkatkan kekuatan individual dan kelompok – untuk membantu mereka agar merasa lebih percaya diri dan menjadi semangat untuk bertindak dalam rangka menciptakan perubahan. Untuk aktivis dan advokat/pembela efektivitas pembangunan, advokasi dilakukan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan praktik menuju keadilan sosial.

Dari Roma di tahun 2003 dan seperti yang dibuktikan di Busan tahun 2011, advokasi OMS di tingkat nasional dan internasional telah membantu pergeseran pembelajaran kerja sama pembangunan dari efektivitas bantuan ke pendekatan efektivitas pembangunan berbasis HAM. OMS harus tetap waspada dan memastikan para pemangku kepentingan memenuhi komitmen mereka terhadap kerja sama pembangunan yang efektif.

Advokasi terhadap efektivitas pembangunan membutuhkan realisasi rencana tindakan untuk mempengaruhi pembuat keputusan untuk bertindak dan melaksanakan reformasi yang akan memberi manfaat bagi pihak yang terpinggirkan dan rentan. Advokasi juga penting untuk memastikan bahwa ODA dan bentuk keuangan swasta dan publik lainnya mengikuti prinsip-prinsip efektivitas pembangunan.

[20] Wilks, T. (2012). Advocacy's Place Within Social Work Practice in Advocacy and Social Work Practice (chapter 1). Retrieved from https://books.google.com.ph/books?id=i5_nRZYNK2cC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

II. Lima Tahapan untuk Melaksanakan Kerja Advokasi

Advokasi, khususnya yang berkaitan dengan kemajuan martabat masyarakat, tidak boleh dihargai sebagai pendekatan yang berkembang pada pola linear. Harus ada aturan konstan untuk menyusun rencana dan strategi berdasarkan implementasi kerja advokasi sebelumnya. Agar advokasi menjadi efektif, advokasi harus dinamis dan berkembang.

Berikut adalah aspek fundamental dalam kerja advokasi yang mengartikulasikan proses advokasi efektivitas pembangunan dapat diimplementasikan.

Lima Tahapan untuk Melaksanakan Kerja Advokasi

- **01** Menentukan isu prioritas tentang bantuan dan kerja sama pembangunan.
- **02** Melaksanakan penelitian dan analisis.
- **03** Merencanakan advokasi bantuan dan efektivitas pembangunan.
- **04** Merealisasikan rencana advokasi dalam bentuk tindakan.
- **05** Memantaui, meninjau, dan mengevaluasi.

LANGKAH 1

Menentukan isu prioritas tentang bantuan dan kerja sama pembangunan.

Di tahap pertama ini, organisasi atau komunitas mengidentifikasi isu atau problem yang terkait dengan bantuan dan kerja sama pembangunan yang mempengaruhi organisasi atau komunitas mereka dan yang bisa diubah melalui advokasi. Sebuah isu atau masalah advokasi bisa diatasi jika terjadi perubahan dalam kebijakan dan hukum tertentu.[21]

Sebuah isu advokasi bisa diidentifikasi melalui alat yang beragam seperti pertemuan komunitas atau rapat dengan OMS dan pemangku kepentingan lainnya yang bekerja pada tema yang sama. Berikut adalah beberapa tips ketika memilih isu prioritas pada komunitas:

- **Gunakan analisis pohon-masalah (problem-tree).** Pohon masalah adalah metode visual yang membantu kelompok mengidentifikasi dimensi sebuah isu secara berbeda (cabang) dengan cara menentukan penyebabnya (akar) dan dampaknya (daun dan buah).
- **Ikuti pertanyaan panduan berikut sebagai pertimbangan.** Setelah melakukan analisis pohon masalah, tentukan problem mana yang bisa ditangani melalui advokasi dengan mengikuti pertanyaan berikut:
    - Bagaimana kaitan isu tersebut dengan bantuan dan efektivitas pembangunan?
    - Apakah ini adalah isu bantuan dan efektivitas pembangunan yang paling relevan dan tepat dalam komunitas atau organisasi anda?
    - Akan bekerja dengan isu berikut:
        - *mempromosikan prinsip efektivitas pembangunan?*
        - *menangani kebutuhan organisasi atau komunitas dan melindungi hak-hak mereka?*
        - *membantu memperkuat organisasi atau komunitas?*
        - *mengembangkan pemimpin dan aliansi baru?*

Itulah beberapa pertimbangan yang bisa diambil ketika memilih sebuah isu. Pertimbangan lainnya termasuk sumber yang dibutuhkan, jangka waktu, dan aksesibilitas ruang advokasi yang relevan.

LANGKAH 2

Melaksanakan penelitian dan analisis.

Penelitian rakyat membantu para advokat/pembela memahami isu advokasi mereka dengan lebih baik. Selain menyediakan data mengenai dampak dari masalah yang dipecahkan, penelitian dan analisis juga akan membantu dalam mengidentifikasi sumber yang dibutuhkan untuk advokasi: pemangku kepentingan, target advokasi, rekan potensial, dan penghambat, serta solusi yang mendukung terhadap masalah tersebut.

Pengumpulan data mengenai dampak dari masalah bisa dilaksanakan melalui survei, wawancara informan inti, dan FGD. Data dikumpulkan dari metode-metode yang bisa digunakan untuk menunjukkan gravitasi masalah, merumuskan pesan advokasi komunitas atau organisasi, dan menambah wawasan mengenai solusi atau rekomendasi yang mungkin dapat dieksplorasi dan diajukan dalam advokasi.

Salah satu metode untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yaitu melalui penggunaan matriks seperti di bawah ini. Matriks ini akan membantu organisasi atau komunitas menentukan siapa target advokasi dan rekan serta penghambat/pengganggu yang potensial.

[21] https://www.tearfund.org/en/about_us/what_we_do_and_where/issues/advocacy/

Tipe Pemangku Kepentingan	Siapa? (individu/ organisasi/ lembaga)	Kontak Person Utama	Alasan/ mengapa masalah tersebut penting bagi mereka	Posisi masalah	Tingkat pengaruh (+ sampai +++ atau - sampai ---)
Terdampak secara Langsung					
Organisasi Masyarakat	X mewakili masyarakat adat yang hidup di sepanjang sungai Y.	Nama	Pemindahan karena proyek bendungan	Hentikan proyek bendungan	++
Pemerintah					
Sektor Umum	Kantor Walikota	Nama	Salah seorang anggota keluarga Walikota adalah pengembang bendungan	Mengizinkan pembangunan proyek bendungan	---
Sektor Umum	Kantor Lingkungan Daerah	Nama	Mendukung pelestarian habitat alam liar di ekosistem sungai	Tidak menerbitkan sertifikat pemenuhan lingkungan untuk proyek bendungan	++
Advokat					
Masyarakat Sipil	OMS X untuk hak masyarakat adat	Nama	Advokat untuk hak-hak masyarakat adat terhadap hak teritorisnya.	Melawan perampasan tanah	+++

LANGKAH 3

Membuat rencana advokasi tentang bantuan dan efektivitas pembangunan.

Sebuah rencana advokasi adalah kerangka kerja yang menggambarkan kebijakan dan praktik yang organisasi atau komunitas akan ubah, dan bagaimana perubahan itu akan terjadi. Berikut adalah unsur dasar dalam menyusun rencana advokasi:

- Masalah/isu
- Dampak dan penyebab masalah
- Tujuan rencana advokasi
- Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan
- Sumber yang diperlukan
- Penanggung jawab kegiatan
- Pemangku kepentingan utama yang ditetapkan
- Formulasi pesan advokasi untuk pemangku kepentingan utama

Merumuskan Tujuan

Ketika merumuskan tujuan, selalu pastikan SMART - Specific, Measureable, Attainable, Relevant, and Time-bound (spesifik, dapat diukur, bisa dicapai, relevan, dan dibatasi waktu). Kegiatan harus berkontribusi dalam pencapaian tujuan rencana advokasi. Untuk melaksanakan kegiatan, sumber dan penanggungjawab kegiatan untuk pelaksanaannya harus ditentukan.

Menentukan Audiens dan Mengembangkan Pesan Utama

Sebelum advokasi dilaksanakan, penting untuk menentukan audiens – kepada siapa isi advokasi disampaikan. Advokasi harus memiliki audiens sasaran yang khusus, jika tidak, maka advokasi akan cenderung berlebihan dan tidak memiliki arah dan tujuan. Audiens bisa diketahui dengan menanyakan pertanyaan berikut:

- Siapa agen perubahan untuk advokasi?
- Apa yang mereka ketahui mengenai advokasi?

Sementara itu, pesan advokasi harus dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah. Terkadang disebut tuntutan atau permintaan utama. Bisa jadi ada pesan umum dan ada pesan yang bisa dirumuskan secara khusus untuk tiap audiens sasaran atau pemangku kepentingan. Sebagai contoh, pesan untuk pejabat pemerintah mengenai sengketa tanah akan menuntut pembuat kebijakan untuk mempromosikan atau mencabut aturan tertentu, sementara pesan untuk sesama anggota komunitas yang terdampak oleh kebijakan yang sama akan berkonsentrasi untuk menekan pembuat kebijakan.

Contoh Pesan Advokasi

Kutipan dari Pernyataan Konstituensi Perempuan CPDE pada RTT Kedua di Nairobi (2017)

Meminta Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Lainnya di GPEDC

- Memperdalam komitmen Paris, Akra, dan Busan terhadap kesetaraan gender dan HAM dan mempromosikan arsitektur kerja sama pembangunan yang setara dan adil.
- Memperkuat efektivitas pembangunan melalui praktik berdasarkan standar HAM, termasuk standar hak perempuan.
- Kami menuntut kemitraan inklusif untuk pembangunan yang efektif memastikan keadilan pembangunan dan mengakui serta menghargai kerja reproduksi dan perawatan, serta melindungi dan mempromosikan pekerjaan yang layak dan berbagai bentuk mata pencaharian yang berkelanjutan dan memastikan hak perempuan untuk memiliki dan menguasai tanah, rumah, teknologi baru, dan sumber produktif lainnya. Kerja sama pembangunan ini mengakui perawatan sebagai barang publik dan hak dasar. Kerja sama pembangunan harus mengakui bahwa negara, termasuk negara yang dikelilingi daratan dan pulau-pulau kecil, dalam situasi konflik dan rentan menghadapi dampak perubahan iklim dan konflik bersenjata yang diferensial dan tidak proporsional terhadap kehidupan dan hak perempuan dan remaja perempuan.

Kutipan dari Tanggapan Balik Reality of Aid terhadap Ringkasan Draf TOSSD DAC

Di tingkat nasional, donor dan pemerintah harus memfasilitasi proses kebijakan demokratis melalui cara berikut*:

- Membangun ruang yang terlembagakan secara permanen untuk dialog antar pemangku kepentingan mengenai kebjiakan pembangunan
- Memfasilitasi keterkaitan inklusif berbagai aktor masyarakat sipil yang secara khusus mewakili organisasi berbasis akar rumput, antara lain masyarakat adat, serta perempuan dan anak-anak.
- Membangun akses terbuka dan tepat waktu untuk informasi dan mekanisme akuntabilitas serta proses yang transparan yang dilindungi oleh legislasi.
- Menerapkan transparansi penuh untuk dokumen pendanaan dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran.
- Membangun proses partisipasi secara penuh dan inklusif dari tingkat negara ke tingkat global untuk bantuan dalam mencapai tujuan pembangunan di tingkat negara.
- Mendukung kapasitas OMS untuk memudahkan mereka berpartisipasi secara efektif dalam proses kebijakan.

**Ini adalah rekomendasi dari "An Enabling Environment for Civil Society Organizations: A Synthesis of Evidence of Progress sejak Busan" yang disampaikan oleh Kelompok Kerja CPDE (CSO Partnership for Development Effectiveness) untuk CSO Enabling Environment pada bulan Oktober 2013 kepada GPEDC.*

LANGKAH 4

Terapkan rencana advokasi ke dalam bentuk aksi.

Kegiatan yang berbeda dilakukan untuk menjalankan rencana advokasi (lihat Sesi 4.2). Melobi dan mengkampanyekan dua pendekatan berbeda dalam kerja advokasi. Hampir sepanjang waktu, kombinasi dua pendekatan ini digunakan, tergantung dari jenis masalah advokasi dan juga jenis pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerja advokasi.

- **Melobi pejabat pemerintah dan ruang kebijakan yang relevan.** Lobi termasuk komunikasi langsung dengan pembuat kebijakan yang memiliki kuasa langsung terhadap analisis dan perubahan kebijakan atau kepada pihak yang berpengaruh yang memiliki sumber atau koneksi yang kuat dengan pembuat kebijakan. Ini dapat dilakukan melalui cara berikut: telepon, mengirim surat dan pernyataan tertulis, menghadiri rapat antar pemerintah dan membuat intervensi, dan rapat bersama pejabat pemerintah yang relevan.
- **Kampanye dan Mobilisasi.** Ini berkaitan dengan memaksimalkan jangkauan luas platform dan merancang tahapan untuk mengoptimalkan tiap wadah efektivitas. Kampanye dan mobilisasi bisa dilakukan melalui beragam cara, misalnya, distribusi materi pendidikan, melakukan aksi protes, membuka forum, workshop, konser, pameran, atau kegiatan online – pada dasarnya segala kegiatan yang mengumpulkan massa untuk mendorong perubahan dalam kebijakan. Kegiatan tersebut bergantung pada tujuan, kesediaan sumber daya, dan konteks advokasi.

LANGKAH 5

Memantau, meninjau, dan mengevaluasi.

Memantau, meninjau, dan mengevaluasi adalah tiga jenis proses yang berbeda yang memungkinkan organisasi atau komunitas bisa mengakses efektivitas atau dampak dari pelaksanaan rencana advokasi mereka. Ada 3 proses berbeda yang dilakukan dalam siklus rencana advokasi.

- **Pemantauan** adalah pengumpulan data yang sistematis selama durasi rencana advokasi. Proses ini mengumpulkan informasi yang akan menjadi dasar untuk melacak perkembangan pelaksanaan, dan memungkinkan organisasi atau komunitas untuk mengidentifikasi isu yang harus diatasi sebagai rencana untuk bergerak. Pemantauan bergantung pada indikator yang ditentukan di awal. Indikator bisa termasuk pesan inti advokasi anda. Pemantauan bisa termasuk transkripsi wawancara dan berhubungan dengan audiens sasaran dan responnya. Termasuk juga dampaknya terhadap pendapat publik dengan mencatat paparan media di TV, radio, surat kabar, dan platform online. Evaluasi, di sisi lain, mengukur capaian target dan tujuan.
- **Peninjauan** dilakukan secara teratur sepanjang durasi rencana menggunakan data yang dikumpul dari pemantauan. Meninjau mencakup penilaian periodik (mingguan, bulanan, triwulan atau tahunan - tergantung durasi rencana) untuk mengecek apakah proyek sesuai jalurnya dan untuk menangkap pelajaran yang dapat mempengaruhi pelaksanaan rencana terkini, dan juga untuk membentuk rencana ke depan.
- **Evaluasi** dilakukan di pertengahan dan di akhir rencana atau proyek advokasi untuk menganalisa yang telah dilakukan, menilai efektivitasnya dalam menghasilkan perubahan, dan memperoleh pelajaran strategis. Evaluasi bisa melibatkan mitra advokasi dari luar komunitas atau organisasi pendukung.

Lihat Lampiran B untuk contoh matriks pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan 3.1.

Menyusun Rencana Advokasi untuk Hasil Penelitian Aid Observatorio OMS (Bagian A)

Tujuan	Menerapkan informasi yang telah dipelajari di sesi sebelumnya untuk membuat rencana advokasi untuk efektivitas bantuan pembangunan.
Hasil yang diharapkan	Sebuah konsep rencana advokasi.
Bahan-bahan	• Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts • Proyektor LCD • Spidol

Catatan untuk Instruktur:

Kegiatan ini dapat membangun output grup di Kegiatan 2.1.

Lihat Lembar Kerja untuk Kegiatan 3.1.

Instruksi Kegiatan 3.1.

1. Membuat pengelompokan peserta secara tepat.
2. Mengidentifikasi isu bantuan dan efektivitas pembangunan.
3. Mengidentifikasi sebab dan akibat yang menyertai isu tersebut.
4. Menuliskan tujuan rencana advokasi.
5. Mengidentifikasi pemangku kepentingan/audiens utama yang harus dilibatkan.
6. Merumuskan pesan advokasi untuk pemangku kepentingan utama.

Sesi 4.2.

Metode dalam Melaksanakan Kerja Advokasi

Manfaat Pembelajaran	Pada akhir sesi, peserta: 1. Memahami metode berbeda dalam melaksanakan kerja advokasi. 2. Bisa menerapkan dasar metode-metode ini dalam kerja advokasi.mereka.
Bahan-bahan	• Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts • Proyektor LCD • Spidol
Proses	1. Menjelaskan manfaat pembelajaran. 2. Mendiskusikan metode-metode kerja advokasi. 3. Menyiapkan kegiatan yang terkait dengan sesi ini.

Catatan untuk Instruktur:

Link untuk contoh akan diberikan di akhir tiap item. Tapi, akan lebih baik untuk mencari contoh yang akan lebih relevan atau tepat untuk konteks pelatihan.

Komponen substansial dari pelaksanaan advokasi adalah mempengaruhi audiens sasaran dengan cara memastikan bahwa pesan advokasi sampai kepada sasaran. Sesi ini akan menggambarkan metode yang paling umum digunakan dalam menjangkau audiens sasaran ketika melakukan advokasi.

1. **Ringkasan Kebijakan (Policy Brief).** Dikenal juga sebagai laporan kebijakan (policy report), adalah dokumen ringkas yang menyimpulkan poin utama dari masalah kebijakan tertentu, bersama dengan rekomendasi kebijakan sebagai cara terbaik menangani masalah. Untuk Aid Observatorio, policy brief bisa menjadi alat utama untuk menyajikan temuan penelitian dan rekomendasi untuk audiens yang tidak dikhususkan dalam Bahasa yang sederhana, dan bisa digunakan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan audiens terkait lainnya.

Tidak ada format baku untuk policy brief, biasanya disusun menurut garis besar berikut:

- Judul
- Ringkasan Eksekutif
- Kata Pengantar
- Isi (diskusi masalah kebijakan dan/atau temuan penelitian utama)
- Rekomendasi Kebijakan
- Kesimpulan

Sebagai tambahan, policy brief bisa terdiri dari kotak dan sidebar, tabel, grafik, dan foto. Referensi dan sambutan juga harus dimasukkan.

Panjangnya tidak ditentukan, policy brief biasanya dari rentang 700 sampai 3.000 kata. Panjangnya akan tergantung dari masalah kebijakan serta jenis calon audiens. Tapi ingat bahwa secara umum, policy brief harus:

- Memberikan latar belakang dan konteks yang cukup bagi pembaca untuk memahami masalah.
- Meyakinkan pembaca bahwa masalah tersebut harus segera ditangani.
- Memberikan informasi mengenai alternatif.
- Menstimulasi pembaca untuk membuat keputusan.

Contoh Policy Brief

- National financing for development: Corporatised or democratised process? → **https://bit.ly/2zBKiHk**
- Development financing today: Serving whose interest? → **https://bit.ly/2YBJvP6**
- The ADB's Strategy 2030: Repackaging Neoliberalism? → **https://bit.ly/3d2OoWr**

2. **Makalah Posisi (Position Paper).** Position paper adalah pernyataan tertulis yang detail mengartikulasikan pandangan, analisis, dan/atau kebijakan organisasi. Biasanya tertulis dalam format esai, sebagai reaksi atas masalah yang muncul. Position paper biasanya berisi:

- Kata pengantar dan latar belakang masalah yang ditangani.
- Analisis dan posisi organisasi terhadap masalah.
- Kesimpulan, yang bisa berisi ajakan untuk bertindak dan rekomendasi.

Contoh Position Papers

- Statement on the First Draft by Southern CSO Alliance on South-South Cooperation → **https://realityofaid.org/statement-on-the-first-draft-of-the-bapa40-outcome-document-southern-cso-alliance-on-south-south-cooperation/**
- Statement for the OECD DAC High Level Meeting On Modernising Reporting for Official Development Assistance → **https://realityofaid.org/statementfor-the-oecd-dac-high-level-meeting-on-modernising-reporting-for-official-development-assistance/**

3. **Surat Petisi (Petition Letter).** Surat petisi adalah permintaan tertulis secara formal untuk tindakan tertentu, biasanya dialamatkan ke penguasa/pemerintah. Dalam konteks advokasi untuk efektivitas pembangunan, petisi bisa ditulis untuk banyak tujuan, contohnya: memudahkan OMS dan anggota komunitas yang terdampak untuk menjadi bagian dari mekanisme pembuatan keputusan dalam proyek pembangunan, untuk menghentikan proyek pembangunan tertentu, untuk merilis dokumen mengenai bantuan yang diterima oleh pemerintah, atau untuk menghentikan donor dari pendanaan kegiatan pemerintah yang melanggar HAM. Sebuah petisi biasanya disertakan tanda tangantanda -tangan untuk menambah bobot tuntutan.

   Komponen dasar dalam sebuah petisi antara lain:

   - Kop Surat Organisasi
   - Judul Petisi
   - Tanggal
   - Organisasi Penerima/Nama Penerima
   - Alamat Penerima
   - Paragraf 1 - rincian petisi
   - Paragraf 2 - alasan pembuatan petisi
   - Paragraf 3 - tuntutan aksi
   - Kata Penutup
   - Daftar Tanda Tangan

   Surat petisi bisa ditandatangani baik secara online maupun offline. Membubuhkan tanda tangan pada surat petisi dibuat lebih mudah melalui situs seperti change.org dan avaaz.org.

Contoh Petition Letters

- Stop Mapithel Dam construction NOW! → **https://bit.ly/2zwDB9i**
- Letter to Prime Minister Shri Narendra Modi: Uphold the Special Provision Article 371C in the Constitution of India with regards to the Construction of Mapithel Dam (Thoubal Multipurpose Project) in the State of Manipur → **https://bit.ly/2ULHoXL**

4. **Menandatangani Pernyataan (Sign-on Statements)**, dengan kata lain, kurang formal dan tidak dialamatkan kepada penguasa. Isinya adalah pernyataan yang mengungkapkan kepercayaan, posisi, dan/atau seruan aksi pada masalah publik tertentu dimana organisasi atau individu menunjukkan dukungan mereka dengan membubuhkan tanda tangan.

Contoh Sign-on Statements

- System overhaul, not makeover! → **https://bit.ly/37x973O**
- Reclaim the Climate Agenda amid Corporate Plunder and Repression → **https://bit.ly/2XZZCXB**

5. **Pernyataan Solidaritas (Solidarity Statements).** Pernyataan solidaritas digunakan untuk menyampaikan dukungan atau simpati secara umum pada aksi atau sebab. Ini adalah alat komunikasi yang penting untuk menyoroti masalah yang tidak diliput oleh media, dan mengumpulkan dukungan dari individu, komunitas, dan organisasi yang berbeda.

Contoh Solidarity Statements

- CPDE Statement of Support for Co-chair Beverly Longid → **https://www.change.org/p/government-of-the-philippines-latest-updates-cpde-statement-of-support-for-co-chair-beverly-longid**
- In responding to the COVID-19 pandemic, we must build solidarity and pay special attention to those farthest behind → **https://bit.ly/3d4sCBC**
- CPDG Statement on the Proposed Anti-Terrorism Act of 2020 → **https://www.facebook.com/notes/council-for-peoples-development-and-governance/proposed-anti-terror-law-is-an-attack-on-civic-space-and-democracy/546292496027723/**

6. **Workshop Kebijakan.** Workshop kebijakan adalah kegiatan terorganisir dimana kebijakan publik diuji, dievaluasi, dan proposal dibuat. Partisipan bervariasi tergantung pada tujuan spesifik dari workshop. Dalam konteks kerja Reality of Aid (RoA), biasanya melaksanakan workshop kebijakan untuk masyarakat sipil, profesional kebijakan, advokat, dan komunitas yang terdampak dalam persiapan untuk melibatkan pembuat keputusan di pemerintahan, negara donor, dan lembaga multilateral terhadap masalah bantuan dan efektivitas pembangunan.

7. **Dialog Kebijakan.** Istilah dialog kebijakan bisa bermakna kegiatan yang terstruktur dimana pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan bertemu untuk mendiskusikan dan mempengaruhi kebijakan publik, atau proses menyeluruh dari perkembangan kebijakan oleh interaksi aktor kebijakan; apakah melalui kegiatan yang terstruktur secara formal, konsultasi dan percakapan informal, pertukaran email, pengajuan position paper dan surat; dengan tujuan akhir menginformasikan dan mempengaruhi kebijakan.

   Jika definisi spesifik dan lebih luas diterapkan, dialog kebijakan adalah komponen penting dari proses pembuatan kebijakan karena memfasilitasi kepemilikan oleh pemangku kepentingan serta akuntabilitas dan transparansi yang membawa ke pemantauan dan pelacakan hasil yang lebih baik. Namun, efektivitas dialog kebijakan bergantung pada partisipasi demokratis OMS dan organisasi rakyat dalam pemerintahan. Ini berarti bahwa dialog kebijakan tidak boleh hanya sekadar asal-asalan dan tokenistic. Dialog kebijakan harus mampu memperkuat hak dan kapasitas OMS dan organisasi rakyat untuk secara aktif berpartisipasi dalam pembuatan keputusan mengenai kebijakan yang mempengaruhinya.

8. **Materi/Kegiatan Budaya.** Meskipun tidak umum digunakan dalam advokasi untuk efektivitas pembangunan, materi/kegiatan budaya mempunyai potensi untuk mengumpulkan dukungan publik untuk efektivitas pembangunan melalui cara yang kreatif. Sebagai contoh, lagu, puisi, pameran seni, pemutaran film, teater publik, sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan simpati publik kepada pihak yang terdampak oleh proyek bantuan melalui bentuk ekspresi yang kreatif yang merayakan budaya dan identitas masyarakat.

Contoh Materi/Kegiatan Budaya untuk Advokasi

- One Billion Rising vs Development Aggression in Panay → **https://www.onebillionrising.org/15630/panay-guimaras-philippines-rising-revolution/**
- Results and Highlights of the 27th Cordillera Day Celebration: Live out the glorious history of our struggle! Fight for land, life and honor! → **https://cpaphils.org/campaigns/CD2011ResultsandHighlights_Final.pdf**
- Kari-Oca II, the Indigenous People's Conference at Rio +20 → **https://malocacommunities.org/2012/09/25/june-2012-kari-oca-ii-indigenous-peoples-conference-at-rio-20/**

9. **Mobilisasi.** Mobilisasi, demonstrasi, aksi protes, secara lisan adalah sebuah kegiatan dimana kelompok berkumpul di tempat, tanggal, dan waktu yang khusus untuk mengungkapkan dukungan atau ketidaksetujuan mereka terhadap isu tertentu. Secara tradisional,

Contoh Mobilisasi

- Mobilization vs Mapithel Dam → **http://e-pao.net/GP.asp?src=38..130415.apr15**
- Global Day of Action Against Shrinking Civic Spaces → **https://csopartnership.org/2019/12/cso-platform-cpde-leads-global-day-of-action-against-shrinking-civic-spaces/**
- Worldwide Protest Against Implementation of Dams in Sikkim → **https://www.ipmsdl.org/events/join-the-worldwide-protest-against-implementation-of-dams-in-sikkim/?fbclid=IwAR3sXIrpyRxYCkoNxYF98w9uSv7yQS8-14yRlLl-nWH5qhLkRTysZzi0Q0g**

mobilisasi dilakukan secara fisik. Dengan adanya teknologi digital, platform media sosial juga menyediakan alat lain untuk menyampaikan aksi protes ketika kelompok tidak bisa datang bersama secara fisik (rapat media sosial, hari aksi blog, dan lainnya).

10. Perangkat Advokasi Online

Media digital atau alat online memudahkan advokasi efektivitas pembangunan untuk mencapai audiens yang lebih luas di tingkat nasional dan global. Persyaratan utama untuk media digital adalah akses terhadap alat digital, listrik, dan internet. Pertimbangkan persyaratan ini dulu kemudian target audiens sebelum menggunakan media digital untuk advokasi.

- **Webinar** adalah versi online dari workshop secara fisik, konferensi atau rapat. Sebagai pengganti rapat secara fisik organisasi, pembicara, dan partisipan berkumpul secara online melalui platform berbasis jaringan.
- **Visualisasi Data** adalah representasi grafis dari data dan informasi. Melalui penggunaan gambar seperti chart, grafik, dan peta, visualisasi data bisa membantu pembaca memahami pola dan hubungan antar data dengan mudah. Dalam konteks bantuan dan efektivitas pembangunan, visualisasi data bisa sangat membantu, sebagai contoh, dalam membandingkan bantuan aktual yang diberikan versus komitmen, atau jumlah bantuan yang diberikan kepada prioritas dibandingkan dengan prioritas lainnya.
- **Platform Media Sosial** juga menjadi cukup popular untuk advokasi online. Melaui platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, advokat untuk efektivitas pembangunan telah menjangkau audiens yang lebih luas. Beragam konten bisa digunakan untuk advokasi media sosial, termasuk visualisasi data, infografik, fotostori, video, dan bahkan meme. Platform media sosial juga bisa digunakan untuk membagi link yang mengarahkan audiens ke situs para advokat/pembela, pernyataan, atau menandatangani kampanye.

Contoh Visualisasi Data

- Where US foreign Aid is Going → **https://bit.ly/3fsT8Gt**
- Charting US Foreign Aid by Country → **https://bit.ly/30P7bSG**
- Military Spending Graphics 2019 → **https://bit.ly/37BdTNm**

Contoh Konten Media Digital

- Infographics: Reality of Aid Report 2018 → **https://realityofaid.org/infographics/**
- Photo Stories: Humans of New York → **https://bit.ly/3eb4zCm**
- Meme: Trickle down Economics → **https://bit.ly/2YGixpv**
- Videos: IBON International's intervention at DCF 2018 → **https://bit.ly/2YKNSam**

Kampanye media sosial adalah upaya terkoordinasi untuk mendukung advokasi melalui sedikitnya satu platform media sosial. Sebagai contoh, penyelenggara hari aksi global selalu mendorong partisipan menggunakan platform media sosial mereka dalam membagikan kegiatan atau aksi mereka menggunakan tagar kegiatan (#). Jika kampanye media sosial berguna, cara ini akan lebih efektif jika diubah ke dalam bentuk offline.

Ketika merancang kampanye media sosial, ingat untuk:

- **Menentukan tujuan SMART untuk kampanye:**
  - **Spesifik:** "Kita secara khusus telah mengidentifikasi X sebagai platform media sosial kita dan Y sebagai metriknya."
  - **Measurable (dapat Diukur):** "Jangkauan respon bisa diukur dari analisis/wawasan."
  - **Achievable (bisa Dicapai):** "Kita bertujuan untuk mencapai peningkatan X% jangkauan kita."

- **Relevan:** "Tujuan kita akan memiliki dampak yang kuat dari seluruh kehadiran kita di media sosial."
- **Time-bound (terikat waktu):** "Target harus dicapai di akhir triwulan tahun X."

- Menentukan jenis konten yang akan dihasilkan untuk audiens dan platform yang akan digunakan.
- Membuat jadwal/kalender konten.
- Membuat instruksi sederhana tentang bagaiman organisasi/individu bisa mengikuti kampanye.
- Memantau postingan dan respon komentar.
- Mengumpulkan data pada jumlah postingan, share, dan tanggapan untuk menguji apakah kampanye media sosial berkontribusi terhadap capaian tujuan anda.

Contoh Kampanye Media Sosial

- Global Day of Solidarity #PublicHealthNotProfit
- Global Days of Action on Military Spending #GDAMS

11. Berikatan dengan Media

Manajemen relasi media membangun hubungan dengan editor, reporter, dan jurnalis dari surat kabar, radio, televisi, dan media digital untuk mengkomunikasikan pesan atau story anda secara efektif melalui platform media yang tepat. Jurnalis selalu mencari ide cerita dan sumbernya. Membangun hubungan yang kuat dengan personal media bisa membantu para advokat/pembela efektivitas pembangunan menjangkau audiens dengan lebih baik. Berikut beberapa tips dalam membangun relasi media:

- **Mengidentifikasi dan membuat daftar reporter media.** Identifikasi jurnalis/penulis outlet media yang ditarget yang meliput topik yang berkaitan dengan stori anda. Ini bisa dilakukan dengan memperhatikan nama-nama penulis/reporter cerita yang relevan dengan advokasi anda. Dalam beberapa kasus, outlet media mempublikasikan alamat email editorial mereka berdasarkan topik/tema. Akun media sosial reporter dan outlet media juga menyertakan tempat dimana anda bisa menemukan kontak media.

- **Tawarkan untuk membuat komentar atau pernyataan mengenai berita terbaru yang relevan dengan advokasi anda.** Ini bisa dilakukan dengan cara menawarkan interview media atau mengirim surat ke editor, atau mengajak mereka menuliskan komentar pada berita yang diposting di media sosial.

- **Berusaha menjadi terpercaya dan terjangkau.** Jujur dan terpercaya dalam informasi yang anda berikan ke reporter. Menghargai tenggat waktu (deadline) reporter dan komitmen yang anda bangun dengan mereka. Anda harus mampu merespon dengan cepat pertanyaan mereka. Selalu siap dengan alat pers atau media yang berisi profil organisasi anda, kontak person, bahan advokasi, dan gambar beresolusi tinggi yang terkait dengan organisasi dan advokasi.

Di bawah ini ada beberapa alat yang bisa digunakan ketika berhubungan dengan media:

- **Siaran Pers (Press Release).** Juga disebut pernyataan media atau rilis media, siaran pers adalah sebuah berita yang ditulis oleh orang yang melakukan advokasi, dan dikirim kepada anggota media yang ditargetkan. Dalam konteks mempopulerkan penelitian rakyat tentang aid observatorio, siaran pers adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan hasil penelitian ke media untuk mendukung advokasi anda.

  Karena siaran pers secara teknis adalah cerita berita, panjangnya hanya terdiri dari satu halaman dan harus memberikan jawaban pertanyaan 5W (what, when, where, why, who, and how/apa, kapan, dimana, mengapa, siapa, dan bagaimana). Sebagai tambahan, penulisan harus informatif; Bahasa formal dan puitis harus dihindari; dan jargon teknis harus digunakan sesedikit mungkin atau tidak sama sekali.

- **Surat untuk Editor/Redaksi** adalah surat yang ditujukan untuk publikasi mengenai isu yang menjadi perhatian pembaca. Topiknya bisa mengenai sikap anda terhadap editorial outlet, pada tulisan yang dipublikasikan, pada isu terbaru, atau untuk mengoreksi kesalahan atau mispresentasi. Surat untuk redaksi biasanya pendek, sekitar 200-300 kata. Selalu perhatikan petunjuk outlet media sebelum menuliskan surat ke redaksi.

- **Artikel Op-Ed** adalah artikel opini yang memuat kegiatan terkini atau tanggapan terhadap pendapat lain yang diungkapkan melalui publikasi outlet media. Ini lebih panjang dari surat untuk redaksi, biasanya terdiri dari 300 sampai 700 kata. Dalam menulis op-ed, selalu pastikan opini anda jelas dan didukung dengan data. Sampaikan ke pembaca mengapa mereka harus peduli dan aksi apa yang harus mereka lakukan.

- Mengundang wartawan ke event **media**. Event media adalah acara yang dirancang untuk diliput oleh media berita. Cara ini bisa berupa aksi simbolik atau mobilisasi, atau kampanye dimana media diundang untuk peliputan.

    - **Konferensi Pers** adalah salah satu event media yang paling umum. Kegiatan ini dilakukan secara resmi untuk menyampaikan informasi dan menjawab pertanyaan media. Dengan konferensi pers, anda bisa memberikan informasi lebih daripada press release (meskipun anda tetap harus membagikannya selama konferensi pers ini), lebih banyak interaksi dengan media dengan menjawab pertanyaan secara langsung, dan lebih banyak waktu dalam mengumumkan pembangunan yang penting dan menjelaskan implikasinya lebih dalam. ikuti tahapan berikut ketika melakukan konferensi pers:

        - Kirim laporan media satu halaman (media advisory) yang berisi apa, kapan, siapa, dimana, mengapa tentang kegiatan anda; sertakan nomor telepon dan alamat email; dan informasi relevan seperti foto pendukung.

        - Pilih pembicara dan pastikan mereka sudah diinformasikan dengan topik yang akan disampaikan. Kesaksian pihak pertama dari komunitas yang terdampak selalu lebih kuat dan meyakinkan. Pilih moderator yang akan bertugas membuka konferensi pers dengan memperkenalkan masalah dan partisipan. Moderator juga menjawab pertanyaan atau mengarahkan langsung ke partisipan yang tepat.

        - Siapkan bahan/materi pers untuk dibagikan selama konferensi pers berlangsung. Ini bisa termasuk press release, profil singkat dari pembicara, foto yang relevan, dan informasi latar belakang masalah.

        - Siapkan ruang konferensi pers. Pasang alat visual seperti poster sebagai latar pembicara ketika duduk di meja konferensi. Cek peralatan listrik. Siapkan makanan ringan.

        - Selama berlangsungnya konferensi pers, sambut media dan minta mereka mengisi daftar tamu. Tiap pembicara harus diberi waktu sekitar lima menit untuk menyampaikan tiga atau lima poin penting mereka. Setelah pidato berakhir, moderator menyilakan pertanyaan dari media. Konferensi pers biasanya berlangsung 45 menit sampai satu jam.

        - Setelah konferensi pers berakhir, pastikan memantau outlet media dan mencatat bagaimana tulisan anda diliput. Buat kontak

personal dengan reporter untuk menciptakan kesan yang baik juga supaya mereka mengingat anda tiap kali mereka butuh informasi.

Contoh Alat Komunikasi untuk Media

- **Siaran Pers (Press Release):** At global gathering on aid: Civil society groups hit US aid policy → **https://bit.ly/37ssbjB**
- **Surat untuk Editor**: Wet'suwet'en protests are about more than the pipeline → **https://bit.ly/2YdmHWX**
- **Artikel Op-Ed**: Development through and for the people → **https://bit.ly/3egrA6Y**
- **Media Advisory** : Indigenous Leaders, Legal Experts Opposing Site C Hold Press Conference on Parliament Hill → **https://bit.ly/2USUuTi**

Pertanyaan Diskusi

Kegiatan media apa lagi yang telah anda lakukan atau yang menurut anda bisa dilakukan untuk meraih audiens target dengan lebih baik?

Kegiatan 3.2.

Menyusun Rencana Advokasi untuk Hasil Penelitian Aid Observatorio OMS (Bagian B)

Tujuan	Menerapkan informasi yang telah dipelajari di sesi sebelumnya untuk menyusun rencana advokasi untuk efektivitas pembangunan.
Hasil yang diharapkan	Konsep rencana advokasi.
Bahan-bahan	• Presentasi PowerPoint dan/atau flipcharts • Proyektor LCD • Spidol

Catatan untuk Instruktur:

Kegiatan ini bisa membangun hasil kelompok dalam Kegiatan 3.1.

Lihat Lembar Kerja Kegiatan 3.2.

Instruksi Kegiatan 3.2.

1. Gunakan hasil dari Kegiatan 3.1.
2. Tuliskan daftar metode yang tepat untuk melibatkan pemangku kepentingan utama/audiens yang ditentukan di kegiatan 3.1. Kelompokkan ke dalam produk komunikasi (meme, press release, policy brief, dan sebagainya), dan kegiatan (konferensi pers, workshop kebijakan, mobilisasi, dan sebagainya).
3. Tuliskan indikator keberhasilan dalam melibatkan pemangku kepentingan.
4. Tentukan timeline untuk kegiatan/metode yang akan digunakan.
5. Mengidentifikasi sumber yang dibutuhkan (sumber daya manusia, transportasi, keuangan, dan sebagainya).

LAMPIRAN

Lampiran A: Sampel Data Kualitatif dan Kuantitatif 84

I. Contoh Data Kualitatif

II. Contoh Data Kuantitatif

Lampiran B: Sampel Matriks Pemantauan dan Evaluasi 87

Lampiran C: Lembar Kerja Kegiatan 1. 88

Lampiran D: Lembar Kerja Kegiatan 2.1. 89

Lampiran E: Lembar Kerja Kegiatan 2.2. 90

Lampiran F: Lembar Kerja Kegiatan 3.1 dan 3.2. 91

Lampiran G: Informasi Kontak dari Aktor Pembangunan Mekanisme Akuntabilitas 92

Lampiran A
Sampel Data Kualitatif dan Kuantitatif

I. Contoh Data Kualitatif

Contoh 1: Bandingkan antara Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) dan New Development Bank (NDB)[22]

Fitur Utama Kerangka Lingkungan dan Sosial AIIB dan NDB

AIIB

- Menyatakan dukungan untuk tujuan Paris Agreement
- Bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dengan pembiayaan bersama dengan Bank Pembangunan Mulitlateral (MDB), tapi memungkinkan penerapan kebijakan pemodal bersama berdasarkan kasus per kasus.
- Memberikan penilaian dan kategori proyek ke dalam empat kategori berdasarkan lingkungan potensial dan resiko sosial serta dampaknya.
- Menyediakan standar lingkungan dan sosial dalam tiga wilayah: Penilaian Sosial dan Lingkungan Serta Manajemen (ENvironmental and Social Assessment and Management /ESS 1); Pemukiman Kembali Tidak Suka Rela (Involuntary Resettlement/ESS 2); dan Masyarakat Adat (Indegeneous People/ESS 3).
- Menyediakan daftar pengecualian lingkungan dan sosial.

NDB

- Mencantumkan prinsip inti berikut: pembangunan inklusif dan berkelanjutan, sistem negara, kepentingan lingkungan dan sosial, dan perubahan iklim.
- Menggunakan sistem negara dan korporasi dalam manajemen lingkungan dan resiko sosial serta dampaknya.
- Memberikan penilaian dan kategori proyek ke dalam empat kategori berdasarkan lingkungan potensial dan resiko sosial serta dampaknya.
- Menyediakan standar lingkungan dan sosial dalam tiga area: penilaian dan manajemen lingkungan dan sosial (ESS 1); dan masyarakat adat (ESS 3).
- Memiliki daftar pengecualian lingkungan dan sosial.

Sumber: AIIB's Environment and Social Framework. Disetujui Februari 2016 (Diubah Februari 2019); NDB's ENvironment and Social Framework, Maret 2016

[22] Custodio, I. (2020, March). Introduction in S .I. Torres (Ed.). Asian Infrastructure Investment Bank and the New Development Bank: Paradigm shift or rehashing corporate-led development? (pp. 5-17). Retrieved from https://realityofaid.org/wp-content/uploads/2020/04/AIIB-NDB-Paradigm-Shift-or-Rehashing-CorporateLed-Development.pdf

Contoh 2: Menggambarkan "Konsultasi Inklusif" dalam negara dimana anggota Reality of Aid berada[23]

Di Ekuador dimana konsultasi dan partisipasi dimandatkan oleh hukum pada semua tingkat termasuk lokal, kadang terjadi di tahap terakhir dari proses kebijakan, dan OMS sering menganggap latihan tersebut sebagai salah satu "validasi sosial". Ada peluang yang tidak cukup untuk berdialog tentang implikasi dari konsep baru Sumak Kawsay (good life) untuk menggantikan pembangunan (Bab Ekuador).

Di Zambia, OMS dipandang sebagai "hanya stempel karet" sebuah rencana yang proses produksinya dimulai tanpa masukan dari mereka, contoh, pemerintah sudah menyiapkan draft nol, dan OMS yang terakhir diminta untuk memberikan masukan mereka sebagai finalisasi (masyarakat sipil, efektivitas bantuan, dan lingkungan yang memadai).

Kasus Filipina juga indikatif, dimana partisipasi OMS dalam konsultasi regional hanya lewat undangan saja, dan mereka yang bersikap kritis secara terbuka dengan kebijakan NEDA (pemerintah) sepertinya tidak akan diminta untuk berpartisipasi (bab Filipina). Penulis bab Pakistan menggambarkan sebuah sistem pemerintahan yang eksklusif yang menjadi ... hampir tidak mampu menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks "masyarakat ... telah mengembangkan sebuah sikap apatis terhadap isu dalam rangka mendapatkan perhatian publik yang lebih besar" (Bab Pakistan).

II. Contoh Data Kuantitatif

Contoh 1: Bandingkan kekuatan suara (voting power) dan cadangan kapital anggota ADB.[24]

Gambar 3
Cadangan kapital dan kekuatan suara anggota non-regional ADB

	Tahun Keanggotaan	Kapital Berlangganan[a] (% of total)	Kekuatan Suara[b] (% of total)
NON-REGIONAL			
Austria	1966	0.340	0.571
Belgium	1966	0.340	0.571
Canada	1966	5.231	4.483
Denmark	1966	0.340	0.571
Finaland	1966	0.340	0.571
France	1970	2.328	2.161
Germany	1966	4.326	3.759
Ireland	2006	0.340	0.571
Italy	1966	1.807	3.759
Luxembourg	2003	0.340	0.571
The Netherlands	1966	1.026	1.744
Norway	1966	0.340	0.571
Portugal	2002	0.113	1.119
Spain	1986	0.340	0.571
Sweden	1966	0.340	0.571
Switzerland	1967	0.584	0.765
Turkey	1991	0.340	0.571
United Kingdom	1966	2.042	1.932
United States	1966	15.607	12.784
Subtotal		**36.467**	**34.854**
TOTAL		**100.00**	**100.00**

Catatan: Angka, tidak bisa dijumlahkan dengan tepat karena pembulatan.

[23] Reality of Aid. (2011). Democratic Ownership and Development Effectiveness: Civil Society Perspectives on Progress since Paris. Retrieved from https://www.realityofaid.org/wp-content/uploads/2013/02/Final-bridged-Roa-Report-2011-EFS.pdf

[24] Reality of Aid-Asia Pacific. (2019). CSO Review of Asian Development Bank's Development Effectiveness. Retrieved from https://realityofaid.org/wp-content/uploads/2019/04/ADB-25April-web1-1.pdf

Contoh 2: Biaya dan Rencana Keuangan Proyek KEK Mandalika[25]

Perkiraan Biaya Proyek dan Rencana Pembiayaan - Fase 1 (2019-2023)			
Komponen	**Jumlah Biaya**	**Sumber Keuangan**	
		AIIB	ITDC
Komponen 1: Pelayanan Dasar dan Infrastruktur (termasuk desa tetangga)	169.30	169.30	0.00
Komponen 2: Dukungan Implementasi dan Pengembangan Kapasitas	15.40	14.40	1.00
Biaya Tanah	67.11	0.0	67.11
Kontinjensi (Fisik dan Harga)	41.36	41.46	0.00
Harga Pembiayaan Selama Konstruksi	23.34	23.34	0.00
Total	**316.50**	**248.39**	**68.11**

Dalam juta USD; Sumber: AIIB, 2018

[25] Sabar, K. (2020). AIIB Financial Support for Mandalika SEZ Deprives People's Rights in S. I. Torres (Ed.). Asian Infrastructure Investment Bank and the New Development Bank: Paradigm Shift or Rehashing Corporate-Led Development? (pp. 40-49). Retrieved from https://realityofaid.org/wp-content/uploads/2020/04/AIIB-NDB-Paradigm-Shift-or-Rehashing-CorporateLed-Development.pdf

Lampiran B
Sampel Data Kualitatif dan Kuantitatif

	INDIKATOR	**DEFINISI** *Bagaimana perhitungannya?*	**GARIS DASAR** *Apa itu arus nilai?*	**TARGET** *Apa itu nilai target?*	**SUMBER DATA** *Bagaimana caranya diukur?*	**FREKUENSI** *Berapa kali diukur?*	**TANGGUNG JAWAB** *Siapa yang akan menghukumya?*
Tujuan							
Hasil							
Pengeluaran							

Lampiran C
Lembar Kerja Kegiatan 1.

a	b	c	d	e	f	g
Masalah apa yang anda coba pecahkan?	Siapa audiens utama anda?	Apa entri poin anda dalam meraih audiens utama anda?	Langkah apa yang dibutuhkan untuk perubahan?	Apa hasil dari kerja anda?	Apa manfaat dari kerja anda?	Apa dampak yang ingin anda capai?

h
Apa lingkungan eksternal terkini (ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi hasil dan manfaat?

Lampiran D
Lembar Kerja Kegiatan 2.1.

Masalah Penelitian. *Masalah apa yang ingin anda jawab?*	
Tujuan Umum/Primer Penelitian. *Apa yang ingin anda selesaikan?*	**Tujuan Khusus/Sekunder Penelitian.** *Data apa yang ingin anda kumpulkan? Apa dampak yang ingin anda ketahui?*
Strategi dan Pendekatan. *Bagaimana anda melaksanakan penelitian?*	
Variabel/Data yang Dibutuhkan. *Apa data yang harus anda penuhi?*	**Sumber Data.** *Dari mana anda mendapatkan data tersebut?*

Lampiran E
Lembar Kerja Kegiatan 2.2.

<table>
<tr><td colspan="4">Proyek Pembangunan yang didanai oleh IFI/DFI. Proyek mana yang akan anda buatkan penelitian?</td></tr>
<tr><td colspan="4">Masalah Penelitian. Masalah apa yang ingin anda pecahkan?</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tujuan Umum/Primer Penelitian. Masalah apa yang ingin anda pecahkan?</td><td colspan="2">Tujuan Khusus/Sekunder Penelitian. Data apa yang ingin anda kumpulkan? Dampak apa yang anda ingin ketahui?</td></tr>
<tr><td>Variabel/Data yang Dibutuhkan. Data apa yang anda butuhkan?</td><td>Sumber Data. Dimana anda bisa mendapatkan data yang dibutuhkan?</td><td>Metode Pengumpulan Data. Metode mana yang akan anda gunakan untuk mencapai tujuan anda?</td><td>Metode Analisis Data. Metode mana yang akan anda gunakan untuk menganalisa data yang dikumpulkan?</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Lampiran F
Lembar Kerja Kegiatan 3.1 dan 3.2.

Isu Bantuan dan Efektivitas Pembangunan:						
Alasan mengapa isu ini penting (sebab dan akibat):						
Visi Perubahan:						
Tujuan Advokasi #1:						
Pemangku Kepentingan Utama	**Pesan Advokasi**	**Metode Perikatan (Engagement)**		**Milestones**	**Jangka Waktu**	**Sumber Daya yang Dibutuhkan**
		Materi Komunikasi	**Kegiatan**			
Tujuan Advokasi #2:						
Stakeholder Kepentingan Utama	**Pesan Advokasi**	**Metode Perikatan (Engagement)**		**Milestones**	**Jangka Waktu**	**Sumber Daya yang Dibutuhkan**
		Materi Komunikasi	**Kegiatan**			

Lampiran G
Informasi Kontak tentang Mekanisme Akuntabilitas Aktor Pembangunan

African Development Bank (AfDB)	
Mekanisme Akuntabilitas	**Mekanisme Review Independen (Independent Review Mechanism/IRM):** https://www.afdb.org/en/independent-review-mechanism-irm **Bagaimana cara mengajukan keluhan:** https://www.afdb.org/en/independent-review-mechanism/management-of-complaints/how-to-file-a-complaint
Kontak Person atau Pihak yang Bertanggung Jawab	Compliance Review and Mediation Unit (BCRM) - AfDB
Alamat Email	BCRM_info@afdb.org B.kargougou@afdb.org and copy to A.Bacarese@afdb.org
Nomor Kontak	Tel: +225 20 26 29 00 or +225 20 26 40 49

Asian Development Bank (ADB)	
Mekanisme Akuntabilitas	**Bagaimana cara mengajukan keluhan:** https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/how-file-complaint **Mekanisme Akuntabilitas:** https://www.adb.org/who-we-are/accountability-mechanism/main **Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas/Accountability Mechanism Policy 2012:** https://www.adb.org/documents/accountability-mechanism-policy-2012 **Ringkasan Mekanisme Kebijakan:** https://www.adb.org/publications/accountability-mechanism-summary
Kontak Person atau Pihak yang Bertanggung Jawab	Complaint Receiving Officer (Pejabat yang Menerima Keluhan)
Formulir Kontak Email	https://www.adb.org/contact?target=Hmzj1lzfKqMSRDKA0C6/kg==&name=Complaint%20Receiving%20Officer&referrer=node/81970
Nomor Kontak	Tel: +63 2 8632 4444 ext 70309

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	
Mekanisme Akuntabilitas	**Mekanisme Rakyat yang terkena dampak proyek:** https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/project-affected-peoples-mechanism/how-we-assist-you/index.html **Bagaimana cara mengajukan keluhan:** https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/project-affected-peoples-mechanism/submission/index.html
Kontak Person atau Pihak yang Bertanggung Jawab	Managing Director Complaints-resolution, Evaluation & Integrity Unit (CEIU)
Alamat Email	ppm@aiib.org
Nomor Kontak	Tel: +225 20 26 29 00 or +225 20 26 40 49

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)	
Mekanisme Akuntabilitas	**Mekanisme Akuntabilitas Proyek Independen (Independent Project Accountability Mechanism/IPAM):** https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html **Bagaimana cara mengajukan keluhan:** https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
Kontak Person atau Pihak yang Bertanggung Jawab	Victoria Marquez-Mees Chief Accountability Officer European Bank for Reconstruction and Development
Alamat Email	ipam@ebrd.com

Inter-American Development Bank (IADB)	
Mekanisme Akuntabilitas	**Mekanisme Konsultasi dan Investigasi Independen:** https://www.iadb.org/en/mici/mici-independent-consultation-and-investigation-mechanism **Bagaimana cara mengajukan keluhan:** https://www.iadb.org/en/mici/how-file-complaint
Kontak Person atau Pihak yang Bertanggung Jawab	Independent Consultation and Investigation Mechanism (MICI)
Alamat Email	mecanismo@iadb.org
Nomor Kontak	Tel:+1 (202) 623-3952 | Fax: +1 (202) 312-4057

Japan International Cooperation Agency (JICA)	
Mekanisme Akuntabilitas	**Konsiderasi Lingkungan dan Sosial:** https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/objection/index.html
Kontak Person atau Pihak yang Bertanggung Jawab	Examiners for the Guidelines Secretariat of The Examiner for the Guidelines Japan International Cooperation Agency
Alamat Email	jicama-jigi@jica.go.jp
Nomor Kontak	Fax: +81-03-5226-6973

New Development Bank (NDB)	
Mekanisme Akuntabilitas	**Konsiderasi Lingkungan dan Sosial:** https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/objection/index.html
Kontak Person atau Pihak yang Bertanggung Jawab	Examiners for the Guidelines Secretariat of The Examiner for the Guidelines Japan International Cooperation Agency
Alamat Email	jicama-jigi@jica.go.jp
Nomor Kontak	Fax: +81-03-5226-6973

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)	
Mekanisme Akuntabilitas	**Titik Kontak Nasional untuk Pelaksanaan Bisnis yang Bertanggung Jawab:** http://mneguidelines.oecd.org/ncps/
Kontak Person atau Pihak yang Bertanggung Jawab	National Contact Point
Informasi Kontak	The OECD Secretariat is responsible for coordination with National Contact Points. **Contact details of the National Contact Points for Responsible Business Conduct - October 2020 (per country):** http://mneguidelines.oecd.org/ncp-contact%20list-%20website-%202020%20october.pdf **Email:** rbc@oecd.org

United Nations Development Programme (UNDP)	
Mekanisme Akuntabilitas	**Tinjauan Kepatuhan Sosial dan Lingkungan (untuk investigasi kepatuhan):** https://www.undp.org/content/undp/en/home/accountability/audit/secu-srm/social-and-environmental-compliance-unit.html
Kontak Person atau Pihak yang Bertanggung Jawab	Social and Environmental Compliance Unit (SECU)
Alamat Email	project.concerns@undp.org
Nomor Kontak	Tel: 001 (917) 207 4285

Mekanisme Akuntabilitas	**Mekanisme Respon Pemangku Kepentingan (untuk penyelesaian sengketa):** https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/stakeholder-response-mechanism.html **UNDP SECU and SRM Brochure:** http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/compliance-and-dispute-resolution/UNDP-SECU-SRM-Brochure-2014.pdf
Kontak Person atau Pihak yang Bertanggung Jawab	Stakeholder Response Mechanism (SRM)
Alamat Email	stakeholder.response@undp.org

World Bank (WB)	
Mekanisme Akuntabilitas	**Mekanisme Akuntabilitas World Bank:** https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/documents/AccountabilityMechanismResolution.pdf **Panel Inspeksi:** https://www.inspectionpanel.org/ **Bagaimana cara mengajukan keluhan:** https://www.inspectionpanel.org/how-to-file-complaint
Kontak Person atau Pihak yang Bertanggung Jawab	Examiners for the Guidelines Secretariat of The Examiner for the Guidelines Japan International Cooperation Agency
Alamat Email	ipanel@worldbank.org
Nomor Kontak	Tel: +1 202 458 5200 | Fax: +1 202 522 0916

Sumber lain:

Penasehat Akuntabilitas
https://accountabilitycounsel.org/policy-advocacy/

- Anda juga bisa mengecek situs ini untuk melihat kumpulan mekanisme akuntabilitas dari beberapa lembaga multilateral.

DAFTAR ISTILAH

Advokasi	melibatkan orang, baik individu atau kelompok yang rentan atau perwakilan mereka yang disepakati, yang secara efektif menekan kasus mereka dengan orang lain yang berpengaruh, tentang situasi yang mempengaruhinya secara langsung atau paling sering, mencoba untuk mencegah perubahan yang diusulkan yang pada akhirnya akan memperburuk situasi.
Agen Bilateral	bertanggung jawab terhadap pemerintah tunggal dan kadang merupakan bagian dari kementerian pemerintah, seperti departemen luar negeri
Aliran Bantuan	jumlah uang yang dikeluarkan dari negara donor kepada negara penerima
Aliran Swasta	transaksi modal jangka panjang oleh pejabat OECD dengan negara penerima bantuan, atau melalui lembaga multilateral untuk kepentingan negara tersebut; termasuk semua bentuk investasi termasuk pinjaman bank internasional dan kredit ekspor
Anggaran	dokumen yang merangkum pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan untuk kalender tertentu atau tahun fiscal
Bantuan	lihat Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Aid/ ODA)
Bantuan Bilateral	bantuan yang diberikan oleh pemerintah donor secara langsung kepada pemerintah negara berkembang biasanya disebut negara/pemerintah mitra penerima

Bantuan Multilateral	bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi multilateral dan (International Finance Institution/IFI) yang pada gilirannya terlibat dalam program pemerintah pada negara berkembang yang menjadi target
Bantuan Teknis	bantuan non-keuangan dalam bentuk sharing informasi dan keahlian, petunjuk, skill training, transmisi pengetahun kerja, dan pelayanan konsultasi
Bantuan Terikat	ditawarkan pada kondisi bahwa barang dan jasa diperoleh dari negara donor
Data	bagian-bagian tunggal dari informasi factual yang direkam dan digunakan untuk tujuan penelitian dan analisis; bisa dalam bentuk file numerik atau teks yang dikelompokkan menggunakan alat visualisasi seperti table, grafik, atau bagan
Data Terbuka	gagasan bahwa data tertentu harus tersedia dengan bebas agar masyarakat bisa menggunakan, memanipulasi, dan menerbitkan ulang sesuai keinginan mereka, tanpa larangan copyright, hak paten atau mekanisme control lainnya
Efektivitas Bantuan	berfokus pada aspek teknis pengaturan dan penyaluran bantuan
Efektivitas Pembangunan	menggunakan pendekatan berbasis HAM untuk pembangunan
Evaluasi	biasanya dilakukan di tengah dan di akhir rencana atau proyek advokasi untuk menganalisis apa yang bisa dilakukan, menilai efektivitasnya dalam melakukan perubahan, dan memperoleh pelajaran strategis

Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)	hak khusus yang berkaitan dengan masyarakat adat dan diakui dalam Deklarasi AS mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat
Hibah	transfer dalam bentuk tunai, barang atau jasa yang tidak membutuhkan pelunasan
Hibah Setara	metodologi untuk melacak aliran bantuan; hanya merekam elemen ODA pada hibah, yang menghilangkan kebutuhan untuk merekam pembayaran utang dan untuk membedakan antara ODA netto dan bruto
Kampanye	memaksimalkan platform yang lebih luas, dan merancang sebuah fase untuk mengoptimalkan efektivitas tiap medium; segala kegiatan yang akan mengumpulkan orang untuk mendorong perubahan dalam kebijakan
Kebijakan Umum	seperangkat system, hukum, prinsip panduang atau seperangkat aturan yang memberikan standar pada penggunaan bantuan dan implementasi dan penyalurannya sesuai dengan yang ditetapkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan/ atau perwakilannya
Keringanan Utang	bisa berupa pembatalan, penjadwalan ulang, pembiayaan ulang, atau pengaturan ulang utang
Kerja Sama Pembangunan	kemitraan untuk pembangunan; juga dikenal sebagai Kerja sama Pembangunan yang Efektif (Effective Development Cooperation/EDC)
Kerja Sama Selatan-Selatan	ditetapkan oleh AS sebagi kerangka kerja kolaborasi yang lebih luas di antara negara-negara Selatan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan domain teknis
Kerja Sama Triangular	umumnya melibatkan dua atau lebih mitra negara berkembang yang berkolaborasi dengan negara maju atau organisasi internasional dalam transfer keahlian dan sumber daya

Keuangan Campuran	penggunaan dana pembangunan untuk menarik investasi swasta
Lembaga Keuangan Internasional (IFI)	menyediakan bantuan pembangunan untuk negara-negara berkembang; porsi signifikan dari bantuan ini bersumber dari kontribusi, termasuk memanfaatkan ODA negara donor
Lobi	melibatkan komunikasi langsung dengan pembuat kebijakan yang memilliki kekuasaan langsung terhadap analisis kebijakan dan perubahan kebijakan atau bagi pihak yang berpengaruh yang memiliki sumber daya atau hubungan substansial dengan pembuat keputusan
Manajemen Data	proses administratif dimana data yang diperlukan diperoleh, divalidasi, disimpan, dilindungi, dan diproses, dan juga aksesibilitas, keandalan, dan ketepatan waktunya dipastikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna data
Metode Kualitatif	membutuhkan "mengapa" dan "bagaimana" dan bukan cuma apa, dimana, dan kapan sebuah fenomena sosial terjadi
Metode Kuantitatif	menggunakan statistik dan probabilitas dalam memahami sikap sosial dan fenomena sosial
Official Development Assistance (ODA)	(ODA) ditetapkan oleh OECD DAC sebagai bantuan pemerintah yang mempromosikan dan menarget pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara berkembang; dikenal sebagai Aid (bantuan)
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	secara luas didefinisikan untuk merujuk pada organisasi non-negara dan non-laba; bisa termasuk serikat petani, organisasi masyarakat dan akar rumput, lembaga penelitian independen, dan serikat buruh

Organisasi/Lembaga Multilateral	didanai oleh beberapa pemerintah; ada lebih dari 200 agen bantuan multilateral yang termasuk agen sistem AS dan Komisi Eropa
Pemantauan	pengumpulan data secara sistematik sepanjang durasi rencanan advokasi; mengumpulkan informasi yang akan menjadi dasar pelacakan progress pelaksanaan, dan memudahkan organisasi atau komunitas untuk mengidentifikasi masalah yang harus ditangani sebagai rencna untuk bergerak
Pemerintah/Negara Donor	pemerintah yang menetapkan bagian dari anggaran nasional-nya (atau bantuan) untuk melaksanakan proyek pembangunan di negara-negara berkembang
Pemerintah/Negara Penerima	negara menerima segala bentuk bantuan pembangunan (utang, hibah, bantuan teknis, dan sebagainya) dari pemerintah lain atau lembaga keuangan internasional
Peneliti Partisipatif	strategi dimana subyek penelitian menjadi partisipan penelitian dengan cara melibatkan mereka secara langsung dalam beberapa bagian atau keseluruhan proses penelitian; juga bermakna bahwa peneliti memiliki interaksi konstan dengan partisipan, dan mungkin sesekali tinggal bersama atau mengikuti kegiatan sehari-hari mereka
Penelitian Kualitatif	strategi dimana alih-alih data numeris, peneliti mengumpulkan, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari data tekstual atau narasi
Peneliti Kuantitatif	strategi dimana data numerik dikumpulkan dan dianalisa menggunakan prosedur statistic untuk menggambarkan kesimpulan
Penelitian Masyarakat	alternatif ke penelitian tradisional yang dipimpin kaum elit; melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat, khususnya, mereka yang tidak berdaya dan terpinggirkan

Pengeluaran Umum	merujuk pada biaya yang ditanggung oleh pemerintah
Persyaratan	konsep dalam pembangunan internasional, ekonomi politik dan hubungan internasional dan menjelaskan penggunaan syarat yang terlampir pada utang, keringanan utang, bantuan bilateral atau keanggotaan organisasi internasional, khususnya IFI, organisasi regional atau negara donor
Pinjaman Lunak	transfer pembayaran yang dibutuhkan dengna suku bunga lebih rendah dibandingkan harga pasar yang berlaku dan/atau masa tenggang yang lebih lama; juga dikenal sebagai soft loan
Prinsip-Prinsip Efektivitas Pembangunan	prinsip kerja sama pembangunan yang efektif dan berbasis masyarakat: focus pada hasil, kepemilikan negara, kemitraan inklusif, serta akuntabilitas dan transparansi mutual; juga dikenal sebagai prinsip-prinsip EDC
Sektor Swasta	secara umum merujuk pada sektor bisnis atau entitas berorientasi laba
Sistem Bantuan	merujuk pada stake holder pembangunan (pemerintah donor, negara penerima, lembaga keuangan multilateral dan internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil) yang mengatur, memantau dan menilai ODA
South-South Development Cooperation (SSDC)	(South-South Development Cooperation- Kerja sama Pembangunan Selatan-Selatan) ungkapan solidaritas di antara masyarakat dan negara Selatan, dan salah satu yang berkontribusi pada kesejahteraan nasional, kemandirian, dan kapasitas setiap negara untuk mencapai tujuan pembangunan
Utang Asing	jumlah uang yang dipinjam oleh sebuah negara untuk negara pada negara kreditor
Utang Non-konsesi	transfer untuk pembayaran diperlukan dengan tingkat bunga sesuai pasar

Pindai Kode QR ini untuk mengunduh salinan elektronik dari buku pegangan dan untuk menonton video modul pelatihan.

The Reality of Aid Network

A Pre-eminent Southern-led North/South Network on Reforming Aid Policies and Practices

CSO Partnership for Development Effectiveness

INDIES

INSTITUTE FOR NATIONAL AND DEMOCRACY STUDIES

European Commission

Sida

TAIWAN FOUNDATION for DEMOCRACY

財團法人 臺灣民主基金會